



BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Setiabudi No. 201 A, Kel. Srandol Kulon,
Kec. Banyumanik, Kota Semarang. 50263

2024

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD



GRAHA WIDIA RAJA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga
melayani
bangsa**

**CORPORATE
UNIVERSITY**



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DARAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	ii
I Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran	iii
II Laporan Realisasi Anggaran SKPD	iv
III Neraca Komparatif SKPD	vii
IV Laporan Operasional SKPD	xi
V Laporan Perubahan Ekuitas SKPD	xiii
VI Catatan Atas Laporan Keuangan	xv
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	4
Bab 2 Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan	7
2.1. Ekonomi Makro	7
2.2. Kebijakan Keuangan	9
Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	16
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum	16
3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	24
Bab 4 Kebijakan Akuntansi	26
4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD	26
4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	26
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	27
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam SAP pada SKPD	29
Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	40
5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran	40
5.1.1. Pendapatan	40
5.1.2. Belanja	43
5.2. Penjelasan Pos - Pos Neraca	51
5.2.1 Aset	51
5.2.2 Kewajiban	81
5.2.3 Ekuitas Dana	81
5.3. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional	82
5.3.1. Pendapatan	82
5.3.2. Beban	87
5.3.3. Surplus Defisit Non Operasional	96
5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	96
Bab 6 Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan	100
Bab 7 Penutup	119
Lampiran Tambahan	122



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://www.bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, 31 Desember 2024

PENGGUNA ANGGARAN

Dr. SADIMIN, S.Pd., M.Eng.
NIP. 19721206 199412 1 001



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

NO	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	PENDAPATAN DAERAH					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pajak Daerah		-	-	-	-
4	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		-	-	-	-
5	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		-	-	-	-
6	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		-	-	-	-
7	Pajak Air Permukaan		-	-	-	-
8	Pajak Rokok		-	-	-	-
9	Pajak Alat Berat		-	-	-	-
10	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		-	-	-	-
11	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		-	-	-	-
12	Retribusi Daerah		2.365.700.000,00	2.612.469.000,00	110,43	3.173.996.400,00
13	Retribusi Jasa Umum		-	-	-	-
14	Retribusi Jasa Usaha		2.365.700.000,00	2.612.469.000,00	110,43	3.173.996.400,00
15	Retribusi Perizinan Tertentu		-	-	-	-
16	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-	-	-	-
17	Bagian Laba yang Dibaikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penvertaan		-	-	-	-
18	Bagian Laba yang Dibaikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penvertaan		-	-	-	-
19	Bagian Laba yang Dibaikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penvertaan		-	-	-	-
20	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		19.714.300.000,00	19.997.776.879,00	101,44	21.154.472.340,00
21	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-	-	-
22	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-	-	-
23	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-	-	-
24	Hasil Kerja Sama Daerah		-	-	-	-
25	Jasa Giro		-	-	-	-
26	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-	-	-
27	Pendapatan Bunga		-	-	-	-
28	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		-	-	-	-
29	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		19.714.300.000,00	19.997.776.879,00	101,44	21.154.472.340,00
30	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing		-	-	-	-
31	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		-	-	-	-
32	Pendapatan Denda Pajak Daerah		-	-	-	-
33	Pendapatan Denda Retribusi Daerah		-	-	-	-
34	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		-	-	-	-
35	Pendapatan dari Pengembalian		-	-	-	-
36	Pendapatan BLUD		-	-	-	-
37	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan		-	-	-	-
38	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas		-	-	-	-
39	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-	-	-
40	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		-	-	-	-
41	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		-	-	-	-
42	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf		-	-	-	-
43	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak		-	-	-	-
44	Pungutan bagi Wisatawan Asing		-	-	-	-
45	Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah		-	-	-	-
46	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		22.080.000.000,00	22.610.245.879,00	102,40	24.328.468.740,00
47						
48	PENDAPATAN TRANSFER					
49	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		-	-	-	-
50	Dana Perimbangan		-	-	-	-
51	Dana Insentif Daerah (DID)		-	-	-	-
52	Insentif Fiskal		-	-	-	-
53	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-	-	-
54	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-	-	-
55	Dana Alokasi Khusus (DAK)		-	-	-	-
56	Pendapatan Transfer Antar Daerah		-	-	-	-
57	Pendapatan Bagi Hasil		-	-	-	-
58	Bantuan Keuangan		-	-	-	-
59	Jumlah Pendapatan Transfer		-	-	-	-
60						
61	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
62	Pendapatan Hibah		-	-	-	-
63	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		-	-	-	-
64	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
65	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri		-	-	-	-
66	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri		-	-	-	-
67	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis		-	-	-	-
68	Dana Darurat		-	-	-	-
69	Dana Darurat		-	-	-	-
70	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	-
71	Lain-lain Pendapatan		-	-	-	-
72	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		-	-	-	-
73	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara		-	-	-	-
74	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat		-	-	-	-
75	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah		-	-	-	-
76						
77	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		22.080.000.000,00	22.610.245.879,00	102,40	24.328.468.740,00
78						
79	BELANJA DAERAH					
80	BELANJA OPERASI					
81	Belanja Pegawai		27.176.433.000,00	25.936.685.521,00	95,44	26.902.464.924,00
82	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		12.101.142.000,00	11.939.500.263,00	98,66	12.561.034.695,00
83	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		14.618.491.000,00	13.566.705.258,00	92,81	13.896.507.729,00
84	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obiektif Lainnya ASN		456.800.000,00	430.480.000,00	94,24	444.922.500,00
85	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD		-	-	-	-
86	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		-	-	-	-
87	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH		-	-	-	-
88	Belanja Gaji dan Tunjangan MRP		-	-	-	-
89	Belanja Pegawai BOS		-	-	-	-
90	Belanja Pegawai BOSP		-	-	-	-
91	Belanja Pegawai BLUD		-	-	-	-

92	Belanja Barang dan Jasa		37.059.454.000,00	36.104.026.887,00	97,42	42.624.405.003,00
93	Belanja Barang		6.285.644.000,00	6.231.722.510,00	99,14	8.926.777.952,00
94	Belanja Jasa		17.493.426.000,00	16.793.471.444,00	96,00	21.526.714.585,00
95	Belanja Pemeliharaan		2.270.420.000,00	2.254.965.644,00	99,32	3.814.125.683,00
96	Belanja Perjalanan Dinas		11.005.464.000,00	10.819.367.289,00	98,31	8.356.786.783,00
97	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak		4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	-
98	Belanja Barang dan Jasa BOP		-	-	-	-
99	Belanja Barang dan Jasa BOS		-	-	-	-
100	Belanja Barang dan Jasa BOSP		-	-	-	-
101	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas		-	-	-	-
102	Belanja Barang dan Jasa BLUD		-	-	-	-
103	Belanja Bunga		-	-	-	-
104	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	-
105	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain		-	-	-	-
106	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	-	-
107	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	-	-
108	Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)		-	-	-	-
109	Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD		-	-	-	-
110	Belanja Subsidi		-	-	-	-
111	Belanja Subsidi kepada BUMN		-	-	-	-
112	Belanja Subsidi kepada BUMD		-	-	-	-
113	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta		-	-	-	-
114	Belanja Subsidi kepada Koperasi		-	-	-	-
115	Belanja Hibah		-	-	-	-
116	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	-
117	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
118	Belanja Hibah kepada BUMN		-	-	-	-
119	Belanja Hibah kepada BUMD		-	-	-	-
120	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan		-	-	-	-
121	Belanja Hibah Dana BOS		-	-	-	-
122	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		-	-	-	-
123	Belanja Hibah Dana BOSP		-	-	-	-
124	Belanja Bantuan Sosial		-	-	-	-
125	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu		-	-	-	-
126	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga		-	-	-	-
127	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat		-	-	-	-
128	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)		-	-	-	-
129	Jumlah Belanja Operasi		64.235.887.000,00	62.040.712.408,00	96,58	69.526.869.927,00
130						
131	BELANJA MODAL					
132	Belanja Modal Tanah		-	-	-	-
133	Belanja Modal Tanah		-	-	-	-
134	Belanja Modal Tanah BLUD		-	-	-	-
135	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		1.162.600.000,00	1.126.015.000,00	96,85	2.042.405.150,00
136	Belanja Modal Alat Besar		38.000.000,00	37.000.000,00	97,37	30.000.000,00
137	Belanja Modal Alat Angkutan		580.000.000,00	553.400.000,00	95,41	633.000.000,00
138	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur		-	-	-	4.000.000,00
139	Belanja Modal Alat Pertanian		-	-	-	-
140	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		106.600.000,00	105.400.000,00	98,87	204.050.000,00
141	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		438.000.000,00	430.215.000,00	98,22	341.155.150,00
142	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		-	-	-	-
143	Belanja Modal Alat Laboratorium		-	-	-	-
144	Belanja Modal Alat Persenjataan		-	-	-	-
145	Belanja Modal Komputer		-	-	-	830.200.000,00
146	Belanja Modal Alat Eksplorasi		-	-	-	-
147	Belanja Modal Alat Pengeboran		-	-	-	-
148	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemukiman		-	-	-	-
149	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi		-	-	-	-
150	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja		-	-	-	-
151	Belanja Modal Alat Peraga		-	-	-	-
152	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi		-	-	-	-
153	Belanja Modal Rambu-rambu		-	-	-	-
154	Belanja Modal Peralatan Olahraga		-	-	-	-
155	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS		-	-	-	-
156	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP		-	-	-	-
157	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD		-	-	-	-
158	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		-	-	-	-
159	Belanja Modal Bangunan Gedung		-	-	-	-
160	Belanja Modal Monumen		-	-	-	-
161	Belanja Modal Bangunan Menara		-	-	-	-
162	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti		-	-	-	-
163	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD		-	-	-	-
164	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	-	-
165	Belanja Modal Jalan dan Jembatan		-	-	-	-
166	Belanja Modal Bangunan Air		-	-	-	-
167	Belanja Modal Instalasi		-	-	-	-
168	Belanja Modal Jaringan		-	-	-	-
169	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD		-	-	-	-
170	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		15.000.000,00	14.898.800,00	99,33	14.986.332,00
171	Belanja Modal Bahan Perpustakaan		15.000.000,00	14.898.800,00	99,33	14.986.332,00
172	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga		-	-	-	-
173	Belanja Modal Hewan		-	-	-	-
174	Belanja Modal Biota Perairan		-	-	-	-
175	Belanja Modal Tanaman		-	-	-	-
176	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya		-	-	-	-
177	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi		-	-	-	-
178	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		-	-	-	-
179	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS		-	-	-	-
180	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP		-	-	-	-
181	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD		-	-	-	-
182	Belanja Modal Aset Lainnya		-	-	-	-
183	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud		-	-	-	-
184	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD		-	-	-	-
185	Jumlah Belanja Modal		1.177.600.000,00	1.140.913.800,00	96,88	2.057.391.482,00
186						
187	BELANJA TIDAK TERDUGA					
188	Belanja Tidak Terduga		-	-	-	-
189	Belanja Tidak Terduga		-	-	-	-
190	Jumlah Belanja Tidak Terduga		-	-	-	-
191						

192	BELANJA TRANSFER				
193	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-
194	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	-	-	-	-
195	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
196	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	-	-	-	-
197	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-
198	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-
199	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	-	-	-	-
200	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	-	-	-
201	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	-	-	-	-
202	Jumlah Belanja Transfer	-	-	-	-
203					
204	JUMLAH BELANJA DAERAH	65.413.487.000,00	63.181.626.208,00	96,50	71.584.261.409,00
205					
206	SURPLUS/DEFISIT	(43.333.487.000,00)	(40.571.380.329,00)	93,63	(47.255.792.669,00)
207					
208	PEMBIAYAAN DAERAH				
209	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
210	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-	-	-
211	Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	-	-
212	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	-	-	-	-
213	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-
214	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-
215	Penhematan Belanja	-	-	-	-
216	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan	-	-	-	-
217	Sisa Dana Akiat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana	-	-	-	-
218	Sisa Belanja Lainnya	-	-	-	-
219	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	-	-	-	-
220	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
221	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
222	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
223	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Disahkan pada Badan Usaha Milik Negara	-	-	-	-
224	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Disahkan pada Badan Usaha Milik Daerah	-	-	-	-
225	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
226	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-
227	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain	-	-	-	-
228	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	-	-	-
229	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	-	-	-	-
230	Pinjaman Daerah dari Masyarakat	-	-	-	-
231	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
232	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	-
233	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah	-	-	-	-
234	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	-	-	-	-
235	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN	-	-	-	-
236	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	-	-	-	-
237	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	-	-	-	-
238	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD	-	-	-	-
239	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
240	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD	-	-	-	-
241	Divestasi BLUD	-	-	-	-
242	Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah	-	-	-	-
243	Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah Dalam Kondisi Darurat	-	-	-	-
244	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-
245					
246	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
247	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
248	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
249	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-
250	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	-	-	-	-
251	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	-	-	-	-
252	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-
253	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-
254	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	-	-	-	-
255	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	-	-	-
256	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	-	-	-	-
257	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat	-	-	-	-
258	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
259	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	-
260	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
261	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD	-	-	-	-
262	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN	-	-	-	-
263	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi	-	-	-	-
264	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	-	-	-	-
265	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada BLUD	-	-	-	-
266	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
267	Pinjaman BLUD	-	-	-	-
268	Investasi BLUD	-	-	-	-
269	Pembentukan Dana Abadi Daerah	-	-	-	-
270	Pembentukan Pokok Dana Abadi Daerah	-	-	-	-
271	Pembentukan atas Penambahan Pokok Dana Abadi Daerah	-	-	-	-
272	Pembentukan atas Pengembalian Pokok Dana Abadi Daerah Akibat Kondisi Darurat	-	-	-	-
273	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
274					
275	PEMBIAYAAN NETTO	-	-	-	-
276					
277	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(43.333.487.000,00)	(40.571.380.329,00)	93,63	(47.255.792.669,00)

* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

KEPALA BADAN PENGEMBAANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
NERACA KOMPARATIF
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Per 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2024	2023
1	ASET			
2	ASET LANCAR			
3	Kas dan Setara Kas		-	-
4	Kas di Kas Daerah		-	-
5	Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
6	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
7	Kas di BLUD		-	-
8	Kas Dana BOS		-	-
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		-	-
10	Kas Lainnya		-	-
11	Setara Kas		-	-
12	Kas Dana Desa		-	-
13	Kas Dana BOSP		-	-
14	Kas Dana BOK Puskesmas		-	-
15	Investasi Jangka Pendek		-	-
16	Investasi dalam Saham		-	-
17	Investasi dalam Deposito		-	-
18	Investasi dalam SUN		-	-
19	Investasi dalam SBI		-	-
20	Investasi dalam SPN		-	-
21	Investasi Jangka Pendek BLUD		-	-
22	Piutang Pajak Daerah		-	-
23	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		-	-
24	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		-	-
25	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		-	-
26	Piutang Pajak Air Permukaan		-	-
27	Piutang Pajak Rokok		-	-
28	Piutang Pajak Alat Berat		-	-
29	Piutang Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		-	-
30	Piutang Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		-	-
31	Piutang Retribusi Daerah		-	-
32	Piutang Retribusi Jasa Umum		-	-
33	Piutang Retribusi Jasa Usaha		-	-
34	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu		-	-
35	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
36	Piutang Bagian Laba yang Dibaikikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)		-	-
37	Piutang Bagian Laba yang dibaikikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)		-	-
38	Piutang Bagian Laba yang Dibaikikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)		-	-
39	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		-	-
40	Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-
41	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD		-	-
42	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-
43	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah		-	-
44	Piutang Jasa Giro		-	-
45	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Berqulir		-	-
46	Piutang Pendapatan Bunga		-	-
47	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian		-	-
48	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk		-	-
49	Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai		-	-
50	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan		-	-
51	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah		-	-
52	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah		-	-
53	Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		-	-
54	Piutang Pendapatan dari Pengembalian		-	-
55	Piutang Pendapatan BLUD		-	-
56	Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD		-	-
57	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan		-	-
58	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Berqulir		-	-
59	Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		-	-
60	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		-	-
61	Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf		-	-
62	Piutang Pendapatan Hasil Pelaksanaan Peranjian/Kontrak		-	-
63	Piutang Pungutan bagi Wisatawan Asing		-	-
64	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah		-	-
65	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		-	-
66	Piutang Dana Perimbangan		-	-
67	Piutang Dana Insentif Daerah (DID)		-	-
68	Piutang Insentif Fiskal		-	-
69	Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
70	Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
71	Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)		-	-
72	Piutang Transfer Antar Daerah		-	-
73	Piutang Bagi Hasil		-	-
74	Piutang Bantuan Keuangan		-	-
75	Piutang Lainnya		-	-
76	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang		-	-
77	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang		-	-
78	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
79	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		-	-
80	Uang Muka		-	-
81	Penyisihan Piutang		-	-
82	Penyisihan Piutang Pendapatan		-	-
83	Penyisihan Piutang Lainnya		-	-
84	Beban Dibayar Dimuka		12.589.671,70	10.860.009,02
85	Beban Dibayar Dimuka		-	10.860.009,02
86	Beban Dibayar Dimuka-Sewa		-	-
87	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah		12.589.671,70	-
88	Persediaan		395.997.374,00	165.877.520,00
89	Barang Pakai Habis		395.997.374,00	165.877.520,00
90	Barang Tak Habis Pakai		-	-
91	Barang Bekas Dipakai		-	-
92			-	-
93	JUMLAH ASET LANCAR		408.587.045,70	176.737.529,02
94				

95	INVESTASI JANGKA PANJANG			
96	Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
97	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	-	-	-
98	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	-	-	-
99	Investasi dalam Obligasi	-	-	-
100	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-
101	Dana Bergulir	-	-	-
102	Investasi Jangka Panjang Permanen			
103	Penvertaan Modal	-	-	-
104	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
105	Investasi Dana Abadi Daerah	-	-	-
106				
107	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG			
108				
109	ASET TETAP			
110	Tanah	124.074.000.000,00		124.074.000.000,00
111	Tanah	124.074.000.000,00		124.074.000.000,00
112	Peralatan dan Mesin	41.809.017.490,00		38.288.031.012,00
113	Alat Besar	2.682.706.986,00		2.645.706.986,00
114	Alat Angkutan	3.936.829.838,00		3.428.029.838,00
115	Alat Benakel dan Alat Ukur	15.328.500,00		15.328.500,00
116	Alat Pertanian	15.800.000,00		15.800.000,00
117	Alat Kantor dan Rumah Tangga	22.891.010.665,00		21.060.291.570,00
118	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.209.355.291,00		4.028.549.198,00
119	Alat Kedokteran dan Kesehatan	249.576.000,00		249.576.000,00
120	Alat Laboratorium	606.705.050,00		527.297.600,00
121	Alat Persenjataan	551.077.358,00		-
122	Komputer	6.341.358.082,00		6.008.181.600,00
123	Alat Eksplorasi	-		-
124	Alat Pengeboran	-		-
125	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-		-
126	Alat Bantu Eksplorasi	-		-
127	Alat Keselamatan Kerja	-		-
128	Alat Peraga	-		-
129	Peralatan Proses/Produksi	-		-
130	Rambu-rambu	35.310.000,00		35.310.000,00
131	Peralatan Olahraga	273.959.720,00		273.959.720,00
132	Gedung dan Bangunan	59.242.943.633,00		59.242.943.633,00
133	Bangunan Gedung	57.531.473.483,00		57.531.473.483,00
134	Monumen	-		-
135	Bangunan Menara	-		-
136	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.711.470.150,00		1.711.470.150,00
137	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.354.362.050,00		3.354.362.050,00
138	Jalan dan Jembatan	2.302.885.500,00		2.302.885.500,00
139	Bangunan Air	-		-
140	Instalasi	855.544.550,00		855.544.550,00
141	Jaringan	195.932.000,00		195.932.000,00
142	Aset Tetap Lainnya	723.985.932,00		709.087.132,00
143	Bahan Perpustakaan	516.726.482,00		501.827.682,00
144	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	164.956.250,00		164.956.250,00
145	Hewan	-		-
146	Biota Perairan	-		-
147	Tanaman	42.303.200,00		42.303.200,00
148	Barang Koleksi Non Budaya	-		-
149	Aset Tetap Dalam Renovasi	-		-
150	Konstruksi dalam Pengerjaan			
151	Konstruksi dalam Pengerjaan	-		-
152	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	-		-
153	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin	-		-
154	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	-		-
155	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-		-
156	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya	-		-
157	Akumulasi Penyusutan	(74.306.001.007,15)		(70.605.352.780,83)
158	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(36.335.112.403,78)		(33.790.364.578,38)
159	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(35.317.422.711,70)		(34.188.708.841,20)
160	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(2.653.465.891,67)		(2.626.279.361,25)
161	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-		-
162	Aset Konsesi Jasa			
163	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi	-		-
164	Aset Konsesi Jasa yang Bersumber dari Milik Mitra	-		-
165	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Konsesi Jasa yang Bersumber dari Milik Mitra	-		-
166	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa			
167	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi	-		-
168	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Bersumber dari Milik Mitra	-		-
169				
170	JUMLAH ASET TETAP	154.898.308.097,85		155.063.071.046,17
171				
172	DANA CADANGAN			
173	Dana Cadangan			
174	Dana Cadangan	-		-
175				
176	JUMLAH DANA CADANGAN			
177				
178	ASET LAINNYA			
179	Taqihan Jangka Panjang			
180	Taqihan Penjualan Angsuran	-		-
181	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-		-
182	Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
183	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-		-
184	Aset Tak Berwujud	640.561.687,00		614.504.437,00
185	Aset Tak Berwujud	640.561.687,00		614.504.437,00
186	Aset Konsesi Jasa Aset Tidak Berwujud	-		-
187	Aset Lain-lain	709.390.000,00		4.447.572.305,00
188	Aset Lain-Lain	709.390.000,00		4.447.572.305,00
189	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(621.018.749,50)		(614.504.437,00)
190	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(621.018.749,50)		(614.504.437,00)
191	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(424.785.200,00)		(4.162.967.505,00)
192	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(424.785.200,00)		(4.162.967.505,00)
193	Kas yang Dibatasi Penggunaannya			
194	Uang Jaminan dan/atau Titipan Uang Muka	-		-
195	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)			
196	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-		-
197				
198	JUMLAH ASET LAINNYA	304.147.737,50		284.604.800,00
199				

200	PROPERTI INVESTASI			
201	Properti Investasi Tanah		-	-
202	Properti Investasi Tanah			
203	Properti Investasi Gedung dan Bangunan		-	-
204	Properti Investasi Gedung dan Bangunan			
205	Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi		-	-
206	Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi Gedung dan Bangunan			
207	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		-	-
208	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan			
209				
210	JUMLAH PROPERTI INVESTASI		-	-
211				
212	JUMLAH ASET		155.611.042.881,05	155.524.413.375,19
213				
214	KEWAJIBAN			
215	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
216	Utang Perhitungan Pihak Ketiga		-	-
217	Utang Taspen		-	-
218	Utang Iuran Jaminan Kesehatan		-	-
219	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		-	-
220	Utang Iuran Jaminan Kematian		-	-
221	Utang PPh Pusat		-	-
222	Utang PPN Pusat		-	-
223	Utang Taperum		-	-
224	Utang Iuran Wajib Pegawai		-	-
225	Utang Pihak Ketiga Lainnya		-	-
226	Utang Bunga		-	-
227	Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat		-	-
228	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain		-	-
229	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
230	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
231	Utang Bunga kepada Masyarakat		-	-
232	Utang Bunga melalui BLUD		-	-
233	Utang Pinjaman Jangka Pendek		-	-
234	Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah		-	-
235	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
236	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-
237	Utang Pinjaman BLUD		-	-
238	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-
239	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		-	-
240	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
241	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
242	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat		-	-
243	Bagian Lancar Utang Jangka Pendek melalui BLUD		-	-
244	Pendapatan Diterima Dimuka		-	-
245	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III		-	-
246	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III		-	-
247	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah		-	-
248	Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa		-	-
249	Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Daerah		-	-
250	Utang Belanja		-	-
251	Utang Belanja Pegawai		-	-
252	Utang Belanja Barang dan Jasa		-	-
253	Utang Belanja Bunga		-	-
254	Utang Belanja Subsidi		-	-
255	Utang Belanja Hibah		-	-
256	Utang Belanja Modal Tanah		-	-
257	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		-	-
258	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		-	-
259	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-	-
260	Utang Belanja Aset Tetap Lainnya		-	-
261	Utang Belanja Tidak Terduka		-	-
262	Utang Belanja Bagi Hasil		-	-
263	Utang Belanja Bantuan Keuangan		-	-
264	Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud		-	-
265	Utang Belanja Modal Aset Lainnya BLUD		-	-
266	Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
267	Utang Kelebihan Pembayaran PAD		-	-
268	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		-	-
269	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		-	-
270	Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-
271				
272	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		-	-
273				
274	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
275	Utang kepada Pemerintah Pusat		-	-
276	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri		-	-
277	Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri		-	-
278	Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-
279	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
280	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN		-	-
281	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD		-	-
282	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta		-	-
283	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-
284	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN		-	-
285	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD		-	-
286	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta		-	-
287	Utang kepada Masyarakat		-	-
288	Obligasi		-	-
289	Kewajiban Konsesi Jasa		-	-
290	Kewajiban Konsesi Jasa		-	-
291				
292	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		-	-
293				
294	JUMLAH KEWAJIBAN		-	-

295				
296	EKUITAS			
297	EKUITAS		115.039.662.552,05	108.268.620.706,19
298	Ekuitas		155.524.413.375,19	156.091.663.528,51
299	Surplus/Defisit-LO		(40.484.750.823,14)	(47.823.042.822,32)
300	Ekuitas SAL		-	-
301	Estimasi Pendapatan		-	-
302	Estimasi Penerimaan Pembiayaan		-	-
303	Aprooriasi Belanja		-	-
304	Aprooriasi Peneluaran Pembiayaan		-	-
305	Estimasi Perubahan SAL		-	-
306	Surplus/Defisit-LRA		-	-
307	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		40.571.380.329,00	47.255.792.669,00
308	RK PPKD		40.571.380.329,00	47.255.792.669,00
309				
310	JUMLAH EKUITAS		155.611.042.881,05	155.524.413.375,19
311				
312	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		155.611.042.881,05	155.524.413.375,19

KEPALA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL
Per 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2024	2023	Kenalkan/(Penurunan)	%
1	PENDAPATAN - LO					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO					
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO		-	-	-	-
4	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO		-	-	-	-
5	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO		-	-	-	-
6	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) - LO		-	-	-	-
7	Pajak Air Permukaan - LO		-	-	-	-
8	Pajak Rokok - LO		-	-	-	-
9	Retribusi Daerah - LO		2.612.469.000,00	3.173.996.400,00	(561.527.400,00)	(17,69)
10	Retribusi Jasa Umum - LO		-	-	-	-
11	Retribusi Jasa Usaha - LO		2.612.469.000,00	3.173.996.400,00	(561.527.400,00)	(17,69)
12	Retribusi Perizinan Tertentu - LO		-	-	-	-
13	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO		-	-	-	-
14	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN - LO		-	-	-	-
15	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO		-	-	-	-
16	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO		-	-	-	-
17	Lain-Lain PAD yang Sah - LO		19.997.776.879,00	21.154.472.340,00	(1.156.695.461,00)	(5,47)
18	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO		-	-	-	#DIV/0!
19	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan - LO		-	-	-	-
20	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO		-	-	-	-
21	Hasil Kerja Sama Daerah - LO		-	-	-	-
22	Jasa Giro - LO		-	-	-	-
23	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO		-	-	-	-
24	Pendapatan Bunga - LO		-	-	-	-
25	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO		-	-	-	-
26	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO		19.997.776.879,00	21.154.472.340,00	(1.156.695.461,00)	(5,47)
27	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing - LO		-	-	-	-
28	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO		-	-	-	-
29	Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO		-	-	-	-
30	Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO		-	-	-	-
31	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO		-	-	-	-
32	Pendapatan dari Pengembalian - LO		-	-	-	-
33	Pendapatan BLUD - LO		-	-	-	-
34	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan - LO		-	-	-	-
35	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) - LO		-	-	-	-
36	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO		-	-	-	-
37	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) - LO		-	-	-	-
38	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO		-	-	-	-
39	Pendapatan Zakat - LO		-	-	-	-
40	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO		-	-	-	-
41	Pendapatan Konsesi Jasa		-	-	-	-
42	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO		22.610.245.879,00	24.328.468.740,00	(1.718.222.861,00)	(7,06)
43						
44	PENDAPATAN TRANSFER - LO					
45	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO		-	-	-	-
46	Dana Perimbangan- LO		-	-	-	-
47	Dana Insentif Daerah (DID)- LO		-	-	-	-
48	Insentif Fiska-LO		-	-	-	-
49	Pendapatan Transfer Antar Daerah- LO		-	-	-	-
50	Pendapatan Bagi Hasil- LO		-	-	-	-
51	Bantuan Keuangan- LO		-	-	-	-
52	Jumlah Pendapatan Transfer - LO		-	-	-	-
53						
54	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO					
55	Pendapatan Hibah- LO		1.390.125.120,30	-	1.390.125.120,30	-
56	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat- LO		1.390.125.120,30	-	1.390.125.120,30	-
57	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya- LO		-	-	-	-
58	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri- LO		-	-	-	-
59	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri- LO		-	-	-	-
60	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis- LO		-	-	-	-
61	Dana Darurat- LO		-	-	-	-
62	Dana Darurat- LO		-	-	-	-
63	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- LO		-	-	-	-
64	Lain-lain Pendapatan- LO		-	-	-	-
65	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO		-	-	-	-
66	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LO		1.390.125.120,30	-	1.390.125.120,30	-
67						
68	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH- LO		24.000.370.999,30	24.328.468.740,00	(328.097.740,70)	(1,35)
69						
70	BEBAN					
71	BEBAN OPERASIONAL					
72	Beban Pegawai		25.936.685.521,00	26.902.464.924,00	(965.779.403,00)	(3,59)
73	Beban Gaji dan Tunjangan ASN		11.939.500.263,00	12.561.034.695,00	(621.534.432,00)	(4,95)
74	Beban Tambahan Penghasilan ASN		13.566.705.258,00	13.896.507.729,00	(329.802.471,00)	(2,37)
75	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		430.480.000,00	444.922.500,00	(14.442.500,00)	(3,25)
76	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD		-	-	-	-
77	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		-	-	-	-
78	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH		-	-	-	-
79	Beban Gaji dan Tunjangan MRP		-	-	-	-
80	Beban Pegawai BOS		-	-	-	-
81	Beban Pegawai BOSP		-	-	-	-
82	Beban Pegawai BLUD		-	-	-	-
83	Beban Barang dan Jasa		35.846.120.120,32	42.561.352.819,54	(6.715.232.699,22)	(15,78)
84	Beban Barang		6.001.602.656,00	8.863.836.251,00	(2.862.233.595,00)	(32,29)
85	Beban Jasa		16.791.741.781,32	21.526.604.102,54	(4.734.862.321,22)	(22,00)
86	Beban Pemeliharaan		2.228.908.394,00	3.814.125.683,00	(1.585.217.289,00)	(41,56)
87	Beban Perjalanan Dinas		10.819.367.289,00	8.356.786.783,00	2.462.580.506,00	29,47
88	Beban Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
89	Beban Penunjang Otonomi Khusus		-	-	-	-
90	Beban Barang dan Jasa BOS		-	-	-	-
91	Beban Barang dan Jasa BOSP		-	-	-	-
92	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas		-	-	-	-
93	Beban Barang dan Jasa BLUD		-	-	-	-
94	Beban Bunga		-	-	-	-
95	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	-
96	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain		-	-	-	-
97	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	-	-
98	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	-	-
99	Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)		-	-	-	-
100	Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD		-	-	-	-
101	Beban Subsidi		-	-	-	-
102	Beban Subsidi kepada BUMN		-	-	-	-
103	Beban Subsidi kepada BUMD		-	-	-	-
104	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta		-	-	-	-
105	Beban Subsidi kepada Koperasi		-	-	-	-
106	Beban Hibah		-	-	-	-
107	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	-
108	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
109	Beban Hibah kepada BUMN		-	-	-	-
110	Beban Hibah kepada BUMD		-	-	-	-
111	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		-	-	-	-
112	Beban Hibah Dana BOS		-	-	-	-
113	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		-	-	-	-
114	Beban Hibah Dana BOSP		-	-	-	-
115	Beban Bantuan Sosial		-	-	-	-
116	Beban Bantuan Sosial kepada Individu		-	-	-	-
117	Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga		-	-	-	-
118	Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat		-	-	-	-
119	Beban Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)		-	-	-	-

120	Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	-
121	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	-	-	-	-
122	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	-	-	-	-
123	Beban Penyisihan Piutang hasil Pengelolaan Kakyasan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
124	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-
125	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	-
126	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	-	-	-	-
127	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-	-
128	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.702.316.181,12	2.678.431.688,92	23.884.492,20	0,89
129	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.538.901.467,70	1.477.448.951,34	62.452.516,36	4,23
130	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.128.713.870,50	1.083.335.495,36	45.378.375,14	4,19
131	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	27.166.530,42	50.611.408,89	(23.424.878,47)	(46,28)
132	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
133	Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-
134	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	6.514.312,50	67.035.833,33	(60.521.520,83)	(90,28)
135	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	-	-	-	-
136	Beban Penyusutan Aset Konsepsi Jasa	-	-	-	-
137	Beban Penyusutan Properti Investasi	-	-	-	-
138	Jumlah Beban Operasional	64.485.121.822,44	72.142.249.432,46	(7.657.127.610,02)	(10,61)
139					
140					
141	BEBAN TRANSFER				
142	Beban Bagi Hasil	-	-	-	-
143	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	-	-	-	-
144	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah/Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	-	-	-	-
145	Beban Bantuan Keuangan	-	-	-	-
146	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	-	-	-	-
147	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-
148	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-
149	Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	-	-	-	-
150	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	-	-	-
151	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	-	-	-	-
152	Jumlah Beban Transfer	-	-	-	-
153					
154	JUMLAH BEBAN	64.485.121.822,44	72.142.249.432,46	(7.657.127.610,02)	(10,61)
155					
156	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL	(40.484.750.823,14)	(47.813.780.892,46)	7.329.029.809,32	(15,33)
157					
158	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
159	SURPLUS NON OPERASIONAL				
160	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	-	-	-	-
161	Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	-	-	-
162	Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	-	-	-
163	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO	-	-	-	-
164	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-	-
165	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO	-	-	-	-
166	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO	-	-	-	-
167	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO	-	-	-	-
168	Surplus Penyelesaian Premium (Diskont) Obligasi-LO	-	-	-	-
169	Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	-	-	-	-
170	Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	-	-	-	-
171	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO	-	-	-	-
172	Surplus Non Operasional-Kenaikan Nilai Investasi	-	-	-	-
173	Jumlah Surplus Non Operasional	-	-	-	-
174					
175	DEFISIT NON OPERASIONAL				
176	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	-	-	-	-
177	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	-	-	-
178	Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	-	-	-
179	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO	-	-	-	-
180	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	-	-	-
181	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-	-
182	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO	-	-	-	-
183	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO	-	-	-	-
184	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO	-	-	-	-
185	Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	-	9.262.129,86	(9.262.129,86)	(100,00)
186	Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	-	9.262.129,86	(9.262.129,86)	(100,00)
187	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO	-	-	-	-
188	Defisit Non Operasional-Penurunan Nilai Investasi	-	-	-	-
189	Jumlah Defisit Non Operasional	-	9.262.129,86	(9.262.129,86)	(100,00)
190					
191	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	(9.262.129,86)	9.262.129,86	(100,00)
192					
193	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(40.484.750.823,14)	(47.823.042.822,32)	7.338.291.939,18	(15,34)
194					
195	POS LUAR BIASA				
196	BEBAN LUAR BIASA				
197	Beban Luar Biasa	-	-	-	-
198	Beban Tidak Terduga	-	-	-	-
199	Beban Luar Biasa Lainnya	-	-	-	-
200	Jumlah Beban Luar Biasa	-	-	-	-
201					
202	JUMLAH POS LUAR BIASA	-	-	-	-
203					
204	SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL	(40.484.750.823,14)	(47.823.042.822,32)	7.338.291.939,18	(15,34)

* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
Periode Tanggal Laporan : 01 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024

NO	URAIAN	2024	2023
1	Ekuitas Awal	155.524.413.375,19	153.658.346.312,47
2	Surplus/Defisit-LO	(40.484.750.823,14)	(47.823.042.822,32)
3	RK PPKD	40.571.380.329,00	47.255.792.669,00
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	-	2.433.317.216,04
4.1	Koreksi/Penyesuaian Kas	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas PPKD		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Pengeluaran		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Penerimaan		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas BLUD		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Setara kas		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Sekolah		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Pengeluaran		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Penerimaan		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas BLUD		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Sekolah		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Setara kas		
4.2	Koreksi/Penyesuaian Piutang	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Pajak		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Retribusi		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Pajak		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Retribusi		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Lainnya		
4.3	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Piutang		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Piutang		
4.4	Koreksi/Penyesuaian Persediaan	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Persediaan Tahun Sebelumnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Persediaan dari Distribusi Antar SKPD		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Persediaan Tahun Sebelumnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Persediaan dari Distribusi Antar SKPD		
4.5	Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Investasi Non Permanen		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang investasi Non Permanen		
4.6	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Investasi Non Permanen		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Investasi Non Permanen		
4.7	Koreksi/Penyesuaian Investasi Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Investasi Permanen		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang investasi Permanen		
4.8	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	-	2.484.730.098,00
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Belanja Tidak Terduga		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD		2.484.730.098,00
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Aset Ekstrakomtable		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Belanja Tidak Terduga		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penilaian Aset Tetap		
4.9	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	-	(51.412.881,96)
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan		(51.412.881,96)
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan		
4.10	Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tak Berwujud		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Koreksi Aset Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Mutasi dari Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Pemanfaatan		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tak Berwujud		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Mutasi ke Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Koreksi Aset Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Pemanfaatan		

4.11	Koreksi/Penyesuaian Amortisasi		-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Amortisasi			
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Amortisasi			
4.12	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya		-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan Aset Lainnya			
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan Aset Lainnya			
4.13	Koreksi/Penyesuaian Utang		-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Pendapatan Diterima Dimuka			
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Pendapatan Diterima Dimuka			
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Utang Belanja Pegawai			
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Utang Belanja Pegawai			
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Utang Belanja Barang dan Jasa			
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Utang Belanja Barang dan Jasa			
4.14	Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain		-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Lain-Lain			
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Lain-Lain			
5	Ekuitas Akhir		155.611.042.881,05	155.524.413.375,19

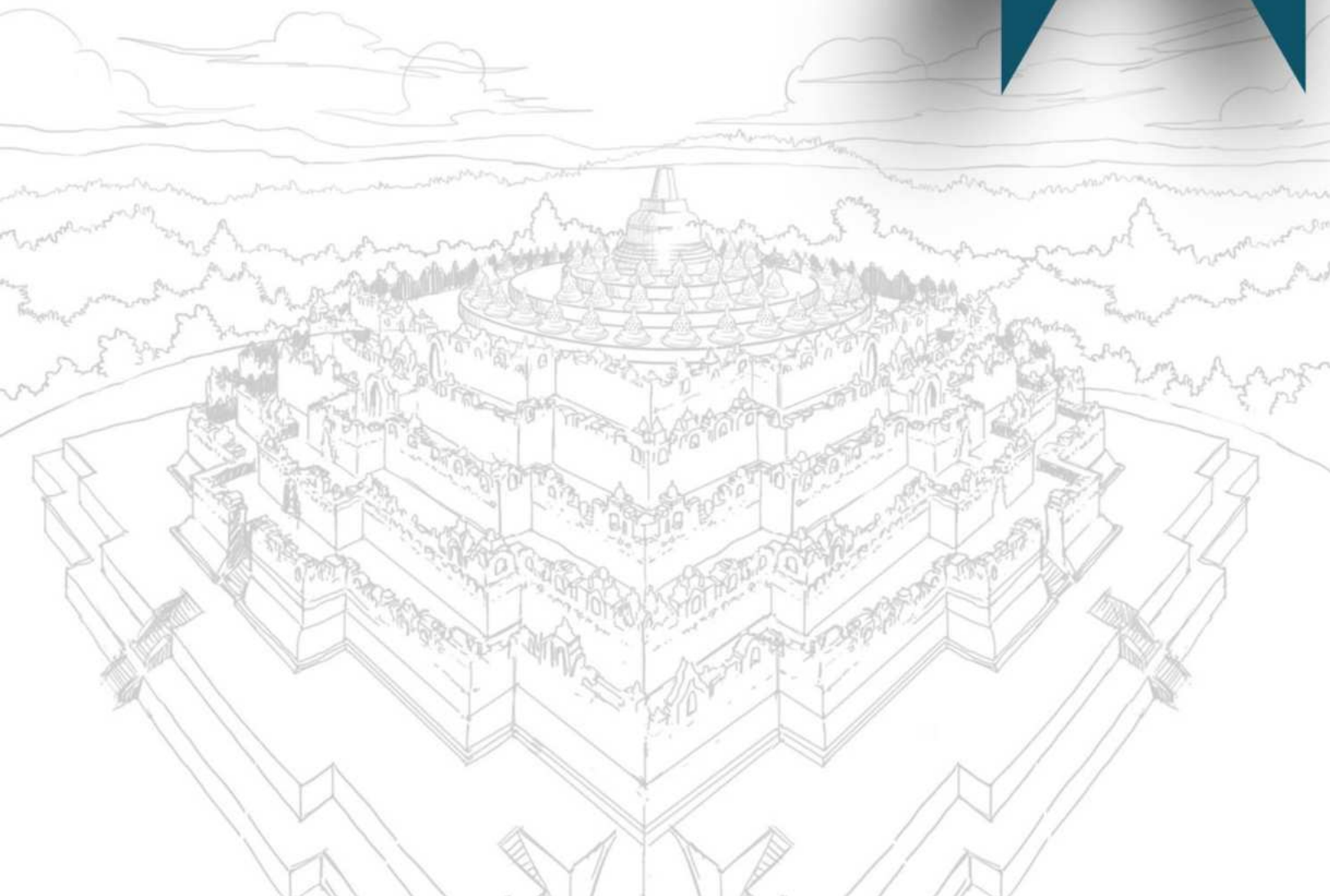
Ekuitas Neraca	155.611.042.881,05	155.524.413.375,19
Difference	-	-

KEPALA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH



* **Dr. Saetimin, S.Pd, M.Eng**
Pembina Utama Madya
NIP. 19721206199412 1 001

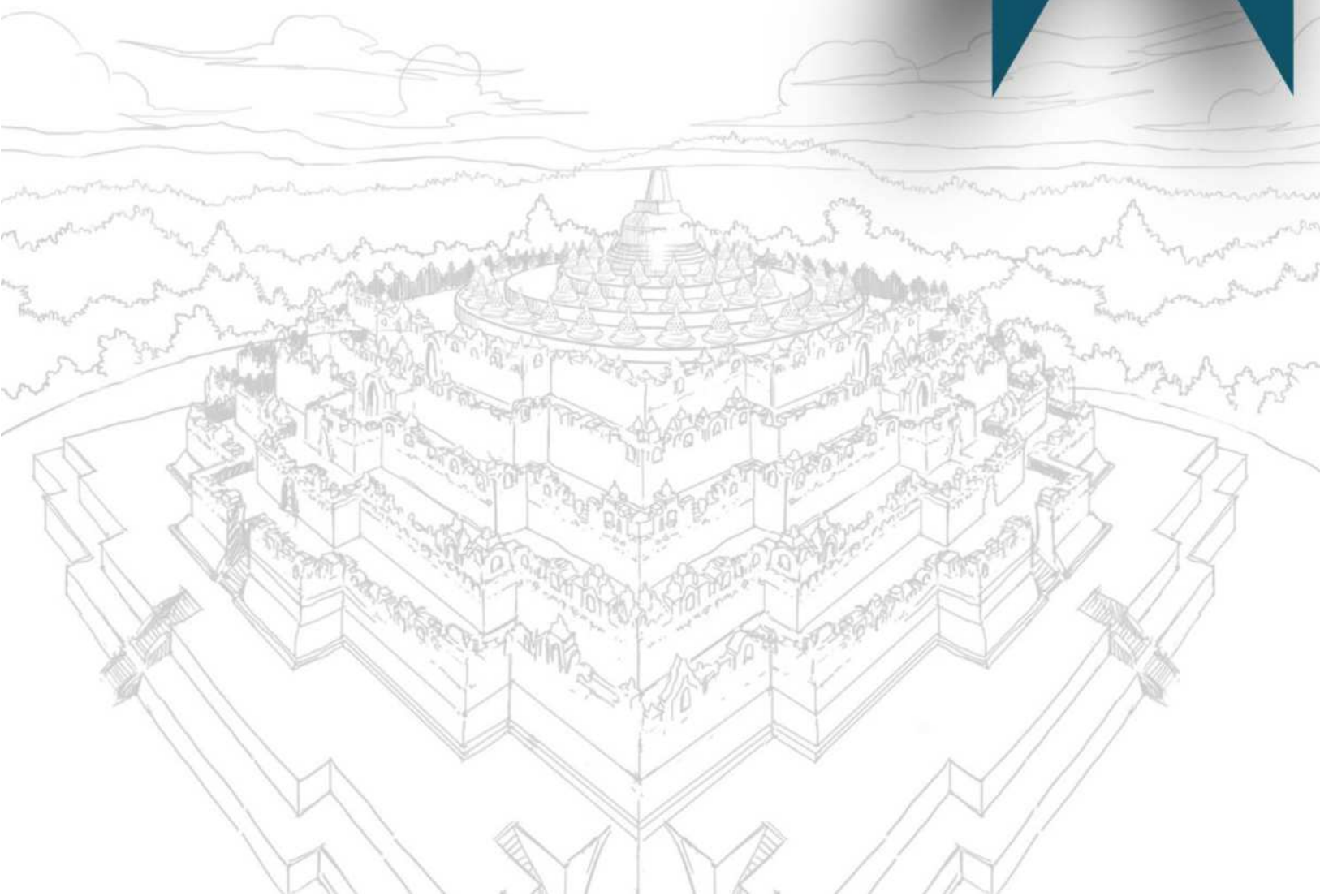
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN





BAB 1

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut BPSDMD, dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD). BPSDMD selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta selaku entitas akuntansi melakukan proses penyusunan laporan keuangan secara sistematis dan terstruktur selama satu periode pelaporan sebagai bentuk kewajiban proses konsolidasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Tengah.

Laporan Keuangan BPSDMD menyajikan transaksi pendapatan, belanja, aset, hutang dan ekuitas melalui proses akuntansi yang meliputi pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan informasi keuangan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran, arus kas, hasil operasi, perubahan ekuitas, kinerja, serta akuntabilitas penggunaan anggaran yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan pengalokasian sumber daya.

BPSDMD memiliki tanggung jawab menyampaikan laporan mengenai berbagai upaya yang telah dilaksanakan serta hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan:

1. Akuntabilitas

Memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang diamanahkan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala.

2. Manajemen

Membantu pengguna dalam menilai pelaksanaan kegiatan selama periode tertentu, sehingga mendukung fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian terhadap seluruh aset, kewajiban, serta ekuitas dana.

3. Transparansi

Menyajikan informasi keuangan secara transparan dan jujur kepada masyarakat dengan mempertimbangkan hak masyarakat untuk mengetahui secara lengkap dan terbuka tentang pertanggungjawaban BPSDMD dalam mengelola sumber daya serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational equity)

Membantu para pengguna memahami kecukupan penerimaan pemerintah selama periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang telah dialokasikan, serta menilai apakah sebagian beban pengeluaran tersebut akan menjadi tanggungan generasi mendatang.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja BPSDMD, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Pelaporan keuangan BPSDMD bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan pembuatan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
2. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
3. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
4. menyediakan informasi mengenai cara entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan keuangan BPSDMD terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan ikhtisarr sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi meliputi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA). Informasi tersebut menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode pelaporan. Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut ini: kas dan setara kas, investasi jangka panjang, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, ekuitas dana.

3. Laporan Operasional (LO)

LO menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyajikan menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas yang terjadi pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE sekurang-kurangnya memuat ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK menjelaskan daftar rincian dan/atau analisis laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE. CaLK juga penyajian informasi tentang kebijakan akuntansi serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian kewajaran laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya sesuai SAPD. CaLK sekurang-kurangnya menyajikan:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/ keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN/ Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pelaporan keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan pemerintah Daerah antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
16. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Tanggal 31 Oktober 2024 Nomor 900/0008288 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka sistematika isi catatan atas Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab 2 Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- 2.1 Ekonomi Makro

2.2 Kebijakan Keuangan

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab 4 Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP pada SKPD

Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
- 5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 5.2.1. Aset
 - 5.2.2. Kewajiban
 - 5.2.3. Ekuitas Dana
- 5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
 - 5.3.1. Pendapatan
 - 5.3.2. Beban
 - 5.3.3. Surplus Defisit Non Operasional
- 5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab 6 Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

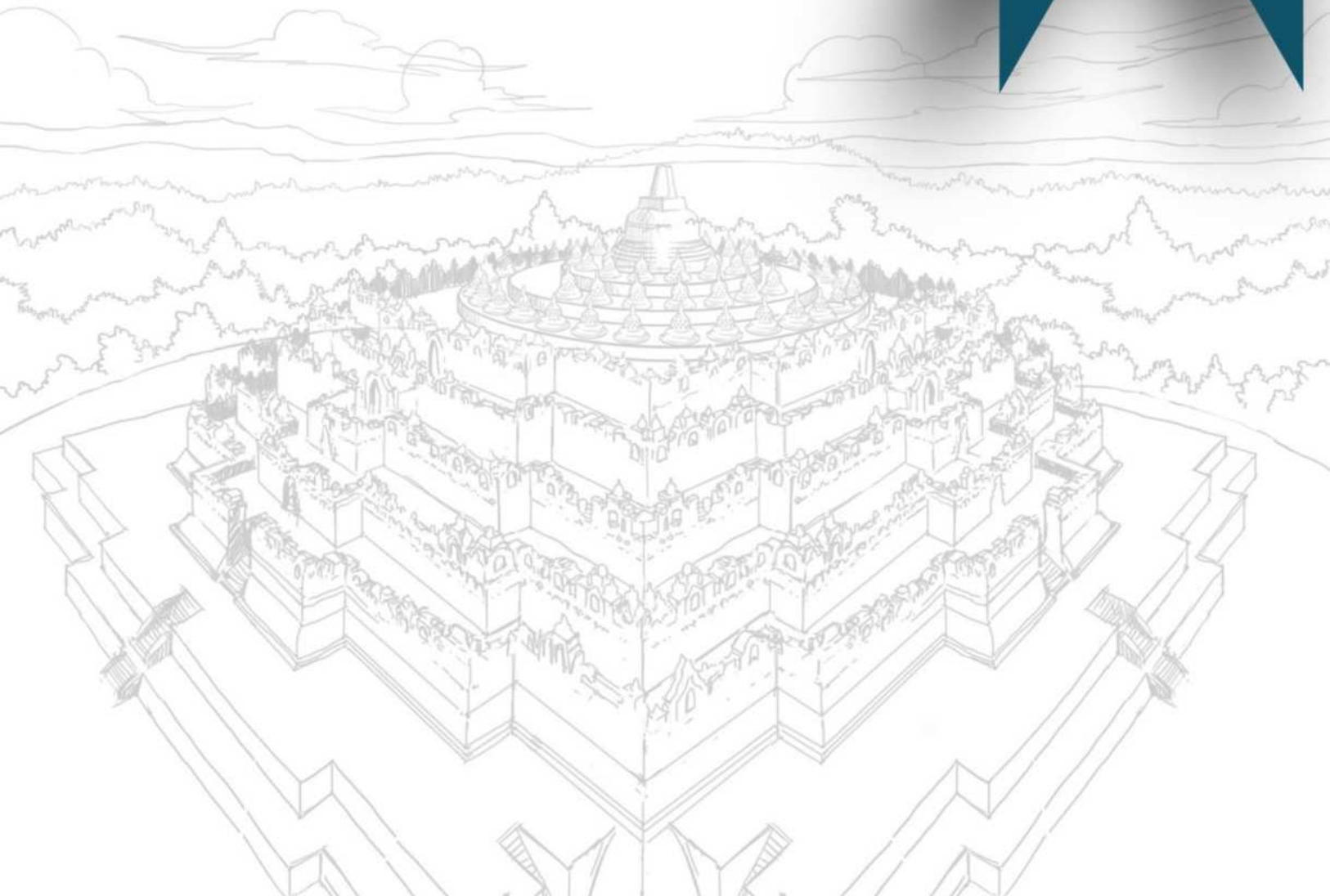
Bab 7 Penutup

Lampiran Tambahan



BAB 2

EKONOMI MAKRO & KEBIJAKAN KEUANGAN

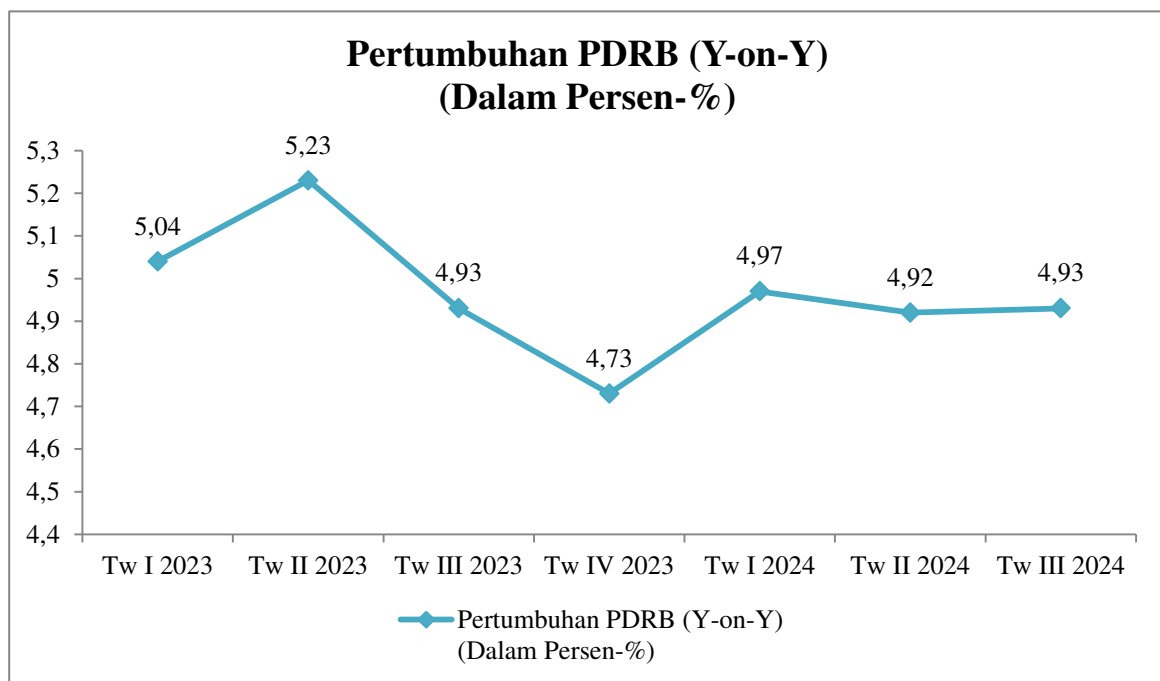


BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS), secara *year on year* (yoy) pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada triwulan III 2024 tumbuh sebesar 4,93%, sedikit menguat dari pertumbuhan pada triwulan II sebesar 4,92%. Perekonomian Jawa Tengah menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan positif sepanjang tahun 2024. Secara regional, Jawa Tengah menjadi penyumbang perekonomian terbesar keempat di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 14,50%, sedangkan secara nasional, Jawa Tengah berkontribusi sebesar 8,24% terhadap perekonomian nasional.

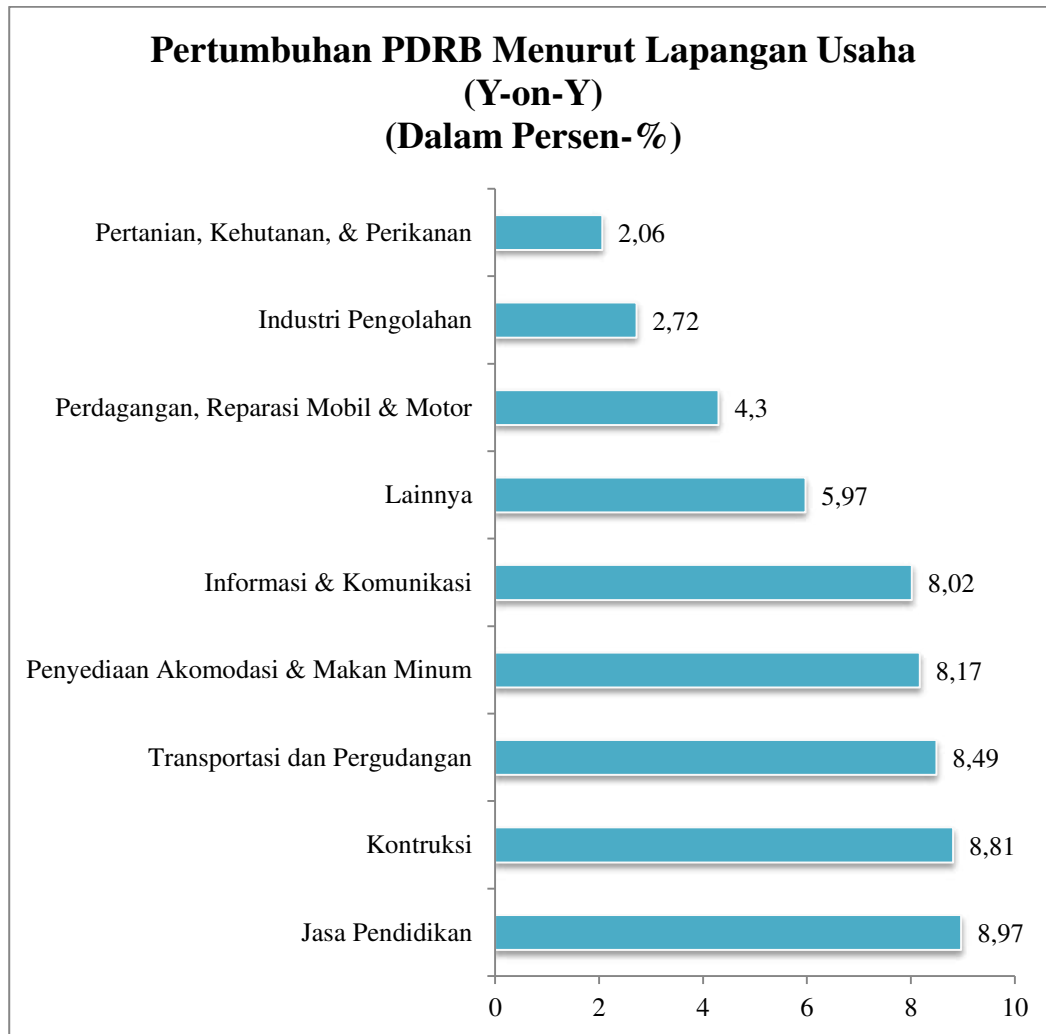


Sumber: BPS Jateng, 2025

Grafik 2. 1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulan I 2024 – Triwulan III 2024

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga memiliki andil terhadap pertumbuhan PDRB triwulan I 2024 sebesar 3,09% dan tumbuh sebesar 5,14% (yoy). Investasi juga berperan signifikan dengan pertumbuhan sebesar 7,53% (yoy), didorong oleh percepatan pembangunan proyek strategis nasional dan proyek swasta di Jawa Tengah. Sedangkan dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan dan perdagangan menjadi kontributor utama dalam struktur pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, dengan kontribusi sebesar 33,31%. Selain itu, sektor administrasi pemerintahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,23% terutama disebabkan oleh belanja pegawai yang mengalami pergeseran sehubungan penyaluran gaji ke-13 pada triwulan II 2024, diikuti oleh sektor pendidikan yang tumbuh 8,97%, dan sektor konstruksi yang tumbuh 8,81%. Lapangan usaha industri pengolahan tumbuh 6,18% (yoy),

sementara perdagangan tumbuh 3,88% (yoy), didorong oleh perbaikan konsumsi domestik seiring momentum Pemilu, Ramadhan, dan persiapan Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Fitri. Sementara itu, pertumbuhan ekspor triwulan III sebesar 13,22% (yoy) bersumber dari kinerja ekspor sektor industri pengolahan, terutama di sektor tekstil, produk kayu, dan makanan olahan, yang memberikan kontribusi signifikan.



Sumber: BPS Jateng, 2025

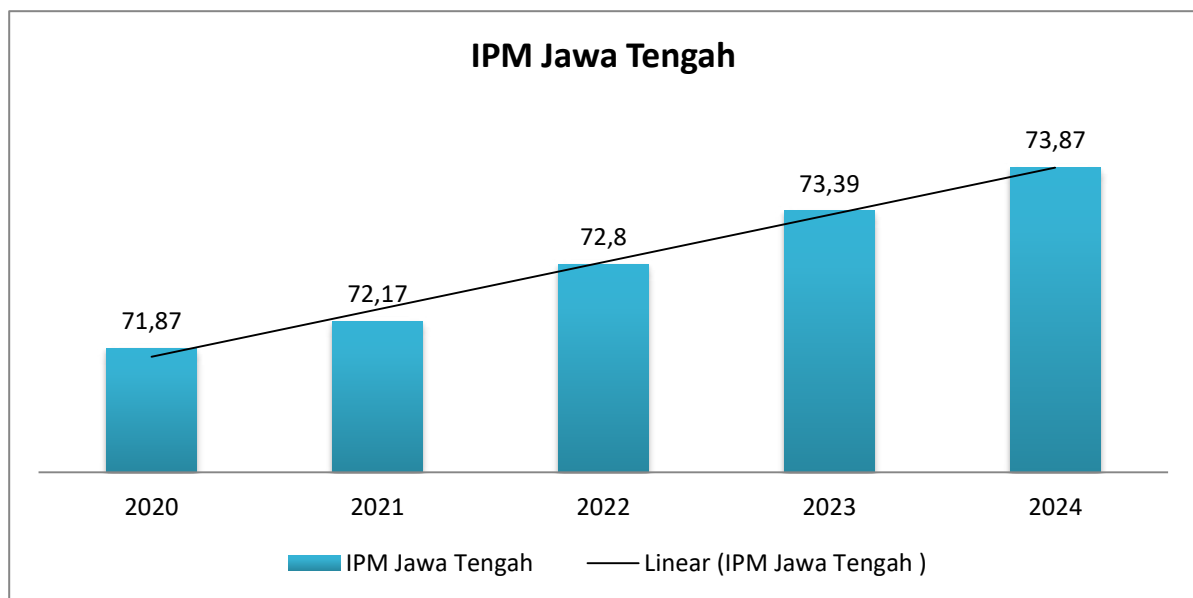
Grafik 2. 2 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) Menurut Lapangan Usaha Triwulan III 2024

Besar perekonomian Jawa Tengah pada Triwulan III-2024 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp459.046,35 miliar, sedangkan untuk atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp291.550,89 miliar. Laju pertumbuhan (yoy) PDRB pada triwulanan menurut kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tertinggi dicapai oleh Kota Semarang sebesar 6,13%, diikuti Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan masing-masing sebesar 6,12% dan 5,81%. Sedangkan laju pertumbuhan (yoy) terendah terjadi pada Kabupaten Kudus, lalu diikuti Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Pemalang yang masing-masing sebesar 0,78%; 3,05%; dan 3,14%.

Kondisi ekonomi makro lain yang perlu diperhatikan yaitu inflasi, stabilitas keuangan, dan perkembangan indikator sistem pembayaran di Jawa Tengah. Inflasi Provinsi Jawa Tengah Tahun

2024 pada Desember 2024 *month-on-month* (mom) mengalami peningkatan sebesar 0,57% dibandingkan November 2024 (mom) yang sebesar 0,26%, peningkatan mencerminkan adanya lonjakan permintaan barang konsumsi menjelang akhir tahun. Secara keseluruhan, inflasi di Jawa Tengah pada tahun 2024 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada akhir tahun. Meskipun demikian, tingkat inflasi tahunan masih berada dalam rentang yang terkendali, sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang direpresentasikan dalam 3 dimensi yaitu pendidikan, kesehatan dan kehidupan layak dengan menggunakan pengukuran Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebagai dimensi pendidikan, Usia Harapan Hidup (UHH) sebagai dimensi kesehatan serta Pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebagai dimensi kehidupan layak. Capaian IPM Jawa Tengah mengalami peningkatan selama kurun waktu 2020 hingga 2024, namun nilai IPM dan laju pertumbuhannya masih berada di bawah capaian nasional. Pada tahun 2024, RLS dan HLS di Jawa Tengah masing-masing sebesar 8,02 tahun dan 12,86 tahun. Untuk nilai UHH saat lahir sebesar 74,91 tahun, sedangkan pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan yaitu sebesar Rp12.276.000,00. Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 mengalami laju pertumbuhan IPM sebesar 0,65%.



Sumber: BPS Jateng, 2025

Grafik 2. 3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

2.2. Kebijakan Keuangan

Tahun 2024 menjadi tahun awal masa transisi perencanaan pembangunan daerah setelah berakhirnya RPJMD Tahun 2018-2024. Untuk mengarahkan pembangunan daerah Jawa Tengah di tahun 2024, maka kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 diarahkan pada Peningkatan

Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas. Prioritas pembangunan pada tahun 2024 ditujukan untuk:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaiki tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah berpedoman dan mempunyai tujuan yang selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah yaitu:

1. Menjadi Lembaga Pengembangan Kompetensi ASN, mewujudkan Birokrasi Berkelas Dunia melalui SDM Kompeten dan Professional dalam memberikan pelayanan *excellent* kepada masyarakat.
2. Menjadi *Problem Solving* Pembangunan di Jawa Tengah.

Kebijakan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah mencakup kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat, dengan tetap mempedomani kebijakan yang diamanatkan dalam RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 melalui perumusan *cascading* kinerja guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024-2026 yaitu mewujudkan “Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Lestari”.

2.2.1 Kebijakan Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Akan Dilaksanakan di SKPD

Dalam menghadapi isu kemiskinan, bonus demografi, dan daya saing ekonomi daerah, maka kebijakan pembangunan lima tahun ke depan akan lebih menempatkan manusia sebagai fokus pembangunan. Sumber daya manusia (SDM) tidak saja dipandang sebagai objek pembangunan, namun menempatkannya dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan. Pengembangan SDM merupakan salah satu elemen kunci dalam kebijakan pembangunan daerah, pengembangan SDM dilakukan melalui pemberdayaan (*empowering*), serta peningkatan kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensi yang dimiliki dan menumbuhkan kesadaran diri (*self hood*). Sumber daya manusia sebagai bagian dari masyarakat akan mampu memandang secara kritis situasi sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang melingkupinya. Dengan demikian diharapkan sumber daya manusia Jawa

Tengah akan menjadi sumber dinamika dan motor penggerak pembangunan dalam upaya dalam mewujudkan kemandirian, kemajuan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Rumusan strategi BPSDMD yang disusun harus bersifat operasional, yang dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan Perangkat Daerah (PD) yang menjadi tugas dan fungsi PD. Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi PD.

Sesuai dengan Dokumen Renstra BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024– 2026 yang telah disusun, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah mempunyai tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas pelayanan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah dan meningkatkan kompetensi ASN. Selaras dengan salah satu sasaran Jawa Tengah yaitu “terwujudnya tata kelola pemerintah yang dinamis”, sasaran yang ingin dicapai BPSDMD adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah dengan indikator Indeks Manajemen Resiko
3. Terpenuhinya Hak Pengembangan Kompetensi ASN dengan indikator presentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya melalui Pengembangan Kompetensi
4. Terpenuhinya Kebutuhan Sertifikasi Kompetensi ASN dengan indikator prosentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan, BPSDMD harus merencanakan program maupun kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut. Periode Tahun 2024-2026 berisi rencana program, kegiatan dan target kinerja sesuai dengan cascading periode akhir RPJPD Jawa Tengah Tahun 2005-2025. Kesepakatan Forum PD untuk Penyempurnaan Dokumen Renstra sudah diakomodir dalam program, kegiatan, sub kegiatan BPSDMD Prov. Jateng sebagai berikut:

1. *Core Value* Ber AKHLAK dimasukkan di Kurikulum Pelatihan
2. Penyusunan Standar Kompetensi Minimal dan Sistem Terintegrasi dengan berkolaborasi dengan Unsur 3 Pilar (BKD, Biro Orpeg, BPSDMD) dan OPD di Provinsi Jawa Tengah
3. Tantangan BPSDMD melihat peluang terkait Kebijakan Nasional adanya Penyederhanaan Jabatan Eselon 3 dan 4 yang beralih ke Pejabat Fungsional
4. BPSDMD agar memperhatikan dan bertanggungjawab dalam mengawal Kebijakan Jateng Corpu.

Meningat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, menjadikan BPSDMD sebagai *problem solving* bagi permasalahan pembangunan di Jawa Tengah dengan melibatkan beberapa *stakeholder*/pentahelik sebagai *community of practice* dan sebagai Lembaga Pengembangan Kompetensi ASN untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia melalui SDM yang kompeten dan profesional dalam memberikan pelayanan excellent kepada masyarakat dengan mewujudkan pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan SDM organisasi, mandatory, kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai perkembangan terkini. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan penjaminan mutu pelaksanaan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang terintegrasi baik melalui *Jateng Corporate University* maupun identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi melalui Si Jari AKPK menuju *Jateng Pinter Bareng* dengan penguatan sistem informasi manajemen pelatihan dan sarana prasarana untuk mewujudkan *Techno Training Center* sehingga pendidikan dan pelatihan dapat diselenggarakan berbasis digital (*e-learning/webinar*) sebagai upaya efektif dan efisiensi anggaran untuk memberikan fasilitasi kepada *stakeholder* dalam pengembangan/peningkatan kompetensi guna mewujudkan reformasi birokrasi berkelas dunia.

2.2.2 Kebijakan Pendapatan SKPD

Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Sumber pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari tiga komponen yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah, bersumber dari potensi daerah sendiri, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer, bersumber dari dana yang diterima dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya meliputi Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah (DID) termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sumber pendapatan lain yang tidak termasuk dalam PAD dan pendapatan transfer, seperti hibah dan dana darurat.

Pada tahun 2024, peningkatan kinerja pendapatan daerah terus ditempuh untuk mencapai target pendapatan, kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan pada semua sumber melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang memperhatikan

aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Berikut merupakan kebijakan khusus bidang pendapatan :

1. Pendapatan daerah dianggarkan secara bruto, yang berarti bahwa semua pendapatan daerah tidak boleh lebih dulu dikurangi dengan belanja atau biaya yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut, atau juga tidak boleh di kurangi dengan bagian pihak lain dalam rangka bagi hasil.
2. Penarikan pendapatan baik pajak maupun retribusi harus didasarkan pada peraturan perundangan dan dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah agar diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat.
3. Upaya peningkatan pendapatan melalui kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi mutlak perlu dilakukan oleh semua komponen pengelola pendapatan daerah.
4. Pendapatan asli daerah ditetapkan minimal naik 10% dari pendapatan pada APBD perubahan tahun sebelumnya.

BPSDMD memberikan kontribusi pada pendapatan daerah melalui komponen retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah yang meliputi pemanfaatan asset daerah seta penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain. Komponen pemanfaatan asset daerah dilaksanakan melalui penyewaan tanah dan bangunan, penyewaan tanah, penyewaan ruangan, dan penyewaan alat. Sedangkan penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain bersumber dari fasilitasi pelatihan melalui metode Biaya Instansi Pengirim (BIP) kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, maupun Kabupaten/Kota.

2.2.3 Kebijakan Belanja SKPD

Belanja daerah merupakan semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengklasifikasikan belanja daerah menjadi empat kategori, yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal diarahkan untuk memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan, memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional, dan pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat. Kebijakan Belanja Daerah pada BPSDMD Tahun Anggaran 2024 diarahkan untuk:

1. Belanja Operasional, anggaran belanja untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek, terdiri atas Belanja

Pegawai, pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah, dan Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah.

2. Belanja Modal, anggaran belanja untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

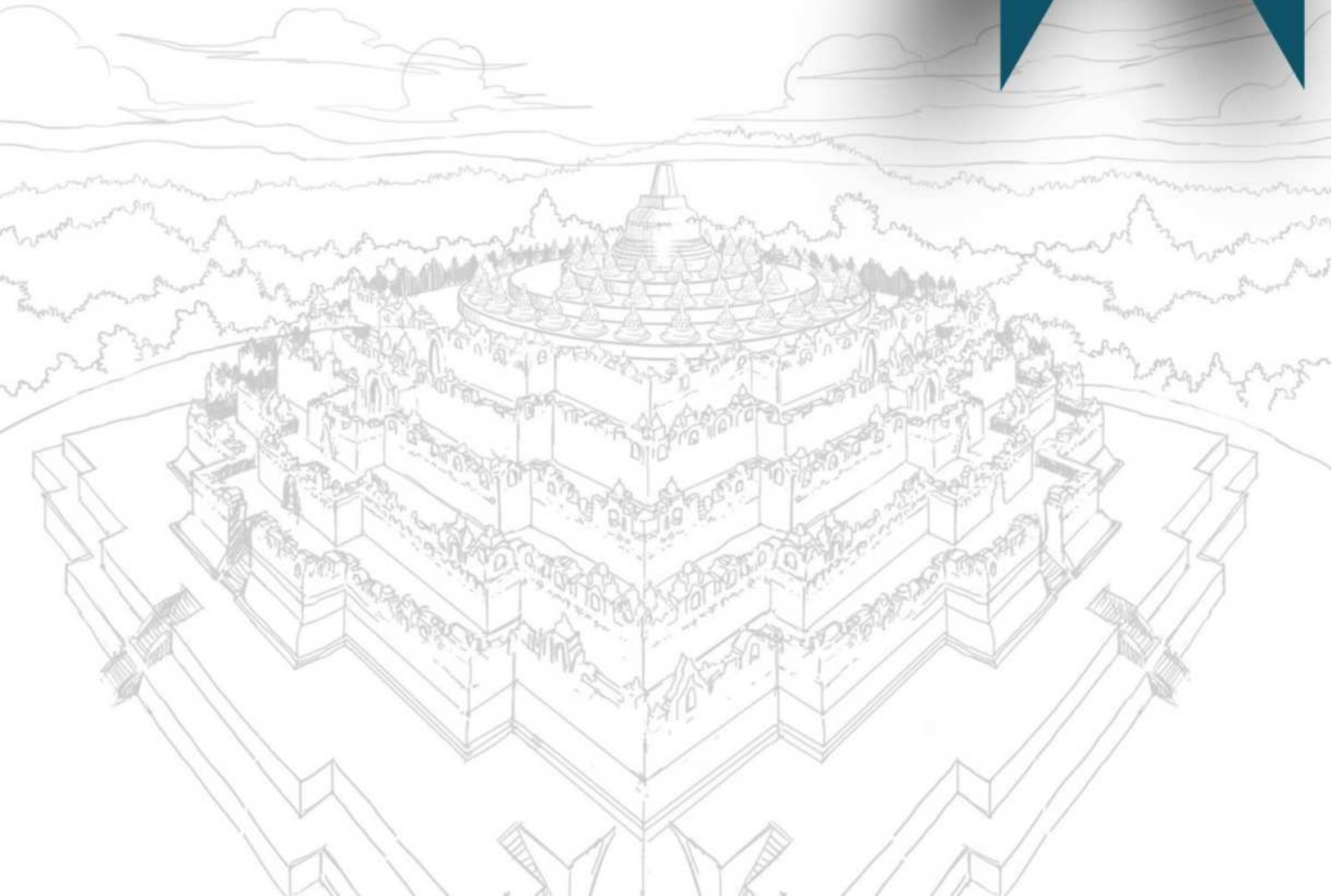
Berikut yang merupakan kebijakan khusus untuk belanja :

1. Setiap kelompok belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus bisa dirinci menurut jenis, obyek, dan rincian obyek
2. Semua rencana belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus didukung dengan ketersediaan dana pada struktur pendapatan daerah
3. Belanja yang dianggarkan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah merupakan batas tertinggi dari pengeluaran dana. Demikian juga diharapkan bahwa angka yang dianggarkan pada sisi pendapatan merupakan angka batas terendah dari suatu penerimaan daerah.
4. Dalam Pengelolaan belanja daerah perlu selalu diupayakan untuk terjadinya efisiensi dan efektivitas belanja dan upaya penghematan penggunaan dana perlu dilakukan oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Belanja daerah menampung semua pengeluaran untuk program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, termasuk belanja tidak langsung.



BAB 3

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

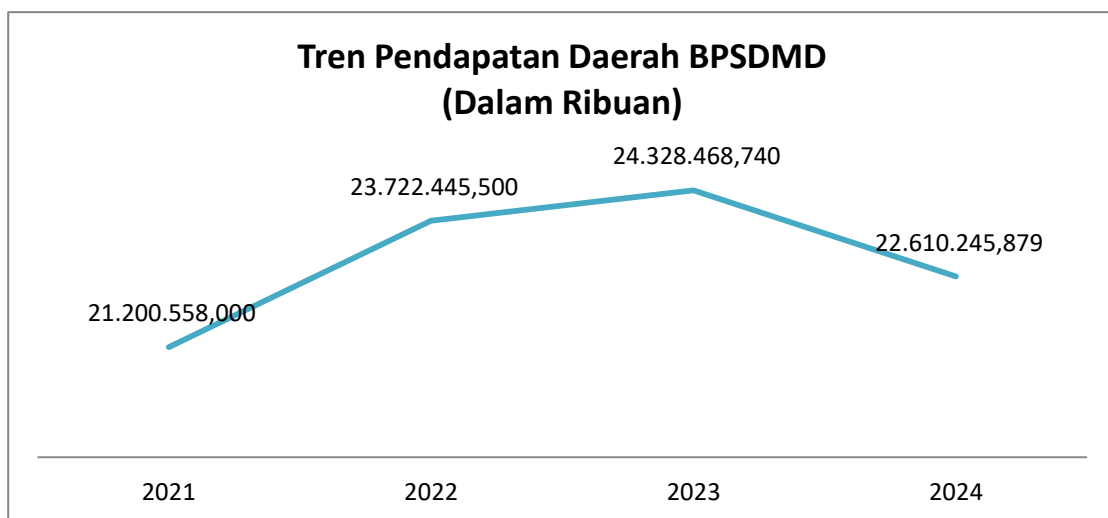


BAB III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

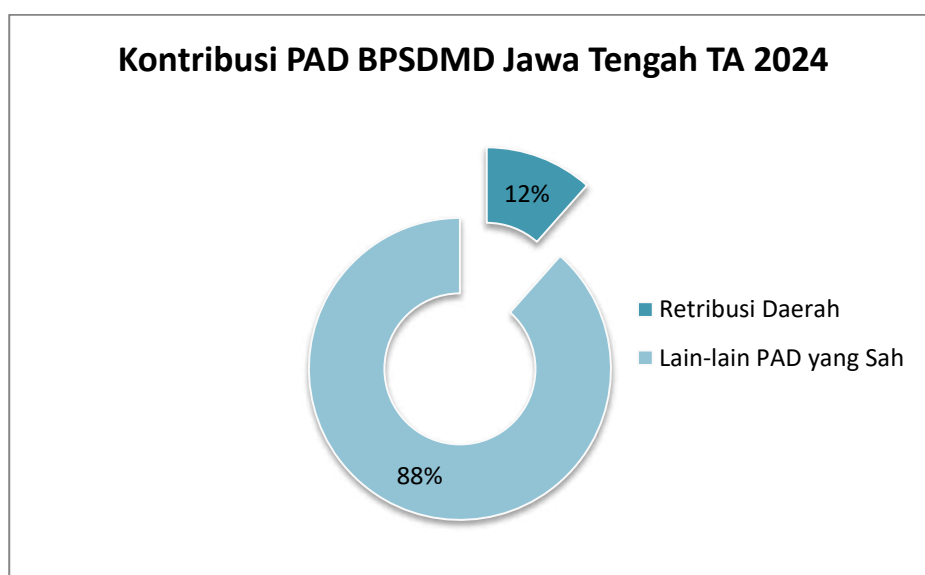
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek serta sub rincian objek. Anggaran pos pendapatan tahun anggaran 2024 setelah adanya perubahan adalah sebesar Rp22.080.000.000,00 sedangkan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp22.610.245.879,00 (102,40%). Perkembangan capaian realisasi pendapatan daerah BPSDMD digambarkan pada grafik dibawah:



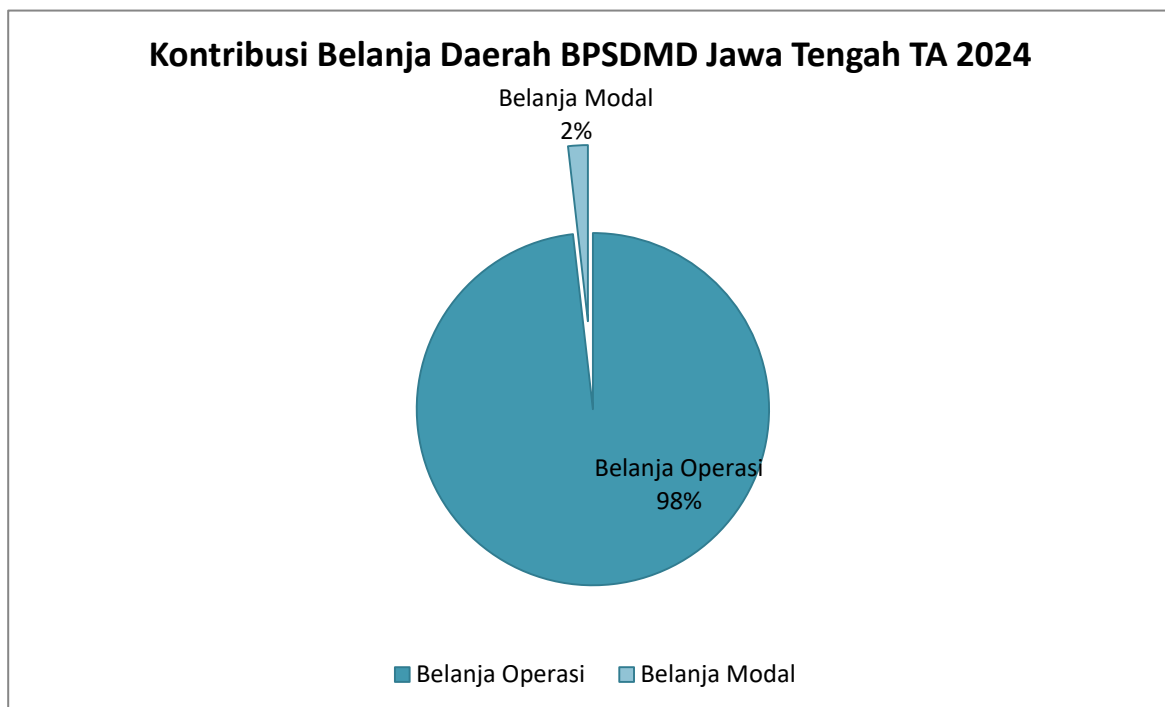
Grafik 3. 1 Perkembangan Capaian Pendapatan Daerah BPSDMD Provinsi Jawa Tengah 2021-2024 (dalam Ribuan)

Pada tahun 2024, pos pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan proporsi terbesar realisasi pada Lain-lain PAD yang Sah yang berkontribusi sebesar Rp19.997.776.879,00 atau sebesar 88,45% sedangkan untuk Retribusi Daerah berkontribusi sebesar 11,55% atau senilai Rp2.612.469.000,00 dari total pendapatan daerah sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 3.1.



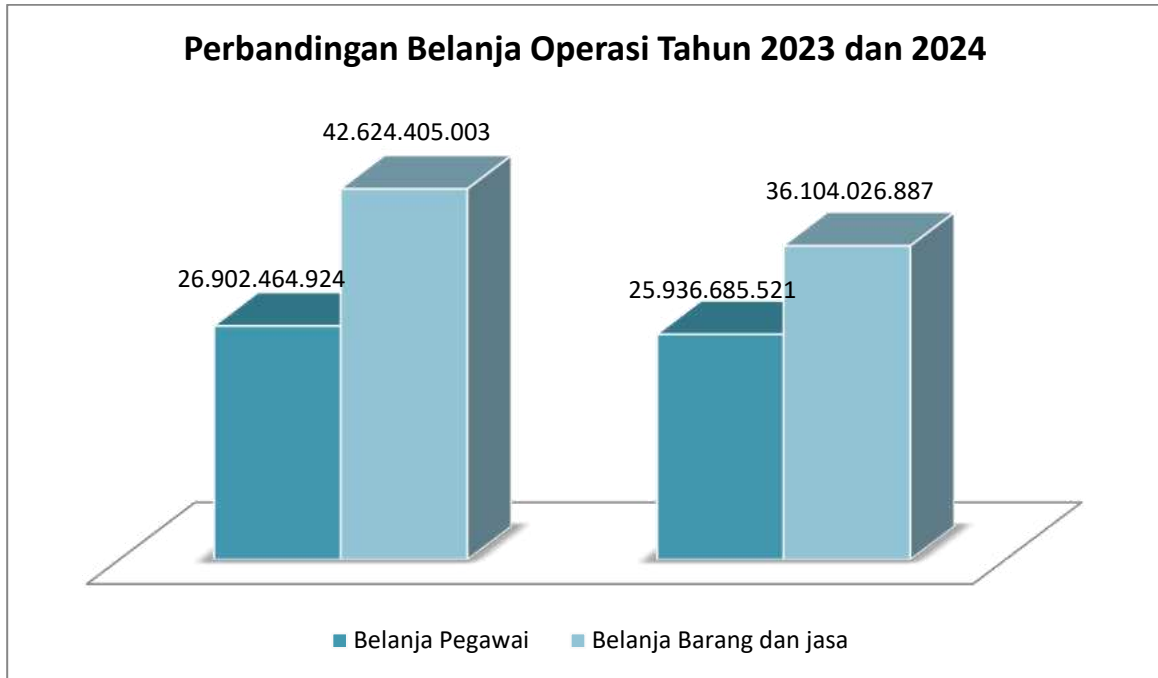
Gambar 3. 1 Kontribusi Pendapatan Daerah BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Belanja daerah adalah seluruh pengeluaran pemerintah daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai berbagai program, kegiatan, dan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama satu tahun anggaran tertentu. Anggaran pos belanja tahun anggaran 2024 setelah adanya perubahan adalah sebesar Rp65.413.487.000,00 sedangkan realisasinya adalah Rp63.181.626.208,00 (96,59%). Proporsi terbesar realisasi belanja untuk tahun anggaran 2024 untuk belanja operasi sebesar Rp62.040.712.408,00 (98,19%) dan untuk belanja modal sebesar Rp1.140.913.800,00 (1,81%) dari total belanja daerah sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 3.2.



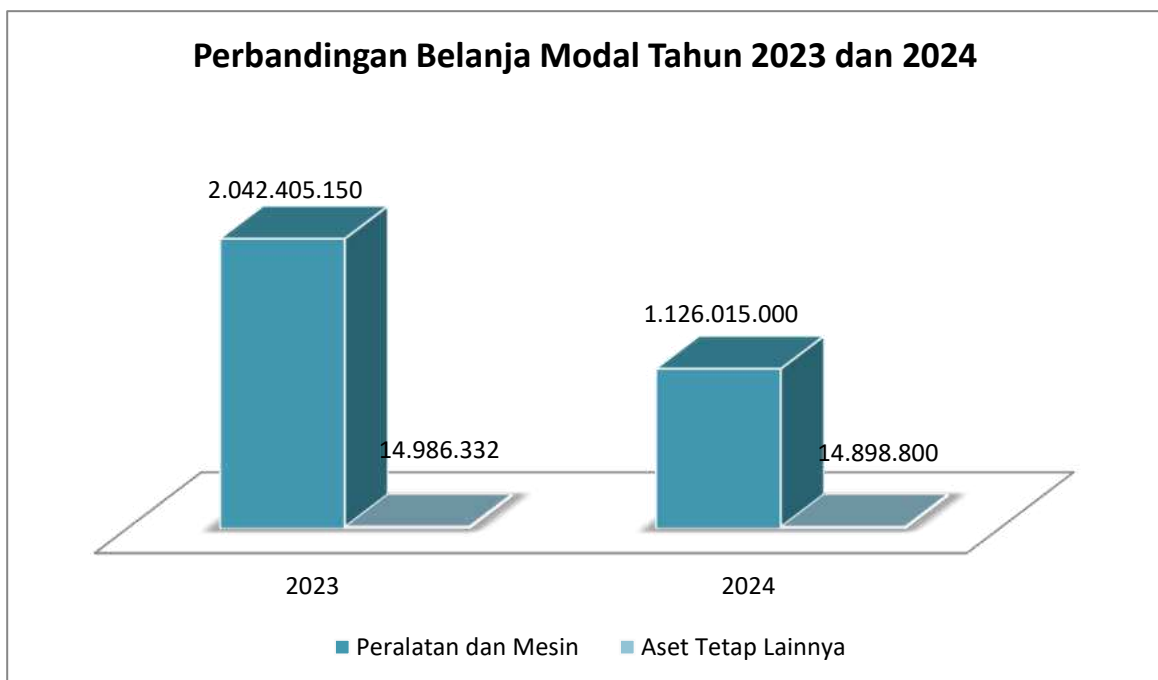
Gambar 3. 2 Kontribusi Belanja Daerah BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Secara rinci, komposisi belanja operasi tahun anggaran 2024 untuk belanja pegawai sebesar Rp25.936.685.521,00 atau berkontribusi sebesar 41,81% dari total belanja operasi, sementara belanja barang dan jasa yang menyerap 58,19% total belanja operasi yakni senilai Rp36.104.026.887,00. Pada tahun 2024, terjadi penurunan belanja pegawai sebesar Rp965.779.403,00 atau 3,59% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp26.902.464.924,00. Begitu pula pada belanja barang dan jasa yang mengalami penurunan sebesar Rp6.520.378.116,00 atau 15,30% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp42.624.405.003,00. Perbandingan belanja operasi tahun anggaran 2024 dan 2024 ditunjukkan dalam gambar 3.3.



Gambar 3. 3 Perbandingan Realisasi Belanja Operasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dan 2024

Komposisi belanja modal tahun anggaran 2024 terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin dengan kontribusi terbanyak yakni senilai Rp1.126.015.000,00 atau sebesar 98,69% dari total belanja modal lalu diikuti belanja modal aset tetap lainnya yang menyerap 1,31% atau sebesar Rp 14.898.800,00 dari total belanja modal. Pada tahun 2024, belanja modal mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, dari komponen belanja modal peralatan dan mesin menurun sebesar Rp916.390.150,00 atau 44,87%, sedangkan untuk belanja modal aset tetap lainnya menurun sebesar 0,58% atau Rp87.532,00. Perbandingan belanja modal tahun anggaran 2024 dan 2023 ditunjukkan dalam gambar 3.4.



Gambar 3. 4 Perbandingan Realisasi Belanja Modal BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dan 2024

Belanja Daerah pada BPSDMD terdiri dari 2 (dua) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 11 (sebelas) kegiatan. Berikut disajikan anggaran beserta realisasinya berdasarkan kegiatan per bidang pada BPSDMD pada tabel 3.1. sebagai berikut:

Tabel 3.1

**IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Fungsi : 5.04 Pendidikan dan Pelatihan
Sub Fungsi : 02 Pelatihan
Provinsi : Jawa Tengah

No	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran Belanja ≤ 95% & Terealisasinya Pendapatan ≥ 100%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah</i>	<i>22.080.000.000</i>	<i>22.610.245.879</i>	<i>100</i>	<i>102,40</i>	
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	22.080.000.000	22.610.245.879	100	102,40	
I	Retribusi Daerah	2.365.700.000	2.612.469.000	100	110,43	
1	Retribusi Jasa Usaha	2.365.700.000	2.612.469.000	100	110,43	Adanya penyewaan asrama untuk penerimaan peserta didik baru Akpol di luar prediksi
II	Lain-lain PAD yang Sah	19.714.300.000	19.997.776.879	100	101,44	
1	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	19.714.300.000	19.997.776.879	100	101,44	Jumlah realisasi peserta diklat melebihi perencanaan dikarenakan lonjakan permintaan Kab/Kota
	<i>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah</i>	<i>65.413.487.000</i>	<i>63.181.626.208</i>	<i>100</i>	<i>96,59</i>	
	<i>Sekretariat – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah</i>	<i>44.367.732.000</i>	<i>42.604.804.871</i>	<i>100</i>	<i>96,03</i>	
B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	44.367.732.000	42.604.804.871	100	96,03	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	365.000.000	357.357.040	100	97,91	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	135.000.000	133.887.240	100	99,18	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	230.000.000	223.469.800	100	97,16	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.216.043.000	26.797.305.318	100	94,97	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	26.719.633.000	25.506.205.521	100	95,46	Terdapat tambahan anggaran untuk pembayaran Tapera ASN

No	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran Belanja ≤ 95% & Terealisasinya Pendapatan ≥ 100%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
						dan gaji PPPK yang tidak terealisasi
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	1.263.400.000	1.058.386.410	100	83,77	Diterapkannya efektivitas penjadwalan jam pelajaran Widyaiswara sehingga adanya efisiensi anggaran narasumber dan jasa tenaga pendidikan
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	61.863.000	61.758.900	100	99,83	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD **	83.868.000	83.837.710	100	99,96	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	56.194.000	56.070.390	100	99,78	
6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran **	31.085.000	31.046.387	100	99,88	
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	234.000.000	231.020.476	100	98,73	
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	234.000.000	231.020.476	100	98,73	
IV	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	141.990.000	141.669.810	100	99,77	
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **	141.990.000	141.669.810	100	99,77	
V	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	336.120.000	326.333.505	100	97,09	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **	84.680.000	75.783.500	100	89,49	
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	49.000.000	48.961.570	100	99,92	
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	202.440.000	201.588.435	100	99,58	
VI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.205.539.000	2.199.940.310	100	99,75	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	173.093.000	173.093.000	100	100	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	188.196.000	188.196.000	100	100	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	384.165.000	383.995.000	100	99,96	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	305.060.000	304.700.000	100	99,88	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	76.200.000	76.200.000	100	100	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	36.000.000	36.000.000	100	100	

No	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran Belanja ≤ 95% & Terealisasinya Pendapatan ≥ 100%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	135.000.000	134.875.000	100	99,91	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	405.070.000	405.060.030	100	100	
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	8.505.000	8.505.000	100	100	
10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	494.250.000	489.316.280	100	99	
VII	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.177.600.000	1.140.913.800	100	96,88	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	1.056.000.000	1.020.615.000	100	96,65	
2	Pengadaan Aset Tetap Lainnya **	15.000.000	14.898.800	100	99,33	
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	106.600.000	105.400.000	100	98,87	
VII I	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.432.170.000	9.164.629.718	100	97,16	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	4.800.000	4.319.500	100	89,99	Terdapat efisiensi dan peralihan penyediaan surat menyurat secara digitalisasi
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	2.539.120.000	2.358.443.296	100	92,88	Efisiensi belanja
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	6.888.250.000	6.801.866.922	100	98,75	
IX	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.259.270.000	2.245.634.894	100	99,4	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	118.850.000	116.632.534	100	98,13	
2	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **	23.500.000	23.500.000	100	100	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	1.140.000.000	1.130.132.963	100	99,13	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	976.920.000	975.369.397	100	99,84	
	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	1.265.000.000	1.220.292.980	100	96,47	
C	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.265.000.000	1.220.292.980	100	96,47	
I	Pengembangan Kompetensi Teknis	1.265.000.000	1.220.292.980	100	96,47	
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan	1.265.000.000	1.220.292.980	100	96,47	

No	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran Belanja ≤ 95% & Terealisasinya Pendapatan ≥ 100%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
	Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum **					
	<i>Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional</i>	2.706.079.000	2.700.055.030	100	99,78	
C	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.706.079.000	2.700.055.030	100	99,78	
I	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.706.079.000	2.700.055.030	100	99,78	
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan **	2.706.079.000	2.700.055.030	100	99,78	
	<i>Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial</i>	16.001.520.000	15.601.540.803	100	97,5	
C	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	16.001.520.000	15.601.540.803	100	97,5	
I	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	16.001.520.000	15.601.540.803	100	97,5	
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan **	16.001.520.000	15.601.540.803	100	97,5	
	<i>Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu</i>	1.073.156.000	1.054.932.524	100	98,3	
C	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.073.156.000	1.054.932.524	100	98,3	
I	Pengembangan Kompetensi Teknis	194.329.000	186.649.589	100	96,05	
1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum **	42.833.000	42.707.320	100	99,71	
2	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	126.614.000	119.481.200	100	94,37	Efisiensi belanja barang jasa

No	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran Belanja ≤ 95% & Terealisasinya Pendapatan ≥ 100%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
	Pemerintahan Umum **					
3	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum **	24.882.000	24.461.069	100	98,31	
II	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	878.827.000	878.827.000	100	98,48	
1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional **	95.547.000	95.547.000	100	97,14	
2	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi **	34.350.000	34.350.000	100	94,18	Efisiensi belanja barang dan jasa
3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota **	422.006.000	422.006.000	100	99,14	
4	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional **	63.699.000	63.699.000	100	98,73	
5	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan **	263.225.000	263.225.000	100	97,31	

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

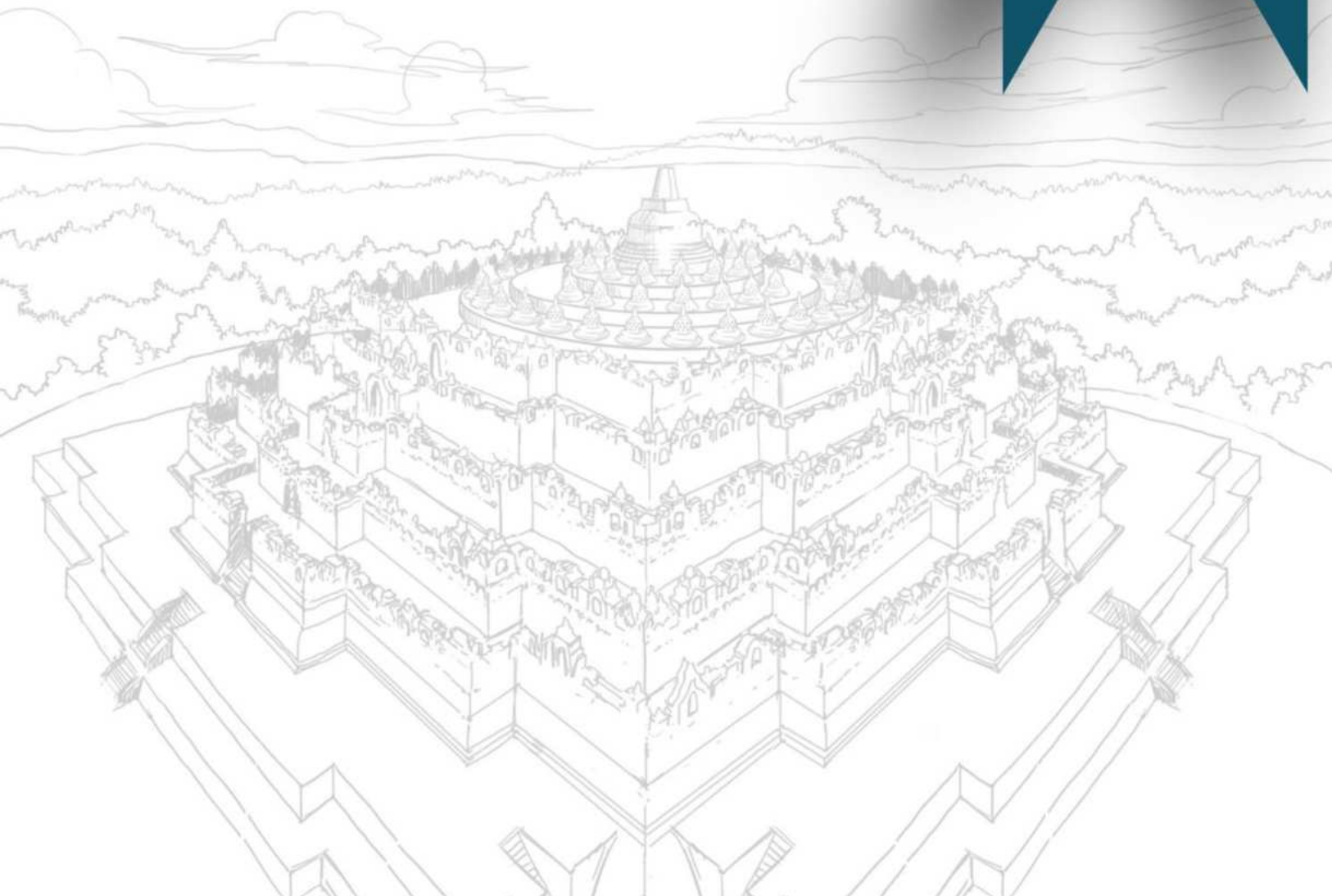
Keberhasilan pencapaian target kinerja APBD pada BPSDMD dikarenakan adanya dukungan dari segenap sumber daya serta komitmen seluruh pegawai sesuai kompetensinya masing-masing. Keberhasilan tersebut bisa diukur dari pencapaian kinerja kegiatan dan hasil penyerapan keuangan APBD pada BPSDMD Tahun Anggaran 2024 sebesar 96,59%. Dari semua kegiatan yang dilaksanakan, penyerapan keuangan paling sedikit yaitu pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Hambatan dan Kendala yang dihadapi oleh BPSDMD dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, yaitu pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pengembangan Kompetensi Teknis; serta Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan adanya beberapa pengefektivitasan belanja barang dan jasa dan jadwal mengajar widyaiswara. Dalam pelaksanaannya pembayaran gaji dan tunjangan terdapat tambahan anggaran untuk tapera dan tunjangan PPPK yang belum dapat terealisasi serta adanya penurunan tagihan listrik dan air pada triwulan IV tahun 2024.



BAB 4

KEBIJAKAN AKUNTANSI



BAB IV

Kebijakan Akuntansi

Pilar utama pengembangan akuntansi pemerintah daerah terletak pada perumusan kebijakan akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan dan beban, sedangkan untuk penyusunan LRA masih basis kas.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sejak tahun 2016. Adapun kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang dalam hal ini yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Entitas akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan, dalam hal ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Kebijakan akuntansi mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAP. Apabila PSAP belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi, pemerintah harus menetapkan kebijakan untuk memastikan laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan BPSDMD adalah basis akrual. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Untuk melengkapi Laporan Keuangan menjadi berbasis akrual maka dibuat Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Operasional (LO) yang menyajikan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin

dalam pendapatan, beban, dan surplus/defisit. Sedangkan Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi perubahan ekuitas dari ekuitas awal, surplus/defisit- LO, koreksi, dan ekuitas akhir. Untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dilakukan dengan basis kas, basis kas untuk diterima di rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah. Sedangkan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca dilaksanakan dengan basis akrual, basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadi transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan laporan keuangan SKPD merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu elemen utama yang menjadi dasar dalam proses tersebut adalah penerapan basis pengukuran yang tepat. Basis pengukuran ini berfungsi sebagai landasan dalam mencatat, menilai, dan menyajikan informasi keuangan, sehingga mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai posisi keuangan, kinerja operasional, dan aliran kas.

Pendapatan-LRA dan pendapatan-LO diukur berdasarkan nominal pendapatan yang masuk ke kas daerah yang dicatat berdasarkan nilai nominal dengan menerapkan asas bruto, yaitu dicatat tanpa mengurangi atau mengompensasikannya dengan belanja yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Namun, jika pengurang terhadap pendapatan - LRA bruto (biaya) bersifat variabel dan tidak dapat dianggarkan sebelumnya karena prosesnya belum selesai, maka pengecualian terhadap asas bruto dapat diterapkan. Pendapatan hibah-LO yang berbentuk barang atau jasa diukur sebesar nilai nominal saat hibah diterima, apabila hibah tidak memiliki nilai nominal akan dilakukan penilaian berdasarkan biaya, nilai pasar, atau estimasi nilai wajar. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah, serta dihitung menggunakan asas bruto.

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber, misalnya daftar gaji. Beban persediaan dicatat saat pembelian, ketika barang telah diterima. Pada akhir tahun, nilai sisa persediaan atas inventarisasi fisik yang digunakan untuk mengurangi beban persediaan. Beban jasa, pemeliharaan, dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring berjalannya waktu, biasanya nilai beban bunga dihitung atas persentase tertentu atas pokok utang dan periode pembayaran bunga. a) Beban Subsidi didasarkan pada nilai nominal sesuai dengan dokumen tagihan yang diajukan pihak ketiga yang telah

mendapatkan persetujuan dari Bendahara Umum Daerah. Beban hibah uang diakui sesuai nilai nominal yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sementara beban hibah berbentuk barang/jasa diakui sebesar nilai wajar saat transaksi terjadi. Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh pihak ketiga. Beban penyusutan/amortisasi diukur pada akhir periode pelaporan berdasarkan metode penyusutan/amortisasi yang telah ditetapkan. Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer. Beban penyisihan piutang tak tertagih dapat dilakukan dengan dua metode: 1) Metode Penyisihan Piutang, mengakui beban piutang tak tertagih di muka sebelum piutang tersebut dihapuskan. 2) Metode Penghapusan Langsung, mengakui beban piutang tak tertagih hanya ketika piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih lagi. Beban Tak Terduga dicatat sebesar resume tagihan/kewajiban pembayaran belanja tak terduga oleh pihak ketiga.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Apabila dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi dan dilakukan berdasarkan asas bruto. Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam surat ketetapan, surat penagihan dan nilai yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Beban dibayar dimuka dicatat sebesar nilai nominal yang dibayarkan kepada pihak ketiga sesuai dengan nilai yang tertera dalam pengesahan SPJ atau SP2D-LS.

Pengukuran investasi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu 1) Investasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila investasi diperoleh tanpa biaya perolehan maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. 2) Investasi jangka panjang, metode yang digunakan adalah metode biaya, metode ekuitas, metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Persediaan dicatat menggunakan metode periodik yaitu pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak mengupdate jumlah persediaan. Metode penilaian persediaan menggunakan harga perolehan terakhir. Dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.

Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan dalam neraca dan CaLK. Sedangkan kewajiban jangka panjang dicatat sebesar nilai nominal dan harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal.

Pengukuran pos-pos dalam pelaporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah:

1. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan

SKPD dan sumber daya ekonomi yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

2. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas yang sudah dimodifikasi, yaitu merupakan kombinasi metode penilaian atas dasar kas (*cash basis*) dengan metode penilaian atas dasar akrual (*accrual basis*);
3. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember;
4. Penetapan saldo pos-pos neraca awal diperoleh dari catatan administrasi dan seluruh aset BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
5. Kekayaan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
6. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan (perpetual).

Dalam menyusun laporan keuangan pada periode sebelumnya, adanya kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, atas kejadian tersebut dilakukan koreksi kesalahan dan akan disesuaikan (*adjustment*) ke tahun berikutnya.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi pedoman utama dalam pencatatan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian laporan keuangan SKPD, sehingga menghasilkan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Dengan penerapan kebijakan akuntansi yang sesuai, SKPD mampu mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.

Secara umum, kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD, disahkan oleh Gubernur dan ditetapkan dalam peraturan daerah;
3. Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepala daerah untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan;
4. Asas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan daerah setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan

pencatatan pengeluaran setelah dikompensasi antara penerimaan dan pengeluaran;

5. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
6. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran berkenaan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
7. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
8. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aktiva/aset dan kewajiban pemerintah;
9. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban, DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, dan SKPD lainnya.
10. Kas adalah uang tunai saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan SKPD;
11. Kas Daerah (Kasda) adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
12. Pendapatan/penerimaan SKPD diakui pada saat diterima pada Bendahara Penerimaan;
13. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang berkenaan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah;
14. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas keluar dari Bendahara Pengeluaran;

Periode Akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.

4.4.1. Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

1. Pimpinan entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Laporan keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
3. Kebijakan akuntansi dipakai oleh suatu entitas pelaporan dan akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dapat memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
4. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.

5. Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
6. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya
7. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan dinyatakan dalam jumlah nominal atau prosentase.
8. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan perubahan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, dan kesalahan mendasar.
9. Laporan keuangan disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim, misalnya pada saat terbentuknya suatu entitas baru dan dijelaskan dalam CaLK.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

1. Pendapatan LRA

Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum daerah, kecuali Pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD diakui oleh pemerintah daerah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.

2. Pendapatan LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO diakui apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

1. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya

pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan asas bruto.

2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

1. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4.4.6. Kebijakan Akuntansi Piutang dan Beban Dibayar Dimuka

1. Piutang
 - a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- b. Pengakuan piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya.
 - c. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto. Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang.
2. Beban Dibayar Dimuka
- a. Beban dibayar dimuka/uang muka belanja adalah piutang yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh pemerintah.
 - b. Beban dibayar dimuka diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan hasil identifikasi yaitu ketika terdapat pembayaran atas uang muka yang belum habis dikonsumsi pada periode pelaporan.

4.4.7. Kebijakan Akuntansi Investasi

1. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Investasi diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
3. Pengakuan Investasi:
 - a. Investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu 12 bulan atau kurang, dan
 - 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
 - b. Investasi jangka panjang dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu 12 bulan atau kurang, dan

- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
4. Penyajian/Pengungkapan
- a. Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO.
 - b. Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang bersifat non permanen maupun bersifat permanen. Investasi non permanen yang diragukan tertagih/terrealisasi disajikan sebagai pengurang investasi jangka panjang non permanen.
 - c. Investasi non permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi non permanen pada aset lancar.

4.4.8. Kebijakan Akuntansi Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Persediaan merupakan aset yang berupa :
 - a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
 - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
3. Persediaan diakui pada saat :
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai/biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
4. Persediaan disajikan sebesar :
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan : potongan harga dan rabat dan lainnya yang serupa;

- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

4.4.9. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah tanah, peralatan & mesin, gedung & bangunan, jalan, irigasi & jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan (KDP).
3. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Kriteria untuk dapat diakui sebagai aset tetap adalah :
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
4. Aset tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
5. Komponen biaya perolehan aset terdiri dari :
 - a. Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat;
 - b. Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/didistribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
6. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin adalah yang sama dengan atau lebih dari Rp. 500.000,-.
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 20.000.000,-.
 - c. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
7. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap hanya dapat dikapitalisasi pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas,

- kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki;
- b. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.
8. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Perhitungan penyusutan metode garis lurus yaitu dengan rumus nilai yang dapat disusutkan dibagi masa manfaat. Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (*residu*).
 9. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan secara bulanan dan pengadaaan/perolehan pada bulan tertentu mulai dihitung penyusutannya.
 10. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam CaLK.
 11. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran.
 12. Penyajian aset tetap berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
 13. Perlakuan khusus, penyajian aset bersejarah tidak harus di neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala seperti candi dan karya seni.

4.4.10. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

1. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
2. Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.
3. Dana cadangan disajikan dalam neraca pada kelompok aset non lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.

4.4.11. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain tagihan jangka panjang, aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, dan aset lain-lain.

4.4.12. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan menjadi :

1. Kewajiban jangka pendek
 - a. Kewajiban jangka pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan dan masa pembayarannya/pelunasan diharapkan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
 - b. Kewajiban jangka pendek terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka, utang beban, dan utang jangka pendek lainnya.
 - c. Pengakuan kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban jangka Panjang
 - a. Kewajiban jangka panjang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
 - b. Kewajiban jangka panjang terdiri dari utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
 - c. Kewajiban jangka panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

4.4.13. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam basis akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Dalam Basis Akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.

1. Komponen ekuitas terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu, ekuitas untuk mencatat akun saldo kekayaan bersih yang diperoleh dari LPE dan ekuitas pada SKPD untuk dikonsolidasikan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK-PPKD.
2. Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO dalam neraca

3. Ekuitas untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi transaksi resiprokal antara SKPKD dan SKPD.
4. Pada akhir periode pelaporan, ekuitas dikonsolidasikan akan dieliminasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan konsolidasian.

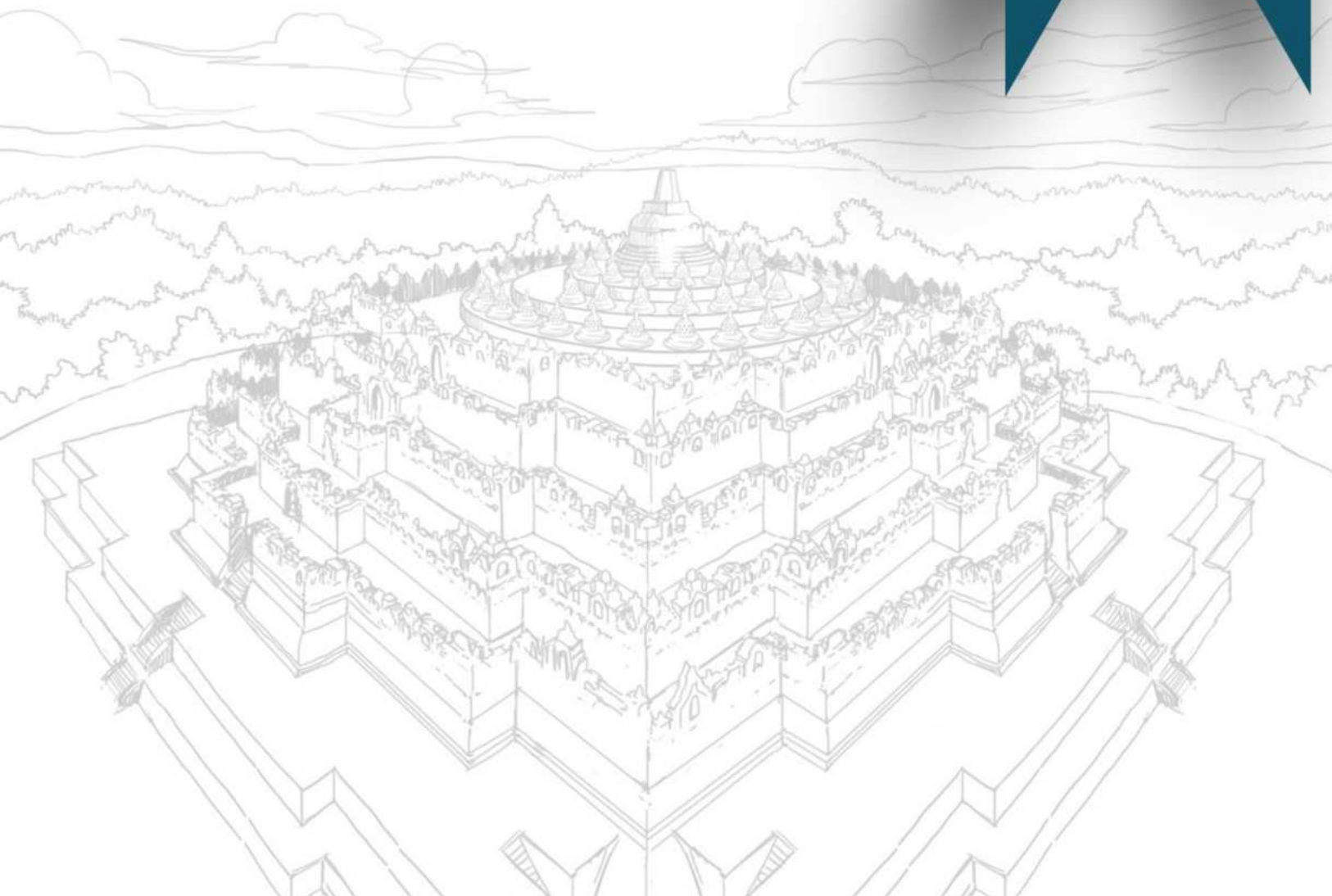
4.4.14. Kebijakan Akuntansi Koreksi

1. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan kesalahan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
2. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis yaitu :
 - a. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali terdiri atas kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan kesalahan tidak berulang yang terjadi di periode sebelumnya;
 - b. Kesalahan berulang dan sistematis adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Kesalahan berulang dan sistematis tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadinya pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan LRA maupun pendapatan LO yang bersangkutan/
3. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas, dilaporkan dalam LAK tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.



BAB 5

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN



BAB V

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

5.1. PENJELASAN POS – POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

5.1.1. PENDAPATAN DAERAH Rp22.080.000.000,00

Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp22.080.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp22.610.245.879,00 atau 102,40%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp24.328.468.740,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp1.718.222.861,00 atau 7,06% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Pendapatan Asli Daerah	22.080.000.000,00	22.610.245.879,00	102,40	24.328.468.740,00	(1.718.222.861,00)	(7,06)
2 Pendapatan Transfer	-	-	-	-	-	-
3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-	-	-	-
Jumlah	22.080.000.000,00	22.610.245.879,00	102,40	24.328.468.740,00	(1.718.222.861,00)	(7,06)

5.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp22.080.000.000,00

Pendapatan Asli Daerah ditargetkan Rp22.080.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp22.610.245.879,00 atau 102,40%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp24.328.468.740,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp1.718.222.861,00 atau 7,06% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-
2 Pendapatan Retribusi Daerah	2.365.700.000,00	2.612.469.000,00	110,43	3.173.996.400,00	(561.527.400,00)	(17,69)
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-
4 Lain-Lain PAD yang Sah	19.714.300.000,00	19.997.776.879,00	101,44	21.154.472.340,00	(1.156.695.461,00)	(5,47)
Jumlah	22.080.000.000,00	22.610.245.879,00	102,40	24.328.468.740,00	(1.718.222.861,00)	(7,06)

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah Rp2.612.469.000,00

Pendapatan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp2.365.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.612.469.000,00 atau 110,43%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.173.996.400,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp561.527.400,00 atau 17,69%.

Pelaksanaan pengenaan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Retribusi Jasa Umum	-	-	-	-	-	-
2 Retribusi Jasa Usaha	2.365.700.000,00	2.612.469.000,00	110,43	3.173.996.400,00	(561.527.400,00)	(17,69)
3 Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	-	-	-
Jumlah	2.365.700.000,00	2.612.469.000,00	110,43	3.173.996.400,00	(561.527.400,00)	(17,69)

5.1.1.1.2.2. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Rp2.612.469.000,00

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha ditargetkan sebesar Rp2.365.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.612.469.000,00 atau 110,43%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.173.996.400,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp561.527.400,00 atau 17,69% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.365.700.000,00	2.612.469.000,00	110,43	3.173.996.400,00	(561.527.400,00)	(17,69)
2 Retribusi Tempat Pelelangan	-	-	-	-	-	-
3 Retribusi Terminal	-	-	-	-	-	-
Retribusi Tempat	-	-	-	-	-	-
4 Penginapan/Pesanggrahan/Vila	-	-	-	-	-	-
5 Retribusi Rumah Potong Hewan	-	-	-	-	-	-
6 Retribusi Kepelabuhan	-	-	-	-	-	-
7 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	-	-	-	-	-
8 Retribusi Penyeberangan di Air	-	-	-	-	-	-
9 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	-	-	-
Jumlah	2.365.700.000,00	2.612.469.000,00	110,43	3.173.996.400,00	(561.527.400,00)	(17,69)

5.1.1.1.2.2.1. Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp2.612.469.000,00

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditargetkan sebesar Rp2.365.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.612.469.000,00 atau 110,43%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.173.996.400,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp561.527.400,00 atau 17,69% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.284.450.000,00	2.533.019.000,00	110,88	-	2.533.019.000,00	-
2 Retribusi Penyewaan Tanah	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-	7.500.000,00	-
3 Retribusi Penyewaan Bangunan	-	-	-	-	-	-
4 Retribusi Pemakaian Laboratorium	-	-	-	-	-	-
5 Retribusi Pemakaian Ruangan	71.500.000,00	71.950.000,00	100,63	3.173.996.400,00	(3.102.046.400,00)	(97,73)
6 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	-
7 Retribusi Pemakaian Alat	2.250.000,00	-	-	-	-	-
Jumlah	2.365.700.000,00	2.612.469.000,00	110,43	3.173.996.400,00	(561.527.400,00)	(17,69)

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah **melebihi target** dikarenakan adanya penerimaan peserta didik baru Akademi Polisi di luar prediksi sehingga retribusi pemakaian ruangan asrama mengalami peningkatan.

5.1.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp19.997.776.879,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp19.714.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp19.997.776.879,00 atau 101,44%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar

Rp21.154.472.340,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp1.156.695.461,00 atau 5,47% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
2 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
3 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
4 Hasil Kerja Sama Daerah	-	-	-	-	-	-
5 Jasa Giro	-	-	-	-	-	-
6 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	-	-	-
7 Pendapatan Bunga	-	-	-	-	-	-
8 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	-
9 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	19.714.300.000,00	19.997.776.879,00	101,44	21.154.472.340,00	(1.156.695.461,00)	(5,47)
10 Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	-	-	-	-	-	-
11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	-	-	-
12 Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-
13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-
14 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-	-	-	-	-
15 Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	-	-	-
16 Pendapatan BLUD	-	-	-	-	-	-
17 Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
18 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	-	-	-	-	-
19 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	-	-	-
20 Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	-	-	-	-	-	-
21 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	-	-	-	-	-
22 Pendapatan Zakat	-	-	-	-	-	-
Jumlah	19.714.300.000,00	19.997.776.879,00	101,44	21.154.472.340,00	(1.156.695.461,00)	(5,47)

5.1.1.1.4.9. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain **Rp21.470.469.750 ,00**

Pendapatan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain ditargetkan sebesar sebesar Rp19.714.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp19.997.776.879,00 atau 101,44%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp21.154.472.340,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp1.156.695.461,00 atau 5,47% dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	19.714.300.000,00	19.997.776.879,00	101,44	21.154.472.340,00	(1.156.695.461,00)	(5,47)
Jumlah	19.714.300.000,00	19.997.776.879,00	101,44	21.154.472.340,00	(1.156.695.461,00)	(5,47)

Pendapatan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain **melebihi target** dikarenakan lonjakan peningkatan permintaan pengembangan kompetensi dari Kabupaten/Kota sehingga menambah realisasi peserta pelatihan.

5.1.2. BELANJA DAERAH

Rp63.181.626.208,00

Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp65.413.487.000,00 dengan realisasi sebesar Rp63.181.626.208,00 atau 96,59%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp71.584.261.409,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp8.402.635.201,00 atau 11,74% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Operasional	64.235.887.000,00	62.040.712.408,00	96,58	69.526.869.927,00	7.486.157.519,00	(10,77)
2 Belanja Modal	1.177.600.000,00	1.140.913.800,00	96,88	2.057.391.482,00	(916.477.682,00)	(44,55)
3 Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-
4 Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-
Jumlah	65.413.487.000,00	63.181.626.208,00	96,59	71.584.261.409,00	(8.402.635.201,00)	(11,74)

5.1.2.1. BELANJA OPERASIONAL

Rp62.040.712.408,00

Belanja Operasional dianggarkan sebesar Rp64.235.887.000,00 dengan realisasi sebesar Rp62.040.712.408,00 atau 96,58%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp69.526.869.927,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp7.486.157.519,00 atau 10,77% dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Pegawai	27.176.433.000,00	25.936.685.521,00	95,44	26.902.464.924,00	(965.779.403,00)	(3,59)
2 Belanja Barang dan Jasa	37.059.454.000,00	36.104.026.887,00	97,42	42.624.405.003,00	(6.520.378.116,00)	(15,30)
3 Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
4 Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
5 Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-
6 Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-
Jumlah	64.235.887.000,00	62.040.712.408,00	96,58	69.526.869.927,00	(7.486.157.519,00)	(10,77)

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Rp25.936.685.521,00

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp27.176.433.000,00 dengan realisasi sebesar Rp25.936.685.521,00 atau 95,44%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp26.902.464.924,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp965.779.403,00 atau 3,59% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	12.101.142.000,00	11.939.500.263,00	98,66	12.561.034.695,00	(621.534.432,00)	(4,95)
2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN	14.618.491.000,00	13.566.705.258,00	92,81	13.896.507.729,00	(329.802.471,00)	(2,37)
3 Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN	456.800.000,00	430.480.000,00	94,24	444.922.500,00	(14.442.500,00)	(3,25)
4 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	-	-	-	-
5 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-	-	-	-	-	-
6 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-	-	-	-
7 Belanja Pegawai BOS	-	-	-	-	-	-
8 Belanja Pegawai BLUD	-	-	-	-	-	-
Jumlah	27.176.433.000,00	25.936.685.521,00	95,44	26.902.464.924,00	(965.779.403,00)	(3,59)

5.1.2.1.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Rp11.939.500.263,00

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp12.101.142.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.939.500.263,00 atau 98,66%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp12.561.034.695,00

mengalami **penurunan** sebesar Rp621.534.432,00 atau 4,95% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Gaji Pokok ASN	8.595.179.000,00	8.560.087.948,00	99,59	8.877.530.370,00	(317.442.422,00)	(3,58)
2 Belanja Tunjangan Keluarga ASN	766.061.000,00	755.188.294,00	98,58	796.122.404,00	(40.934.110,00)	(5,14)
3 Belanja Tunjangan Jabatan ASN	206.780.000,00	206.780.000,00	100,00	215.220.000,00	(8.440.000,00)	(3,92)
4 Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1.007.274.000,00	983.264.000,00	97,62	1.167.584.000,00	(184.320.000,00)	(15,79)
5 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	190.010.000,00	187.680.000,00	98,77	210.920.000,00	(23.240.000,00)	(11,02)
6 Belanja Tunjangan Beras ASN	361.956.000,00	356.885.760,00	98,60	401.206.800,00	(44.321.040,00)	(11,05)
7 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	159.489.000,00	125.542.413,00	78,72	115.748.411,00	9.794.002,00	8,46
8 Belanja Pembulatan Gaji ASN	102.000,00	99.787,00	97,83	108.239,00	(8.452,00)	(7,81)
9 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	699.292.000,00	694.028.902,00	99,25	703.815.289,00	(9.786.387,00)	(1,39)
10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	17.878.000,00	17.485.697,00	97,81	18.194.794,00	(709.097,00)	(3,90)
11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	53.503.000,00	52.457.462,00	98,05	54.584.388,00	(2.126.926,00)	(3,90)
12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	43.618.000,00	-	-	-	-	-
13 Belanja Jaminan Hari Tua ASN	-	-	-	-	-	-
14 Belanja Tunjangan Khusus*)	-	-	-	-	-	-
15 Belanja Zakat ASN	-	-	-	-	-	-
Jumlah	12.101.142.000,00	11.939.500.263,00	98,66	12.561.034.695,00	(621.534.432,00)	(4,95)

Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN **tidak mencapai target** dikarenakan penyesuaian pembayaran tunjangan PPPK dengan SK Pengangkatan PPPK dan penyesuaian perhitungan pajak penghasilan akhir tahun, dampak regulasi TER. juga untuk realisasi Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN tidak dapat terealisasi dikarenakan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum terdapat regulasi terkait pembayaran iuran Tapera.

5.1.2.1.1.2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp13.566.705.258,00

Belanja Tambahan Penghasilan ASN dianggarkan sebesar Rp14.618.491.000,00 dengan realisasi sebesar Rp13.566.705.258,00 atau 92,81 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp13.896.507.729,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp329.802.471,00 atau 2,37% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	14.618.491.000,00	13.566.705.258,00	92,81	13.896.507.729,00	(329.802.471,00)	(2,37)
2 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	-	-	-	-	-	-
3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	-	-	-	-	-	-
4 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	-	-	-	-	-	-
5 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	-	-	-	-	-	-
Jumlah	14.618.491.000,00	13.566.705.258,00	92,81	13.896.507.729,00	(329.802.471,00)	(2,37)

Belanja Tambahan Penghasilan ASN **tidak mencapai target** dikarenakan adanya penyesuaian perhitungan pajak penghasilan akhir tahun, dampak regulasi TER pada Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS.

5.1.2.1.1.3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASNRp430.480.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dianggarkan sebesar Rp456.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp430.480.000,00 atau 94,24%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp444.922.500,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp14.442.500,00 atau 3,25% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-
2 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-
3 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	-	-	-	-	-	-
4 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	-	-	-	-	-	-
5 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	-	-	-	-	-	-
6 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-	-	-	-	-	-
7 Belanja Honorarium	456.800.000,00	430.480.000,00	94,24	444.922.500,00	(14.442.500,00)	(3,25)
8 Belanja Jasa Pengelolaan BMD	-	-	-	-	-	-
Jumlah	456.800.000,00	430.480.000,00	94,24	444.922.500,00	(14.442.500,00)	(3,25)

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN **tidak mencapai target** dikarenakan terdapat perubahan regulasi terkait honorarium tim pengadaan barang dan jasa pada Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa Rp36.104.026.887,00

Belanja Barang dan Jasa Dianggarkan sebesar Rp37.059.454.000,00 dengan realisasi sebesar Rp36.104.026.887,00 atau 97,42%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp42.624.405.003,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp6.520.378.116,00 atau 15,30% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Barang	6.285.644.000,00	6.231.722.510,00	99,14	8.926.777.952,00	(2.695.055.442,00)	(30,19)
2 Belanja Jasa	17.493.426.000,00	16.793.471.444,00	96,00	21.526.714.585,00	(4.733.243.141,00)	(21,99)
3 Belanja Pemeliharaan	2.270.420.000,00	2.254.965.644,00	99,32	3.814.125.683,00	(1.559.160.039,00)	(40,88)
4 Belanja Perjalanan Dinas	11.005.464.000,00	10.819.367.289,00	98,31	8.356.786.783,00	2.462.580.506,00	29,47
5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	-	4.500.000,00	-
6 Belanja Barang dan Jasa BOP	-	-	-	-	-	-
7 Belanja Barang dan Jasa BOS	-	-	-	-	-	-
8 Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	-	-	-	-
Jumlah	37.059.454.000,00	36.104.026.887,00	97,42	42.624.405.003,00	(6.520.378.116,00)	(15,30)

5.1.2.1.2.1. Belanja Barang

Rp6.231.722.510,00

Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp6.285.644.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.231.722.510,00 atau 99,14%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp8.926.777.952,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp2.695.055.442,00 atau 30,19% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Bahan Pakai Habis	6.285.644.000,00	6.231.722.510,00	99,14	8.926.777.952,00	(2.695.055.442,00)	(30,19)
2 Belanja Tak Habis Pakai	-	-	-	-	-	-
3 Belanja Barang Bekas Dipakai	-	-	-	-	-	-
Jumlah	6.285.644.000,00	6.231.722.510,00	99,14	8.926.777.952,00	(2.695.055.442,00)	(30,19)

Realisasi Belanja Barang **tidak mencapai target** dikarenakan adanya sisa hasil lelang realisasi Belanja Bahan Pakai Habis – Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH).

5.1.2.1.2.2. Belanja Jasa

Rp21.526.714.585,00

Belanja Jasa dianggarkan sebesar Rp24.609.391.000,00 dengan realisasi sebesar Rp21.526.714.585,00 atau 87,47%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp20.733.414.191,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp793.300.394,00 atau 3,83% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Jasa Kantor	16.665.686.000,00	16.008.019.718,00	96,05	20.959.139.330,00	(4.951.119.612,00)	(23,62)
2 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	325.550.000,00	299.218.726,00	91,91	275.629.255,00	23.589.471,00	8,56
3 Belanja Sewa Tanah	-	-	-	-	-	-
4 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	318.900.000,00	303.550.000,00	95,19	142.400.000,00	161.150.000,00	113,17
5 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	93.200.000,00	92.986.000,00	99,77	90.536.000,00	2.450.000,00	2,71
6 Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-	-	-
7 Belanja Sewa Alat Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
8 Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi	-	-	-	-	-	-
9 Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	-	-	-	-	-	-
10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-	-	-	-	-	-
11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-	-	-
12 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK	90.090.000,00	89.697.000,00	99,56	59.010.000,00	30.687.000,00	52,00
13 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-
14 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pendidikan	-	-	-	-	-	-
15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Jumlah	17.493.426.000,00	16.793.471.444,00	96,00	21.526.714.585,00	(4.733.243.141,00)	(21,99)

Realisasi Belanja Jasa Kantor **tidak mencapai target** dikarenakan efisiensi pembayaran honorarium narasumber pada Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan; penerapam penjadwalan jam pelajaran widyaiswara sehingga adanya efisiensi Belanja Jasa Tenaga Pendidikan; adanya efisiensi pembayaran honorarium tenaga kesenian pada Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan; adanya dinamika *turn over* pegawai pada Belanja Jasa Tenaga Administrasi; efisiensi pada Belanja Tagihan Telepon, Belanja Tagihan Air, dan Belanja Tagihan Listrik; dan adanya efisiensi efisiensi dan peralihan penyediaan surat menyurat secara digitalisasi pada Belanja Paket/Pengiriman.

Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi **tidak mencapai target** dikarenakan terdapat Larangan pengangkatan tenaga Non ASN baru untuk mengisi jabatan tenaga Non ASN yang lolos seleksi PPPK pada Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, dan Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN.

5.1.2.1.2.3. Belanja Pemeliharaan

Rp2.254.965.644,00

Belanja Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp2.270.420.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.254.965.644,00 atau 99,32%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.814.125.683,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp1.585.217.289,00 atau 41,56% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Pemeliharaan Tanah	-	-	-	-	-	-
2 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	948.920.000,00	947.313.521,00	99,83	1.014.673.037,00	(67.359.516,00)	(6,64)
3 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.140.000.000,00	1.130.132.963,00	99,13	2.577.097.041,00	(1.446.964.078,00)	(56,15)
4 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	128.000.000,00	127.961.910,00	99,97	197.355.605,00	(69.393.695,00)	(35,16)
5 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	23.500.000,00	23.500.000,00	100,00	25.000.000,00	(1.500.000,00)	(6,00)
6 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	30.000.000,00	26.057.250,00	86,86	-	26.057.250,00	-
Jumlah	2.270.420.000,00	2.254.965.644,00	99,32	3.814.125.683,00	(1.585.217.289,00)	(41,56)

Realisasi Belanja Pemeliharaan **tidak mencapai target** dikarenakan terdapat sisa kontrak pengadaan barang dan jasa pada Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software.

5.1.2.1.2.4. Belanja Perjalanan Dinas

Rp10.819.367.289,00

Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp11.005.464.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.819.367.289,00 atau 98,31%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp8.356.786.783,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.462.580.506,00 atau 73,88% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.005.464.000,00	10.819.367.289,00	98,31	8.356.786.783,00	2.462.580.506,00	29,47
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
Jumlah	11.005.464.000,00	8.356.786.783,00	93,39	4.806.130.670,00	3.550.656.113,00	73,88

5.1.2.1.2.5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Rp4.500.000,00

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dianggarkan sebesar Rp4.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.500.000,00 atau 100%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp4.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	-	4.500.000,00	-
2 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketigas/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	-	-	-
Jumlah	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	-	4.500.000,00	-

5.1.2.2 BELANJA MODAL

Rp1.140.913.800,00

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp1.177.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.140.913.800,00 atau 96,88%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.057.391.482,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp916.477.682,00 atau 44,55% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-
2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.162.600.000,00	1.126.015.000,00	96,85	2.042.405.150,00	(916.390.150,00)	(44,87)
3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-
4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	14.898.800,00	99,33	14.986.332,00	(87.532,00)	(0,58)
6 Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1.177.600.000,00	1.140.913.800,00	96,88	2.057.391.482,00	(916.477.682,00)	(44,55)

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rp1.126.015.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp1.162.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.126.015.000,00 atau 96,85%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.042.405.150,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp916.390.150,00 atau 44,87% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Modal Alat Besar	38.000.000,00	37.000.000,00	97,37	30.000.000,00	7.000.000,00	23,33
2 Belanja Modal Alat Bantu	580.000.000,00	553.400.000,00	95,41	633.000.000,00	(79.600.000,00)	(12,58)
3 Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	-	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(100,00)
4 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	-	-	-
5 Belanja Modal Alat Pertanian	106.600.000,00	105.400.000,00	98,87	204.050.000,00	(98.650.000,00)	(48,35)
6 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	438.000.000,00	430.215.000,00	98,22	341.155.150,00	89.059.850,00	26,11
7 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	-	-	-	-	-	-
8 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	-	-	-
9 Belanja Modal Alat Laboratorium	-	-	-	-	-	-
10 Belanja Modal Komputer	-	-	-	830.200.000,00	(830.200.000,00)	(100,00)
11 Belanja Modal Alat	-	-	-	-	-	-

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Eksplorasi						
12 Belanja Modal Alat Pengeboran	-	-	-	-	-	-
13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	-	-	-	-
14 Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-	-	-
15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-	-	-
16 Belanja Modal Alat Peraga	-	-	-	-	-	-
17 Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-	-	-
18 Belanja Modal Rambu-rambu	-	-	-	-	-	-
19 Belanja Modal Peralatan Olahraga	-	-	-	-	-	-
20 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	-	-	-	-	-	-
21 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1.162.600.000,00	1.126.015.000,00	96,85	2.042.405.150,00	(916.390.150,00)	(44,87)

5.1.2.2.2.1. Belanja Modal Alat Besar

Rp37.000.000,00

Belanja Modal Alat Besar dianggarkan sebesar Rp38.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp37.000.000,00 atau 97,37%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp30.000.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp7.000.000,00 atau 23,33% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Modal Alat Besar Darat	-	-	-	-	-	-
2 Belanja Modal Alat Besar Apung	-	-	-	-	-	-
3 Belanja Modal Alat Bantu	38.000.000,00	37.000.000,00	97,37	30.000.000,00	(7.000.000,00)	(23,33)
Jumlah	38.000.000,00	37.000.000,00	97,37	30.000.000,00	(7.000.000,00)	(23,33)

5.1.2.2.2.2. Belanja Modal Alat Angkutan

Rp553.400.000,00

Belanja Modal Alat Angkutan dianggarkan sebesar Rp580.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp553.400.000,00 atau 95,41%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp633.000.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp79.600.000,00 atau 12,58% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	580.000.000,00	553.400.000,00	95,41	579.000.000,00	(25.600.000,00)	(4,42)
2 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	-	54.000.000,00	(54.000.000,00)	(100,00)
3 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	-	-	-	-	-	-
4 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	-	-	-	-	-	-
5 Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara	-	-	-	-	-	-
Jumlah	580.000.000,00	553.400.000,00	95,41	633.000.000,00	(79.600.000,00)	(12,58)

5.1.2.2.2.5. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Rp204.050.000,00

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp207.900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp204.050.000,00 atau 98,15%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp204.050.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp111.801.276,00 atau 121,20% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Modal Alat Kantor	-	-	-	116.750.000,00	(116.750.000,00)	(100,00)
2 Belanja Modal Alat Rumah Tangga	106.600.000,00	105.400.000,00	98,87	87.300.000,00	18.100.000,00	20,73
3 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-	-	-	-
Jumlah	106.600.000,00	105.400.000,00	98,87	204.050.000,00	(98.650.000,00)	(48,35)

5.1.2.2.2.6. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar **Rp430.215.000,00**

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dianggarkan sebesar Rp438.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp430.215.000,00 atau 98,22%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp341.155.150,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp89.059.850,00 atau 26,11% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Modal Alat Studio	438.000.000,00	430.215.000,00	98,22	341.155.150,00	89.059.850,00	26,11
2 Belanja Modal Alat Komunikasi	-	-	-	-	-	-
3 Belanja Modal Peralatan Pemancar	-	-	-	-	-	-
4 Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	-	-	-	-	-	-
Jumlah	438.000.000,00	430.215.000,00	98,22	341.155.150,00	89.059.850,00	26,11

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya **Rp14.898.800,00**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp14.898.800,00 atau 99,33%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp14.986.332,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp87.532,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Modal Bahan Perpustakaan	15.000.000,00	14.898.800,00	99,33	14.986.332,00	(87.532,00)	(0,58)
2 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	-	-	-	-	-	-
3 Belanja Modal Hewan	-	-	-	-	-	-
4 Belanja Modal Biota Perairan	-	-	-	-	-	-
5 Belanja Modal Tanaman	-	-	-	-	-	-
6 Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	-	-	-
7 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	-	-	-
8 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-
9 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	-	-	-	-	-	-
10 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	-	-	-	-	-	-
Jumlah	15.000.000,00	14.898.800,00	99,33	14.986.332,00	(87.532,00)	(0,58)

5.1.2.2.5.1. Belanja Modal Bahan Perpustakaan **Rp14.898.800,00**

Belanja Modal Bahan Perpustakaan dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp14.898.800,00 atau 99,33%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp14.986.332,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp87.532,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	15.000.000,00	14.898.800,00	99,33	14.986.332,00	(87.532,00)	(0,58)
2 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	-	-	-	-	-	-
3 Belanja Modal Kartografi, Naskah, Dan Lukisan Lainnya	-	-	-	-	-	-

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
4 Belanja Modal Musik	-	-	-	-	-	-
5 Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material) Material Lainnya"	-	-	-	-	-	-
6 Belanja Modal Three Dimensional Artifacts and Realita	-	-	-	-	-	-
7 Belanja Modal Tarscalt	-	-	-	-	-	-
Jumlah	15.000.000,00	14.898.800,00	99,33	14.986.332,00	(87.532,00)	(0,58)

5.2. PENJELASAN POS - POS NERACA

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Struktur penyajian Neraca Tahun Anggaran 2024 dan 2023 mendasari Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Ringkasan Neraca dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.2.1. ASET

Rp155.611.042.881,05

Total Aset sebesar Rp155.611.042.881,05 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp155.524.413.375,19 mengalami **kenaikan** sebesar Rp86.629.505,86 atau 0,06%. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Aset Lancar	408.587.045,70	176.737.529,02
2 Investasi Jangka Panjang	-	-
3 Aset Tetap	154.898.308.097,85	155.063.071.046,17
4 Dana Cadangan	-	-
5 Aset Lainnya	304.147.737,50	284.604.800,00
6 Properti Investasi	-	-
Jumlah	155.611.042.881,05	155.524.413.375,19

5.2.1.1 ASET LANCAR

Rp408.587.045,70

Aset Lancar sebesar Rp408.587.045,70 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp176.737.529,02 mengalami **kenaikan** sebesar Rp231.849.516,68 atau 131,18% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Kas dan Setara Kas	-	-
2 Investasi Jangka Pendek	-	-
3 Piutang Pajak Daerah	-	-
4 Piutang Retribusi Daerah	-	-
5 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
6 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	-	-
7 Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
8 Piutang Transfer Antar Daerah	-	-
9 Piutang Lainnya	-	-
10 Penyisihan Piutang	-	-
11 Beban Dibayar Dimuka	12.589.671,70	10.860.009,02
12 Persediaan	395.997.374,00	165.877.520,00
Jumlah	408.587.045,70	176.737.529,02

5.2.1.1.11. Beban Dibayar Dimuka

Rp12.589.671,70

Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp12.589.671,70 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar

Rp10.860.009,02, mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.729.662,68 atau 15,93% dengan rincian sebagai berikut:

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Beban Dibayar Dimuka	-	10.860.009,02
2 Beban Dibayar Dimuka-Sewa	-	-
3 Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah	12.589.671,70	-
Jumlah	12.589.671,70	10.860.009,02

5.2.1.1.11.3. Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah **Rp12.589.671,70**

Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp12.589.671,70 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp12.589.671,70 dengan rincian sebagai berikut:

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Tanah	-	-
2 Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Peralatan dan Mesin	4.515.258,84	-
3 Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Gedung dan Bangunan	8.074.412,86	-
Jumlah	12.589.671,70	-

5.2.1.1.12 Persediaan **Rp395.997.374,00**

Persediaan sebesar Rp395.997.374,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp165.877.520,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp230.119.854,00 atau 138,73% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Barang Pakai Habis	395.997.374,00	165.877.520,00
2 Barang Tak Habis Pakai	-	-
3 Barang Bekas Dipakai	-	-
Jumlah	395.997.374,00	165.877.520,00

CATATAN :

- pada lampiran dicantumkan Berita Acara Stock Opname Akhir Tahun dan perhitungan persediaan sebagai berikut :

No	Kode Barang	Nama/Jenis Persediaan	Jumlah	Nilai Persediaan (Rp)
1	1.1.7.01.01	Bahan	7.761	320.775.000,00
2	1.1.7.01.03	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	3.616	71.465.874,00
3	1.1.7.01.04	Obat-obatan	426	3.756.500,00
Jumlah			11.803	395.997.374,00

5.2.1.1.12.1 Barang Pakai Habis **Rp395.997.374,00**

Barang Pakai Habis sebesar Rp395.997.374,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp165.877.520,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp230.119.854,00 atau 138,73% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Bahan	320.775.000,00	79.425.000,00
2 Suku Cadang	-	-
3 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	71.465.874,00	82.689.780,00
4 Obat-Obatan	3.756.500,00	3.762.740,00
5 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	-	-
6 Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	-	-
7 Natura dan Pakan	-	-
Jumlah	395.997.374,00	165.877.520,00

5.2.1.1.12.1.1 Bahan **Rp320.775.000,00**

Bahan sebesar Rp320.775.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp79.425.000,00 mengalami

kenaikan sebesar Rp241.350.000,00 atau 303,87% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	-
2 Bahan Kimia	-	-
3 Bahan Peledak	-	-
4 Bahan Bakar dan Pelumas	320.775.000,00	79.425.000,00
5 Bahan Baku	-	-
6 Bahan Kimia Nuklir	-	-
7 Barang Dalam Proses	-	-
8 Bahan/Bibit Tanaman	-	-
9 Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-
10 Isi Tabung Gas	-	-
11 Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-	-
12 Bahan Lainnya	-	-
Jumlah	320.775.000,00	79.425.000,00

5.2.1.1.12.1.3 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Rp71.465.874,00

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp71.465.874,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp82.689.780,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp11.223.906,00 atau 13,57% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Alat Tulis Kantor	21.607.874,00	46.364.078,00
2 Kertas dan Cover	627.000,00	-
3 Bahan Cetak	-	-
4 Benda Pos	-	-
5 Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	-
6 Bahan Komputer	236.000,00	-
7 Perabot Kantor	32.625.000,00	-
8 Alat Listrik	15.720.000,00	35.240.702,00
9 Perlengkapan Dinas	-	-
10 Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	-	-
11 Perlengkapan Pendukung Olahraga	-	-
12 Suvenir/Cendera Mata	-	-
13 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	650.000,00	1.085.000,00
Jumlah	71.465.874,00	82.689.780,00

5.2.1.1.12.1.4 Obat-Obatan Rp3.756.500,00

Obat-Obatan sebesar Rp3.756.500,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.762.740,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp6.240,00 atau 0,17% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Obat	3.756.500,00	3.762.740,00
2 Obat-obatan Lainnya	-	-
Jumlah	3.756.500,00	3.762.740,00

5.2.1.3 ASET TETAP Rp154.898.308.097,85

Aset Tetap sebesar Rp154.898.308.097,85 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp155.063.071.046,17 mengalami **penurunan** sebesar Rp164.762.948,32 atau 0,11% dengan rincian sebagai berikut:

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Tanah	124.074.000.000,00	124.074.000.000,00
2 Peralatan dan Mesin	41.809.017.490,00	38.288.031.012,00
3 Gedung dan Bangunan	59.242.943.633,00	59.242.943.633,00
4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.354.362.050,00	3.354.362.050,00
5 Aset Tetap Lainnya	723.985.932,00	709.087.132,00
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
7 Akumulasi Penyusutan	(74.306.001.007,15)	(70.605.352.780,83)
8 Aset Konsesi Jasa	-	-
9 Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	-	-
Jumlah	154.898.308.097,85	155.063.071.046,17

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :

Saldo Awal	Rp225.668.423.827,00
Penambahan	
Belanja Modal	Rp1.140.913.800,00
Belanja Barang/Jasa	Rp,00
Hibah	Rp2.439.571.478
Mutasi Masuk	Rp,00
Reklasifikasi Masuk Antar Aset Tetap	Rp,00
Reklasifikasi Masuk Ke Aset Lainnya	Rp,00
Koreksi	Rp,00
Jumlah	Rp3.580.485.278,00
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp,00
Reklasifikasi Keluar Antar Aset Tetap	Rp,00
Reklasifikasi Keluar Ke Aset Lainnya	Rp44.600.000,00
Mutasi Keluar	Rp,00
Koreksi	Rp,00
Jumlah	Rp44.600.000,00
Grand Total	Rp229.204.309.105,00

Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :

- Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun 2024.
- Belanja Barang/Jasa adalah kapitalisasi realisasi belanja barang/jasa yang dapat menambah nilai Aset Tetap selama Tahun 2024 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- Hibah adalah aset tetap yang diterima dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Mutasi Masuk adalah perpindahan aset antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2024.
- Reklasifikasi Masuk Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- Reklasifikasi Masuk Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset lainnya ke aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- Koreksi/penilaian adalah salah catat atau penambahan nilai atas aset tetap.

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :

- Ekstrakomtable adalah aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang atau kategori aset tetap dikarenakan nilai satuan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi aset tetap sesuai Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- Reklasifikasi Keluar Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- Reklasifikasi Kurang Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset tetap ke aset lainnya karena dikategorikan sebagai barang rusak berat, aset dikerjasamakan dan Aset Tak Berwujud.
- Hibah adalah aset yang diberikan kepada Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- Mutasi keluar adalah perpindahan aset tetap antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2024.
- Koreksi adalah salah catat atau pengurangan nilai atas aset tetap.

BPSDMD menerima hibah aset tetap dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp2.439.571.478,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Barang	Nama/Jenis Persediaan	Jumlah	Nilai Persediaan (Rp)
1	1.3.2.05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	216	1.407.729.095
2	1.3.2.06	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar	11	97.146.093
3	1.3.2.08	Alat Laboratorium	15	79.407.450
4	1.3.2.09	Alat Persenjataan	106	551.077.358
5	1.3.2.10	Alat Komputer	58	304.211.482
Jumlah			406	2.439.571.478

Untuk rincian barang sebagai berikut :

No	Kode Barang	Nama/Jenis Persediaan	Jumlah		Nilai Persediaan (Rp)
1	1.3.2.05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga		216	1.407.729.095
		Chamber Disinfektan	3		83.768.844
		Camera Indoor DS-2CD1121-I	44		230.392.624
		Camera Outdoor DS-2CD1023G0E-I	3		15.695.421
		TV LED 32"	8		60.492.504
		Tempat Cuci Tangan (Kran dan Dispenser Sabun Otomatis)	15		96.217.185
		Mesin Penyemprot Disinfektan (Cleaner 235 Bar HP Gas)	1		22.577.823
		Tempat Sampah Beroda kap. 660 Ltr Warna Kuning	30		286.473.750
		NVR 8 Port	8		48.005.032
		POE switch DS-3E0109P	32		173.802.912
		Speaker Z 5050M	6		29.865.054
		Speaker ZS 062	55		239.031.595
		Mesin Fogging	4		86.735.400
		Tiang Antrian	7		34.670.951
2	1.3.2.06	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar		11	97.146.093
		Amplifier ZA-2120	11		97.146.093
3	1.3.2.08	Alat Laboratorium		15	79.407.450
		Penyemprot Cairan Disinfektan (Gendong)	15		79.407.450
4	1.3.2.09	Alat Persenjataan		106	551.077.358
		Road Barrier	106		551.077.358
5	1.3.2.10	Alat Komputer		58	304.211.482
		Acces Point EAP 110	50		261.182.450
		Harddisk 2 TB	8		43.029.032
Jumlah			406		2.439.571.478

5.2.1.3.1 Tanah

Rp124.074.000.000,00

Tanah sebesar Rp124.074.000.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp124.074.000.000,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Tanah Persil	124.074.000.000,00	124.074.000.000,00
2 Tanah Non Persil	-	-
3 Lapangan	-	-
Jumlah	124.074.000.000,00	124.074.000.000,00

Rincian mutasi tanah terdiri dari :

Saldo Awal	Rp124.074.000.000,00
Penambahan	
Belanja Modal	Rp0,00
Belanja Barang/Jasa	Rp0,00
Hibah	Rp0,00
Mutasi Masuk	Rp0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp0,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp0,00
Koreksi	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00
Berkurang	
Ekstrakomtabel	Rp0,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp0,00
Mutasi Keluar	Rp0,00
Koreksi	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00
Grand Total	Rp124.074.000.000,00

5.2.1.3.2.1. Tanah Persil **Rp124.074.000.000,00**

Tanah Persil sebesar Rp124.074.000.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp124.074.000.000,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	-	-
2 Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	-	-
3 Tanah untuk Bangunan Industri	-	-
4 Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	124.074.000.000,00	124.074.000.000,00
5 Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	-	-
6 Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	-	-
7 Tanah Persil Lainnya	-	-
Jumlah	124.074.000.000,00	124.074.000.000,00

5.2.1.3.2 Peralatan dan Mesin **Rp41.809.017.490,00**

Peralatan dan Mesin sebesar Rp41.809.017.490,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp38.288.031.012,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.520.986.478,00 atau 9,20% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Alat Besar	2.682.706.986,00	2.645.706.986,00
2 Alat Angkutan	3.936.829.838,00	3.428.029.838,00
3 Alat Bengkel dan Ukur	15.328.500,00	15.328.500,00
4 Alat Pertanian	15.800.000,00	15.800.000,00
5 Alat Kantor dan Rumah Tangga	22.891.010.665,00	21.060.291.570,00
6 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.209.355.291,00	4.028.549.198,00
7 Alat Kedokteran dan Kesehatan	249.576.000,00	249.576.000,00
8 Alat Laboratorium	606.705.050,00	527.297.600,00
9 Alat Persenjataan	551.077.358,00	-
10 Komputer	6.341.358.082,00	6.008.181.600,00
11 Alat Eksplorasi	-	-
12 Alat Pengeboran	-	-

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
13 Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurniaan	-	-
14 Alat Bantu Eksplorasi	-	-
15 Alat Keselamatan Kerja	-	-
16 Alat Peraga	-	-
17 Peralatan Proses/Produksi	-	-
18 Rambu-Rambu	35.310.000,00	35.310.000,00
19 Peralatan Olahraga	273.959.720,00	273.959.720,00
Jumlah	41.809.017.490,00	38.288.031.012,00

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari :

Saldo Awal Rp38.288.031.012,00

Penambahan

Belanja Modal Rp1.126.015.000,00

Belanja Barang/Jasa Rp,00

Hibah Rp2.439.571.478,00

Mutasi Masuk Rp,00

Reklasifikasi Masuk Antar Aset Tetap Rp,00

Reklasifikasi Masuk Ke Aset Lainnya Rp,00

Koreksi Rp,00

Jumlah Rp3.565.586.478,00

Berkurang

Ekstrakomtabel Rp,00

Reklasifikasi Keluar Antar Aset Tetap Rp,00

Reklasifikasi Keluar Ke Aset Lainnya Rp44.600.000,00

Mutasi Keluar Rp,00

Koreksi Rp,00

Jumlah Rp44.600.000,00

Grand Total Rp41.809.017.490,00

Penambahan Peralatan dan Mesin berasal dari realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun 2024 berupa :

No	Nama Aset	Nilai Aset (Rp)
1.	Pompa	37.000.000
2.	Kendaraan Bermotor Penumpang	553.400.000
3.	Alat Kantor Lainnya	254.380.000
4.	Alat Pendingin	105.400.000
5.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	63.210.000
6.	Peralatan Studio Audio	83.660.000
7.	Peralatan Mainframe	6.970.000
8.	Peralatan Mini Komputer	21.995.000
	Jumlah	1.126.015.000

5.2.1.3.2.1. Alat Besar Rp2.682.706.986,00

Alat Besar sebesar Rp2.682.706.986,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.645.706.986,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 37.000.000,00 atau 1,40% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Alat Besar Darat	-	-
2 Alat Besar Apung	-	-
3 Alat Bantu	2.682.706.986,00	2.645.706.986,00
Jumlah	2.682.706.986,00	2.645.706.986,00

5.2.1.3.2.2. Alat Angkutan

Rp3.936.829.838,00

Alat Angkutan sebesar Rp3.428.029.838,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.428.029.838,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 580.800.000,00 atau 14,84% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Alat Angkutan Darat Bermotor	3.882.829.838,00	3.329.429.838,00
2 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	54.000.000,00	98.600.000,00
3 Alat Angkutan Apung Bermotor	-	-
4 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	-	-
5 Alat Angkutan Bermotor Udara	-	-
Jumlah	3.936.829.838,00	3.428.029.838,00

5.2.1.3.2.3. Alat Bengkel dan Ukur

Rp15.328.500,00

Alat Bengkel dan Ukur sebesar Rp15.328.500,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp15.328.500,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Alat Bengkel Bermesin	12.331.500,00	12.331.500,00
2 Alat Bengkel Tak Bermesin	2.997.000,00	2.997.000,00
3 Alat Ukur	-	-
Jumlah	15.328.500,00	15.328.500,00

5.2.1.3.2.4. Alat Pertanian

Rp15.800.000,00

Alat Pertanian sebesar Rp15.800.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp15.800.000,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Alat Pengolahan	15.800.000,00	15.800.000,00
Jumlah	15.800.000,00	15.800.000,00

5.2.1.3.2.5. Alat Kantor dan Rumah Tangga

Rp22.891.010.665,00

Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp22.891.010.665,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp21.060.291.570,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.830.719.095,00 atau 8,69% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Alat Kantor	3.168.701.833,00	2.224.211.002,00
2 Alat Rumah Tangga	19.460.792.832,00	18.574.564.568,00
3 Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	261.516.000,00	261.516.000,00
Jumlah	22.891.010.665,00	21.060.291.570,00

5.2.1.3.2.6. Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Rp4.209.355.291,00

Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp 4.209.355.291,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.028.549.198,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp180.806.093,00 atau 4,49% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Alat Studio	3.624.854.281,00	3.444.048.188,00
2 Alat Komunikasi	571.901.010,00	571.901.010,00
3 Peralatan Pemancar	12.600.000,00	12.600.000,00
4 Peralatan Komunikasi Navigasi	-	-
Jumlah	4.209.355.291,00	4.028.549.198,00

5.2.1.3.2.7. Alat Kedokteran dan Kesehatan

Rp249.576.000,00

Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp249.576.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp249.576.000,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Alat Kedokteran	145.075.000,00	145.075.000,00
2 Alat Kesehatan Umum	104.501.000,00	104.501.000,00
Jumlah	249.576.000,00	249.576.000,00

5.2.1.3.2.8. Alat Laboratorium

Rp606.705.050,00

Alat Laboratorium sebesar Rp606.705.050,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp527.297.600,00 tidak mengalami **kenaikan** sebesar Rp79.407.450,00 atau 15,06% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Unit Alat Laboratorium	606.705.050,00	527.297.600,00
2 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	-	-
3 Alat Peraga Praktik Sekolah	-	-
4 Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	-	-
5 Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	-	-
6 Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory	-	-
6 Lainnya	-	-
7 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	-	-
8 Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	-	-
9 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	-	-
Jumlah	606.705.050,00	527.297.600,00

5.2.1.3.2.9. Alat Persenjataan

Rp551.077.358,00

Komputer sebesar Rp551.077.358,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp551.077.358,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Senjata Api	-	-
2 Senjata Non Senjata Api	551.077.358,00	-
3 Senjata Sinar	-	-
4 Alat Khusus Kepolisian	-	-
Jumlah	551.077.358,00	-

5.2.1.3.2.10. Komputer

Rp6.341.358.082,00

Komputer sebesar Rp6.341.358.082,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.008.181.600,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp333.176.482,00 atau 5,55% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Komputer Unit	4.378.857.800,00	4.378.857.800,00
2 Peralatan Komputer	1.962.500.282,00	1.629.323.800,00
Jumlah	6.341.358.082,00	6.008.181.600,00

5.2.1.3.2.18. Rambu-Rambu

Rp35.310.000,00

Rambu-Rambu sebesar Rp35.310.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp35.310.000,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	35.310.000,00	35.310.000,00
2 Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	-	-
3 Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	-	-
Jumlah	35.310.000,00	35.310.000,00

5.2.1.3.2.19. Peralatan Olahraga

Rp273.959.720,00

Peralatan Olahraga sebesar Rp273.959.720,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp273.959.720,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Peralatan Olahraga	273.959.720,00	273.959.720,00
Jumlah	273.959.720,00	273.959.720,00

5.2.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Rp59.242.943.633,00

Gedung dan Bangunan sebesar Rp59.242.943.633,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp59.242.943.633,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut:

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Bangunan Gedung	57.531.473.483,00	57.531.473.483,00
2 Monumen	-	-
3 Bangunan Menara	-	-
4 Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.711.470.150,00	1.711.470.150,00
Jumlah	59.242.943.633,00	59.242.943.633,00

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari :

Saldo Awal Rp59.242.943.633,00

Penambahan

Belanja Modal Rp0,00
 Belanja Barang/Jasa Rp0,00
 Hibah Rp0,00
 Mutasi Masuk Rp0,00
 Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp0,00
 Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp0,00
 Koreksi Rp0,00
Jumlah Rp59.242.943.633,00

Berkurang

Ekstrakomtabel Rp0,00
 Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp0,00
 Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp0,00
 Mutasi Keluar Rp0,00
 Koreksi Rp0,00
Jumlah Rp0,00

Grand Total Rp59.242.943.633,00

5.2.1.3.3.1. Bangunan Gedung

Rp57.531.473.483,00

Bangunan Gedung sebesar Rp57.531.473.483,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp57.531.473.483,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut:

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Bangunan Gedung Tempat Kerja	34.021.475.783,00	34.021.475.783,00
2 Bangunan Gedung Tempat Tinggal	23.509.997.700,00	23.509.997.700,00
Jumlah	57.531.473.483,00	57.531.473.483,00

5.2.1.3.4.1. Tugu Titik Kontrol/Pasti

Rp1.711.470.150,00

Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp1.711.470.150,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.711.470.150,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Tugu/Tanda Batas	1.711.470.150,00	1.711.470.150,00
Jumlah	1.711.470.150,00	1.711.470.150,00

5.2.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Rp3.354.362.050,00

Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp3.354.362.050,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.354.362.050,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Jalan dan Jembatan	2.302.885.500,00	2.302.885.500,00
2 Bangunan Air	-	93.269.000,00
3 Instalasi	855.544.550,00	762.275.550,00
4 Jaringan	195.932.000,00	195.932.000,00
Jumlah	3.354.362.050,00	3.354.362.050,00

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari :

Saldo Awal Rp3.354.362.050,00

Penambahan

Belanja Modal Rp0,00

Belanja Barang/Jasa Rp0,00

Hibah Rp0,00

Mutasi Masuk Rp0,00

Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp0,00

Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp0,00

Koreksi Rp0,00

Jumlah Rp0,00

Berkurang

Ekstrakomtabel Rp0,00

Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp0,00

Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp0,00

Mutasi Keluar Rp0,00

Koreksi Rp0,00

Jumlah Rp0,00

Grand Total

Rp3.354.362.050,00

5.2.1.3.7.4. Jalan dan Jembatan

Rp2.302.885.500,00

Jalan dan Jembatan sebesar Rp2.302.885.500,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.302.885.500,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Jalan	2.302.885.500,00	2.302.885.500,00
2 Jembatan	-	-
Jumlah	2.302.885.500,00	2.302.885.500,00

5.2.1.3.5.1. Instalasi

Rp855.544.550,00

Instalasi sebesar Rp855.544.550,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp855.544.550,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Instalasi Air Bersih/Air Baku	93.269.000,00	93.269.000,00
2 Instalasi Air Kotor	-	-
3 Instalasi Pengolahan Sampah	-	-
4 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	-	-
5 Instalasi Pembangkit Listrik	-	-
6 Instalasi Gardu Listrik	762.275.550,00	762.275.550,00
7 Instalasi Pertahanan	-	-
8 Instalasi Gas	-	-
9 Instalasi Pengaman	-	-
10 Instalasi Lain	-	-
Jumlah	855.544.550,00	855.544.550,00

5.2.1.3.5.2. Jaringan

Rp195.932.000,00

Jaringan sebesar Rp195.932.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp195.932.000,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Jaringan Air Minum	-	-
2 Jaringan Listrik	181.247.000,00	181.247.000,00
3 Jaringan Telepon	14.685.000,00	14.685.000,00
4 Jaringan Gas	-	-
Jumlah	195.932.000,00	195.932.000,00

5.2.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Rp723.985.932,00

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp723.985.932,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp709.087.132,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp14.898.800,00 atau 2,10% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Bahan Perpustakaan	516.726.482,00	501.827.682,00
2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	164.956.250,00	164.956.250,00
3 Hewan	-	-
4 Biota Perairan	-	-
5 Tanaman	42.303.200,00	42.303.200,00
6 Barang Koleksi Non Budaya	-	-
7 Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-
Jumlah	723.985.932,00	709.087.132,00

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari :

Saldo Awal	Rp709.087.132,00
Penambahan	
Belanja Modal	Rp14.898.800,00
Belanja Barang/Jasa	Rp0,00
Hibah	Rp0,00
Mutasi Masuk	Rp0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp0,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp0,00
Koreksi	Rp0,00
Jumlah	Rp14.898.800,00
Berkurang	
Ekstrakomtabel	Rp0,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp0,00

Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp0,00
Mutasi Keluar	Rp0,00
Koreksi	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00

Grand Total **Rp723.985.932,00**

5.2.1.3.5.1. Bahan Perpustakaan **Rp516.726.482,00**

Bahan Perpustakaan sebesar Rp516.726.482,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp501.827.682,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp14.898.800,00 atau 2,97% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Bahan Perpustakaan Tercetak	516.726.482,00	501.827.682,00
2 Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	-	-
3 Kartografi, Naskah dan Lukisan	-	-
4 Musik	-	-
5 Karya Grafika (Graphic Material)	-	-
6 Three Dimensional Artifacts and Realita	-	-
7 Tarscalt	-	-
Jumlah	516.726.482,00	501.827.682,00

5.2.1.3.5.2. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga **Rp164.956.250,00**

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp164.956.250,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp164.956.250,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Barang Bercorak Kesenian	128.816.250,00	128.816.250,00
2 Alat Bercorak Kebudayaan	36.140.000,00	36.140.000,00
3 Tanda Penghargaan	-	-
Jumlah	164.956.250,00	164.956.250,00

5.2.1.3.5. Tanaman **Rp42.303.200,00**

Tanaman sebesar Rp42.303.200,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp42.303.200,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Tanaman	42.303.200,00	42.303.200,00
Jumlah	42.303.200,00	42.303.200,00

5.2.1.3.7. Akumulasi Penyusutan **Rp74.306.001.007,15**

Akumulasi Penyusutan sebesar Rp74.306.001.007,15 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp70.605.352.780,83 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.700.648.226,32 atau 5,24% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 5	(36.335.112.403,78)	(33.790.364.578,38)
2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(35.317.422.711,70)	(34.188.708.841,20)
3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(2.653.465.891,67)	(2.626.279.361,25)
4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
Jumlah	(74.306.001.007,15)	(70.605.352.780,83)

5.2.1.3.7.1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Rp36.335.112.403,78

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp36.335.112.403,78 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp33.790.364.578,38 mengalami **penurunan** sebesar Rp2.544.747.825,40 atau 7,53% dengan rincian sebagai berikut:

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(2.454.025.477,15)	(2.329.457.145,56)
2 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(2.742.334.004,67)	(2.665.447.963,00)
3 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(11.023.650,00)	(9.191.100,00)
4 Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(15.800.000,00)	(15.800.000,00)
5 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(20.384.270.481,74)	(19.048.243.807,64)
6 Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(3.875.289.913,42)	(3.730.034.571,33)
7 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(235.115.250,00)	(223.085.050,00)
8 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(540.481.498,40)	(517.304.100,00)
9 Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(287.019.457,38)	-
10 Akumulasi Penyusutan Komputer	(5.489.310.451,02)	(4.955.772.370,85)
11 Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi	-	-
12 Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran	-	-
13 Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-
14 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	-	-
15 Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	-	-
16 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga	-	-
17 Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	-	-
18 Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu	(26.482.500,00)	(22.068.750,00)
19 Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(273.959.720,00)	(273.959.720,00)
Jumlah	(36.335.112.403,78)	(33.790.364.578,38)

5.2.1.3.7.1.1. Akumulasi Penyusutan Alat Besar

Rp2.454.025.477,15

Akumulasi Penyusutan Alat Besar sebesar Rp2.454.025.477,15 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.329.457.145,56 mengalami **kenaikan** sebesar Rp124.568.331,59 atau 5,35% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor	-	-
2 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Grader	-	-
3 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- Excavator	-	-
4 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Pile Driver	-	-
5 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Hauler	-	-
6 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	-	-
7 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- Compacting Equipment	-	-
8 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- Aggregate and Concrete Equipment	-	-
9 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Loader	-	-
10 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	-	-
11 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses	-	-
12 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	-	-
13 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Dreger	-	-
14 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung- Floating Excavator	-	-
15 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung- Amphibi Dredger	-	-
16 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Kapal Tarik	-	-
17 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Mesin	-	-
18 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	-	-
19 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Penarik	-	-
20 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Feeder	-	-
21 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Compressor	-	-
22 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(2.155.597.320,00)	(2.061.908.560,00)
23 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(298.428.157,15)	(267.548.585,56)
24 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor	-	-
25 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	-	-
26 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	-	-
27 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	-	-

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
28 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan	-	-
29 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Tato	-	-
30 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan	-	-
31 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Selam	-	-
32 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering	-	-
33 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Intelijen	-	-
34 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	-	-
Jumlah	(2.454.025.477,15)	(2.329.457.145,56)

5.2.1.3.7.1.2. Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan

Rp2.742.334.004,67

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan sebesar Rp2.742.334.004,67 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.665.447.963,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp76.886.041,67 atau 2,88% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(297.970.000,00)	(297.970.000,00)
2 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(2.031.040.004,67)	(1.947.135.838,00)
3 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(192.725.000,00)	(172.475.000,00)
4 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(153.836.000,00)	(153.836.000,00)
5 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	(51.013.000,00)	(47.181.125,00)
6 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat	-	-
7 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur	-	-
8 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel	-	-
9 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	-	-
10 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	-	(44.600.000,00)
11 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak	(15.750.000,00)	(2.250.000,00)
12 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	-	-
13 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	-	-
14 Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	-	-
15 Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	-	-
16 Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	-	-
17 Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer	-	-
18 Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	-	-
19 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang	-	-
20 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	-	-
21 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	-	-
22 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	-	-
23 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang	-	-
24 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	-	-
Jumlah	(2.742.334.004,67)	(2.665.447.963,00)

5.2.1.3.7.1.3. Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Ukur

Rp11.023.650,00

Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Ukur sebesar Rp11.023.650,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9.191.100,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.832.550,00 atau 19,94% dengan rincian sebagai berikut:

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada	-	-
2 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	-	-
3 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Listrik	-	-
4 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Service	(2.730.000,00)	(2.340.000,00)
5 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Pengangkat Bermesin	-	-
6 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Kayu	(6.745.200,00)	(5.902.050,00)
7 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Khusus	-	-
8 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Peralatan Las	-	-
9 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Pabrik Es	-	-
10 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Alat Bengkel Bermesin Lainnya	-	-
11 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	-	-
12 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	-	-
13 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service	-	-
14 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat	-	-
15 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	(1.548.450,00)	(949.050,00)
16 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)	-	-
17 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	-	-
18 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi	-	-
19 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	-	-
20 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	-	-
21 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	-	-
22 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam	-	-
23 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	-	-
24 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	-	-
25 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Test Inteligensia	-	-
26 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Test Alat Kepribadian	-	-
27 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain	-	-
28 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Kalibrasi	-	-
29 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Oscilloscope	-	-
30 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester	-	-
31 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	-	-
32 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	-	-
33 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	-	-
34 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Anak	-	-
35 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Takaran Kering	-	-
36 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan	-	-
37 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Takaran Lainnya	-	-
38 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	-	-
39 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Specific Set	-	-
40 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam	-	-

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
41 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan	-	-
42 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu	-	-
43 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Instrument Workshop	-	-
44 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	-	-
Jumlah	(11.023.650,00)	(9.191.100,00)

5.2.1.3.7.1.4. Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian

Rp15.800.000,00

Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian sebesar Rp15.800.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp15.800.000,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	(11.300.000,00)	(11.300.000,00)
2 Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	(4.500.000,00)	(4.500.000,00)
3 Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Panen	-	-
4 Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	-	-
5 Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	-	-
6 Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Processing	-	-
7 Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen	-	-
8 Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	-	-
9 Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	-	-
10 Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	-	-
Jumlah	(15.800.000,00)	(15.800.000,00)

5.2.1.3.7.1.5. Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga

Rp20.384.270.481,74

Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp20.384.270.481,74 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp19.048.243.807,64 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.336.026.674,10 atau 7,01% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(8.400.000,00)	(8.400.000,00)
2 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(164.475.000,00)	(164.475.000,00)
3 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	-	-
4 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(721.998.275,64)	(576.344.213,24)
5 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(1.436.718.968,23)	(1.144.326.983,53)
6 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Meubelair	(5.534.154.275,86)	(5.495.586.529,30)
7 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	(12.000.000,00)	(11.250.000,00)
8 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat	(165.631.818,15)	(146.930.047,10)
9 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(4.831.929.328,37)	(4.799.066.795,00)
10 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(40.670.493,70)	(580.000,00)
11 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(7.109.936.310,79)	(6.354.731.228,47)
12 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(96.840.011,00)	(85.037.011,00)
13 Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(84.320.000,00)	(84.320.000,00)
14 Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(52.250.000,00)	(52.250.000,00)
15 Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(59.182.000,00)	(59.182.000,00)
16 Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	(17.106.000,00)	(17.106.000,00)
17 Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	(5.625.000,00)	(5.625.000,00)
18 Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangannya	(17.000.000,00)	(17.000.000,00)
19 Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(26.033.000,00)	(26.033.000,00)
Jumlah	(20.384.270.481,74)	(19.048.243.807,64)

5.2.1.3.7.1.6. Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp3.875.289.913,42

Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp3.875.289.913,42 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.730.034.571,33 mengalami **kenaikan** sebesar Rp145.255.342,09 atau 3,89% dengan rincian sebagai berikut:

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(2.849.757.121,75)	(2.720.169.809,66)
2 Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(441.031.781,67)	(426.623.751,67)
3 Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	-	-
4 Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	-	-
5 Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	-	-
6 Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	-	-
7 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(571.901.010,00)	(571.901.010,00)
8 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	-	-
9 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	-	-
10 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	-	-
11 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	-	-
12 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	-	-
13 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat- Alat Sandi	-	-
14 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus	-	-
15 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	-	-
16 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat	-	-
17 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	-	-
18 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar MF/MW	-	-
19 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar HF/SW	-	-
20 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar VHF/FM	-	-
21 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar UHF	-	-
22 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar SHF	-	-
23 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena MF/MW	-	-
24 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena HF/SW	-	-
25 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena VHF/FM	-	-
26 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena UHF	-	-
27 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena SHF/Parabola	(12.600.000,00)	(11.340.000,00)
28 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Translator VHF/VHF	-	-
29 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Translator UHF/UHF	-	-
30 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Translator VHF/UHF	-	-
31 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Translator UHF/VHF	-	-
32 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Microwave FPU	-	-
33 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Microwave Terrestrial	-	-
34 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Microwave TVRO	-	-
35 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Dummy Load	-	-
36 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Switcher Antena	-	-
37 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Switcher/Menara Antena	-	-
38 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Feeder	-	-
39 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Humidity Control	-	-
40 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Program Input Equipment	-	-
41 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Penerima VHF	-	-
42 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar LF	-	-
43 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF	-	-
44 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar MF+HF	-	-
45 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima	-	-
46 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima LF	-	-
47 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan	-	-

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Penerima MF		
48 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima HF	-	-
49 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF	-	-
50 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima VHF	-	-
51 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima UHF	-	-
52 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima SHF	-	-
53 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF	-	-
54 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF	-	-
55 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF	-	-
56 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF	-	-
57 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF	-	-
58 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF	-	-
59 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF	-	-
60 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah	-	-
61 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi	-	-
62 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan	-	-
63 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Perlengkapan Radio	-	-
64 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Sumber Tenaga	-	-
65 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar Lainnya	-	-
66 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System	-	-
67 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Very High Frequence Omni Range (VOR)	-	-
68 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Distance Measuring Equipment (DME)	-	-
69 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar	-	-
70 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi	-	-
71 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	-	-
72 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	-	-
Jumlah	(3.875.289.913,42)	(3.730.034.571,33)

5.2.1.3.7.1.7. Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan

Rp235.115.250,00

Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp235.115.250,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp223.085.050,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp12.030.200,00 atau 5,39% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(126.475.000,00)	(126.475.000,00)
2 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	-	-
3 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana	-	-
4 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	-	-
5 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	(2.250.000,00)	(2.250.000,00)
6 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT	-	-
7 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	-	-

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
8 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	(16.350.000,00)	(16.350.000,00)
9 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	-	-
10 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	-	-
11 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik	-	-
12 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	-	-
13 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	-	-
14 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung	-	-
15 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	-	-
16 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi Anatomy	-	-
17 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah	-	-
18 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi	-	-
19 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir	-	-
20 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	-	-
21 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	-	-
22 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa	-	-
23 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	-	-
24 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU	-	-
25 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU	-	-
26 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung	-	-
27 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Traditional Medicine	-	-
28 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi	-	-
29 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat	-	-
30 Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Matra Laut	-	-
31 Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Matra Udara	-	-
32 Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Kepolisian	-	-
33 Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Olahraga	(44.350.000,00)	(44.350.000,00)
34 Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Umum Lainnya	(45.690.250,00)	(33.660.050,00)
Jumlah	(235.115.250,00)	(223.085.050,00)

5.2.1.3.7.1.8. Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium

Rp540.481.498,40

Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium sebesar Rp540.481.498,40 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp517.304.100,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp23.177.398,40 atau 4,48% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	-	-
2 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mikrobiologi Teknik Penyehatan	-	-
3 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Hidrokimia	-	-
4 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Model Hidrolika	-	-
5 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Batuan/Geologi	-	-
6 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	(507.310.600,00)	(507.310.600,00)
7 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	-	-
8 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	-	-
9 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Cangkok	-	-

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Tanam		
10 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	-	-
11 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Umum	-	-
12 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mikrobiologi	-	-
13 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Kimia	-	-
14 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Patologi	-	-
15 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Immunologi	-	-
16 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Hematologi	-	-
17 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Film	-	-
18 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Makanan	-	-
19 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Farmasi	-	-
20 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Fisika	-	-
21 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Hidrodinamika	-	-
22 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Klimatologi	-	-
23 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Peleburan	-	-
24 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Pasir	-	-
25 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan	-	-
26 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Pembuatan Pola	-	-
27 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Metalografi	-	-
28 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Pengelasan	-	-
29 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	-	-
30 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	-	-
31 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Metrologi	-	-
32 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Pelapisan Logam	-	-
33 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	-	-
34 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	-	-
35 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Uji Tekstil	-	-
36 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	-	-
37 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	-	-
38 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik	-	-
39 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Uji Keramik	-	-
40 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	-	-
41 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Pertanian	(33.170.898,40)	(9.993.500,00)
42 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	-	-
43 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Energi Surya	-	-
44 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas	-	-
45 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Oseanografi	-	-

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
46 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	-	-
47 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Biologi Perairan	-	-
48 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Biologi	-	-
49 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Geofisika	-	-
50 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Tambang	-	-
51 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	-	-
52 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Industri	-	-
53 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	-	-
54 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Laboratorium Kearsipan	-	-
55 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	-	-
56 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Lain	-	-
57 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan	-	-
58 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Pendidikan	-	-
59 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim	-	-
60 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Teknik Pantai	-	-
61 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi	-	-
62 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Populasi	-	-
63 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Pengukur Gelombang	-	-
64 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Unit Alat Laboratorium Lainnya	-	-
65 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Analytical Instrument	-	-
66 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Instrument Probe/Sensor	-	-
67 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-General Laboratory Tool	-	-
68 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Glassware Plastic/Utensils	-	-
69 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Laboratory Safety Equipment	-	-
70 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya	-	-
71 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	-	-
72 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika	-	-
73 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	-	-
74 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan	-	-
75 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	-	-
76 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Atas	-	-
77 Akumulasi Penyusutan Alat Sekolah-Alat Peraga Praktik Studi: IPS	-	-
78 Akumulasi Penyusutan Alat Sekolah-Alat Peraga Praktik Studi: Agama	-	-
79 Akumulasi Penyusutan Alat Sekolah-Alat Peraga Praktik Studi: Keterampilan	-	-
80 Akumulasi Penyusutan Alat Sekolah-Alat Peraga Praktik Studi: Kesenian	-	-
81 Akumulasi Penyusutan Alat Sekolah-Alat Peraga Praktik Studi: Olahraga	-	-
82 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: PKN	-	-
83 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)	-	-

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
84 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan	-	-
85 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	-	-
86 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	-	-
87 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Radiation Detector	-	-
88 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Modular Counting and Scientific Electronic	-	-
89 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Assembly/Counting System	-	-
90 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Recorder Display	-	-
91 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply	-	-
92 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Measuring/Testing Device	-	-
93 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Opto Electronics	-	-
94 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Accelerator	-	-
95 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Reactor Experimental System	-	-
96 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya	-	-
97 Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan	-	-
98 Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja	-	-
99 Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan	-	-
100 Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Meteorological Equipment	-	-
101 Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi	-	-
102 Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	-	-
103 Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Radiation Application Equipment	-	-
104 Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Non Destructive Test (NDT) Device	-	-
105 Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Peralatan Hidrologi	-	-
106 Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	-	-
107 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	-	-
108 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	-	-
109 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan	-	-
110 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	-	-
111 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang	-	-
112 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	-	-
113 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Towing Carriage	-	-
114 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Wave Generator And Absorber	-	-
115 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Data Acquisition and Analyzing System	-	-
116 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Cavitation Tunnel	-	-
117 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Overhead Cranes	-	-

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
118 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum	-	-
119 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium	-	-
120 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Propeller Model Workshop	-	-
121 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Mechanical Workshop	-	-
122 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Precision Mechanical Workshop	-	-
123 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Painting Shop	-	-
124 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Ship Model Preparation Shop	-	-
125 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Electrical Workshop	-	-
126 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-MOB	-	-
127 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Photo and Film Equipment	-	-
128 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya	-	-
129 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	-	-
130 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	-	-
131 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik	-	-
132 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	-	-
133 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	-	-
134 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	-	-
135 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natus	-	-
136 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran	-	-
137 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	-	-
138 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat	-	-
139 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	-	-
Jumlah	(540.481.498,40)	(517.304.100,00)

5.2.1.3.7.1.9. Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan

Rp287.019.457,38

Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan sebesar Rp287.019.457,38 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp287.019.457,38 dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Senjata Genggam	-	-
2 Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Senjata Pinggang	-	-
3 Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang	-	-
4 Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Senapan Mesin	-	-
5 Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Mortir	-	-
6 Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Anti Lapis Baja	-	-
7 Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Arileri Medan (Armed)	-	-
8 Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)	-	-
9 Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Kavaleri	-	-
10 Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Senjata Lain-Lain	-	-
11 Akumulasi Penyusutan Senjata Non Senjata Api-Alat Keamanan	-	-
12 Akumulasi Penyusutan Senjata Non Senjata Api-Non Senjata Api	-	-
13 Akumulasi Penyusutan Senjata Non Senjata Api-Alat Penjinak Bahan Peledak (Aljihandak)	(287.019.457,38)	-
14 Akumulasi Penyusutan Senjata Non Senjata Api-Alat Nuklir Biologi dan Kimia	-	-

15	Akumulasi Penyusutan Senjata Non Senjata Api-Persenjataan Non Senjata Api Lainnya	-	-
16	Akumulasi Penyusutan Senjata Sinar-Laser	-	-
17	Akumulasi Penyusutan Senjata Sinar-Senjata Sinar Lainnya	-	-
18	Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alat Khusus Kepolisian	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alat Dalmas/Dakhura	-	-
20	Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alat Wanteror	-	-
21	Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Peralatan Deteksi Intel	-	-
22	Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alsus Lantas	-	-
23	Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alsus Reserse	-	-
24	Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alsus Fotografi Kepolisian	-	-
25	Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alsus Daktiloskop	-	-
26	Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Insrumen Analisis Laboratorium Forensik	-	-
27	Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alat Kepolisian Lainnya	-	-
Jumlah		(287.019.457,38)	-

5.2.1.3.7.1.10. Akumulasi Penyusutan Komputer

Rp5.489.310.451,02

Akumulasi Penyusutan Komputer sebesar Rp5.489.310.451,02 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.955.772.370,85 mengalami **kenaikan** sebesar Rp533.538.080,17 atau 10,77% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)	
1	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(1.017.938.400,00)	(1.017.938.400,00)
2	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(2.847.696.562,53)	(2.574.668.212,53)
3	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mainframe	(59.885.162,50)	(32.561.375,00)
5	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mini Computer	(123.693.000,00)	(123.693.000,00)
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	(516.346.374,96)	(478.853.624,96)
7	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	(923.750.951,03)	(728.057.758,36)
8	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya	-	-
Jumlah		(5.489.310.451,02)	(4.955.772.370,85)

5.2.1.3.7.2.5. Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu

Rp26.482.500,00

Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu sebesar Rp26.482.500,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp22.068.750,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp4.413.750,00 atau 20,00% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)	
1	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	(26.482.500,00)	(22.068.750,00)
3	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Runway/Threshold Light	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Visual Approach Slope Indicator (VASI)	-	-
6	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Approach Light	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Runway Identification Light (REILS)	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Signal	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Flood Lights	-	-
10	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya	-	-
11	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	-	-
12	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya	-	-
Jumlah		(26.482.500,00)	(22.068.750,00)

5.2.1.3.7.2.6. Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga

Rp273.959.720,00

Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga sebesar Rp273.959.720,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp273.959.720,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Atletik	-	-
2 Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Permainan	-	-
3 Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Senam	(203.890.000,00)	(203.890.000,00)
4 Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Air	-	-
5 Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Udara	-	-
6 Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Lainnya	(70.069.720,00)	(70.069.720,00)
Jumlah	(273.959.720,00)	(273.959.720,00)

5.2.1.3.7.2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp35.317.422.711,70

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp35.317.422.711,70 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp34.188.708.841,20 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.128.713.870,50 atau 3,30% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(34.635.015.028,70)	(33.543.039.369,20)
2 Akumulasi Penyusutan Monumen	-	-
3 Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	-	-
4 Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(682.407.683,00)	(645.669.472,00)
Jumlah	(35.317.422.711,70)	(34.188.708.841,20)

5.2.1.3.7.2.1. Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Rp34.635.015.028,70

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung sebesar Rp34.635.015.028,70 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp33.543.039.369,20 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.091.975.659,50 atau 3,26% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(5.117.537.098,37)	(4.916.523.814,17)
2 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang	(121.084.344,24)	(111.563.620,20)
3 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	-	-
4 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Instalasi	-	-
5 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Laboratorium	(911.521.591,84)	(855.188.632,65)
6 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan	(70.785.000,00)	(69.212.000,00)
7 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Oseanarium/Observatorium	-	-
8 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(189.280.000,00)	(182.520.000,00)
9 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(1.881.486.000,00)	(1.837.092.000,00)
10 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	(6.219.104.156,00)	(6.026.281.770,00)
11 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga	(5.168.789.496,12)	(5.151.477.211,51)
12 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	-	-
13 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(13.088.826,08)	(12.493.879,44)
14 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Garasi/Pool	-	-
15 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pemotong Hewan	-	-
16 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Perpustakaan	-	-
17 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Museum	-	-
18 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	-	-
19 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Pengujian Kelaikan	-	-
20 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung	-	-

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Lembaga Pemasyarakatan		
21 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Rumah Tahanan	-	-
22 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Krematorium	-	-
23 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	-	-
24 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Tempat Persidangan	-	-
25 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Terbuka	(95.462.000,00)	(76.369.600,00)
26 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Penampung Sekam	-	-
27 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	-
28 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Industri	-	-
29 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Peternakan/Perikanan	-	-
30 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(1.393.012.307,00)	(1.328.172.963,00)
31 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Peralatan Geofisika	-	-
32 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Fasilitas Umum	-	-
33 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Parkir	(2.543.750,00)	(1.322.750,00)
34 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pabrik	-	-
35 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Stasiun Bus	-	-
36 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Taman	(18.610.284,48)	(15.508.570,40)
37 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	-
38 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	-	-
39 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	(159.114.000,00)	(152.196.000,00)
40 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	-	-
41 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	(1.156.442.682,00)	(1.106.535.348,00)
42 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	(12.117.153.492,57)	(11.700.581.209,83)
43 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel	-	-
44 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel	-	-
45 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	-	-
46 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan	-	-
47 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan	-	-
48 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen	-	-
49 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun	-	-
50 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	-	-
Jumlah	(34.635.015.028,70)	(33.543.039.369,20)

5.2.1.3.7.2.4. Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti

Rp682.407.683,00

Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp682.407.683,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp645.669.472,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp36.738.211,00 atau 5,69% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas- Tugu/Tanda Batas Administrasi	(639.884.003,00)	(610.233.072,00)
2 Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas- Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi	-	-
3 Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas- Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	-	-
4 Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(42.523.680,00)	(35.436.400,00)
5 Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	-	-
Jumlah	(682.407.683,00)	(645.669.472,00)

5.2.1.3.7.3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Rp2.653.465.891,67

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.653.465.891,67 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.626.279.361,25 mengalami **kenaikan** sebesar Rp27.186.530,42 atau 1,04% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(2.302.885.500,00)	(2.302.885.500,00)
2 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	-	-
3 Akumulasi Penyusutan Instalasi	(309.561.666,67)	(287.395.811,25)
4 Akumulasi Penyusutan Jaringan	(41.018.725,00)	(35.998.050,00)
Jumlah	(2.653.465.891,67)	(2.626.279.361,25)

5.2.1.3.7.3.1. Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan

Rp2.302.885.500,00

Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan sebesar Rp2.302.885.500,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.302.885.500,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Nasional	-	-
2 Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Provinsi	-	-
3 Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	-	-
4 Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kota	-	-
5 Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa	-	-
6 Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Tol	-	-
7 Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kereta Api	-	-
8 Akumulasi Penyusutan Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang	-	-
9 Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	(2.302.885.500,00)	(2.302.885.500,00)
10 Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	-	-
11 Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional	-	-
12 Akumulasi Penyusutan pada Jalan Provinsi	-	-
13 Akumulasi Penyusutan pada Jalan Kabupaten	-	-
14 Akumulasi Penyusutan pada Jalan Kota	-	-
15 Akumulasi Penyusutan pada Jalan Desa	-	-
16 Akumulasi Penyusutan pada Jalan Tol	-	-
17 Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api	-	-
18 Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	-	-
19 Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus	-	-
20 Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Penyeberangan	-	-
21 Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar Pada Terminal	-	-
22 Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Pengukur	-	-
23 Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Lainnya	-	-
Jumlah	(2.302.885.500,00)	(2.302.885.500,00)

5.2.1.3.7.3.3. Akumulasi Penyusutan Instalasi

Rp309.561.666,67

Akumulasi Penyusutan Instalasi sebesar Rp309.561.666,67 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp287.395.811,25 mengalami **kenaikan** sebesar Rp22.165.855,42 atau 7,71% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	-	-
2 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	-	-
3 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam	-	-
4 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal	-	-
5 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	(40.416.566,67)	(37.307.600,00)
6 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Domestik	-	-
7 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Industri	-	-
8 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Pertanian	-	-

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
9 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Kotor Lainnya	-	-
10 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik	-	-
11 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	-	-
12 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	-	-
13 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	-	-
14 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan	-	-
15 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	-	-
16 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan	-	-
17 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	-	-
18 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	-	-
19 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	-	-
20 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	-	-
21 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	-	-
22 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	-	-
23 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	-	-
24 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	-	-
25 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	-	-
26 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	-	-
27 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	-	-
28 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera	-	-
29 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	-	-
30 Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Induk	(221.407.600,00)	(210.306.961,25)
31 Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Distribusi	(25.387.500,00)	(21.156.250,00)
32 Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Pusat Pengatur Listrik	(22.350.000,00)	(18.625.000,00)
33 Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Lainnya	-	-
34 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan- Instalasi Pertahanan di Darat	-	-
35 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan- Instalasi Pertahanan Lainnya	-	-
36 Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas	-	-
37 Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas	-	-
38 Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas	-	-
39 Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya	-	-
40 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman- Instalasi Pengaman Penangkal Petir	-	-
41 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman- Instalasi Reaktor Nuklir	-	-
42 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman- Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif	-	-
43 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman- Instalasi Pengaman Lainnya	-	-
44 Akumulasi Penyusutan Instalasi Lain-Instalasi Lain	-	-
Jumlah	(309.561.666,67)	(287.395.811,25)

5.2.1.3.7.3.4. Akumulasi Penyusutan Jaringan

Rp41.018.725,00

Akumulasi Penyusutan Jaringan sebesar Rp41.018.725,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp35.998.050,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp5.020.675,00 atau 13,95% dengan rincian sebagai berikut:

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Pembawa	-	-
2 Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Induk Distribusi	-	-
3 Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Cabang Distribusi	-	-
4 Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Sambungan ke Rumah	-	-
5 Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Air Minum Lainnya	-	-
6 Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	-	-
7 Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(31.718.225,00)	(27.187.050,00)
8 Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	-	-
9 Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di atas Tanah	-	-
10 Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di bawah Tanah	(9.300.500,00)	(8.811.000,00)
11 Akumulasi Penyusutan Jaringan Jaringan Telepon di dalam Air	-	-
12 Akumulasi Penyusutan Jaringan Jaringan dengan Media Udara	-	-
13 Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon Lainnya	-	-
14 Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi	-	-
15 Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi	-	-
16 Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas	-	-
17 Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan BBM	-	-
18 Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya	-	-
Jumlah	(41.018.725,00)	(35.998.050,00)

5.2.1.5 ASET LAINNYA

Rp304.147.737,50

Akumulasi Penyusutan Jaringan sebesar Rp304.147.737,50 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp284.604.800,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp19.542.937,50 atau 6,87% dengan rincian sebagai berikut:

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Tagihan Jangka Panjang	-	-
2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
3 Aset Tidak Berwujud	640.561.687,00	614.504.437,00
4 Aset Lain-lain	709.390.000,00	4.447.572.305,00
5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(621.018.749,50)	(614.504.437,00)
6 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(424.785.200,00)	(4.162.967.505,00)
7 Kas yang Dibatasi Penggunaannya	-	-
8 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-
Jumlah	304.147.737,50	284.604.800,00

5.2.1.5.5. Aset Tidak Berwujud

Rp640.561.687,00

Aset Tidak Berwujud sebesar Rp640.561.687,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp614.504.437,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp26.057.250,00 atau 4,24% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Aset Tidak Berwujud	640.561.687,00	614.504.437,00
2 Aset Konsesi Jasa Aset Tidak Berwujud	-	-
Jumlah	640.561.687,00	614.504.437,00

5.2.1.5.3.1 Aset Tidak Berwujud

Rp640.561.687,00

Aset Tidak Berwujud sebesar Rp640.561.687,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp614.504.437,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp26.057.250,00 atau 4,24% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Goodwill	-	-
2 Lisensi dan Franchise	-	-
3 Hak Cipta	-	-
4 Hak Paten	-	-
5 Software	640.561.687,00	614.504.437,00

6	Kajian	-	-
7	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	-	-
8	Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan	-	-
9	Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	-
Jumlah		640.561.687,00	614.504.437,00

Penambahan tersebut berasal dari belanja pemeliharaan asset tidak berwujud-software yang dikapitalisasi ke asset tidak berwujud sebesar Rp26.057.250,00.

5.2.1.5.4. Aset Lain-Lain Rp709.390.000,00

Aset Lain-Lain sebesar Rp709.390.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.447.572.305,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp3.738.182.305,00 atau 84,05% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Aset Rusak Berat/Usang	709.390.000,00	4.447.572.305,00
2 Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	-
Jumlah	709.390.000,00	4.447.572.305,00

Penurunan tersebut berasal dari penghapusan asset lainnya secara penjualan sebesar Rp3.782.782.305,00 dan penambahan dari reklasifikasi asset tetap sebesar Rp44.600.000,00.

5.2.1.5.5. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp621.018.749,50

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp621.018.749,50 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp614.504.437,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp6.514.312,50 atau 1,06% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	-	-
2 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	-	-
3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten	-	-
4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(621.018.749,50)	(614.504.437,00)
5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	-	-
Jumlah	(621.018.749,50)	(614.504.437,00)

5.2.1.5.6. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Rp424.785.200,00

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp424.785.200,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.162.967.505,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp3.738.182.305,00 atau 89,80% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
2 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(424.785.200,00)	(4.162.967.505,00)
Jumlah	(424.785.200,00)	(4.162.967.505,00)

5.2.2. KEWAJIBAN Rp,00

Total Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0,00 tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.2.3. EKUITAS Rp115.039.662.552,05

Ekuitas sebesar Rp115.039.662.552,05 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp155.524.413.375,19

mengalami **penurunan** sebesar Rp40.484.750.823,14 atau 26,03% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Ekuitas	115.039.662.552,05	155.524.413.375,19
2 Ekuitas SAL	-	-
3 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	-	-
Jumlah	115.039.662.552,05	155.524.413.375,19

5.2.3.1 Ekuitas Rp115.039.662.552,05

Ekuitas sebesar Rp115.039.662.552,05 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp155.524.413.375,19 mengalami **penurunan** sebesar Rp40.484.750.823,14 atau 26,03% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Ekuitas	155.524.413.375,19	155.524.413.375,19
2 Surplus/Defisit-LO	(40.484.750.823,14)	-
Jumlah	115.039.662.552,05	155.524.413.375,19

5.2.3.3 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan Rp40.571.380.329,00

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan sebesar Rp40.571.380.329,00 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp40.571.380.329,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 RK PPKD	40.571.380.329,00	-
Jumlah	40.571.380.329,00	-

5.3. PENJELASAN POS - POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Dari LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pendapatan	24.000.370.999,30	24.328.468.740,00	(328.097.740,70)
2	Beban	64.485.121.822,44	72.142.249.432,46	(7.657.127.610,02)
	Surplus/(Defisit) Operasional	(40.484.750.823,14)	(47.813.780.692,46)	7.329.029.869,32
3	Kegiatan Non Operasional	-	(9.262.129,86)	9.262.129,86
	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(40.484.750.823,14)	(47.823.042.822,32)	7.338.291.999,18
4	Pos Luar Biasa	-	-	-
	Surplus/(Defisit) Laporan Operasional	(40.484.750.823,14)	(47.823.042.822,32)	7.338.291.999,18

Penjelasan lebih lanjut mengenai LO Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagai berikut:

5.3.1. PENDAPATAN DAERAH-LO Rp24.328.468.740,00

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Provinsi Jawa Tengah dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Daerah-LO terealisasi sebesar Rp24.328.468.740,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 23.722.444.500,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 606.024.240,00 atau 2,55 % dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

	LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH(Rp)	MUTASI KURANG(Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	22.610.245.879,00	-	-	22.610.245.879,00	24.328.468.740,00	(1.718.222.861,00)	(7,06)
2 Pendapatan Transfer-LO	-	-	-	-	-	-	-
3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO	-	2.439.571.478,00	1.049.446.357,70	1.390.125.120,30	-	1.390.125.120,30	-
Jumlah	22.610.245.879,00	2.439.571.478,00	1.049.446.357,70	24.000.370.999,30	24.328.468.740,00	(328.097.740,70)	(1,35)

Total Pendapatan-LRA : Rp22.610.245.879,00

Penambahan

Saldo Akhir Piutang : Rp0,00

Saldo Awal Pendapatan diterima dimuka : Rp0,00

Penambahan Pendapatan : Rp2.439.571.478,00

Total Penambahan : Rp2.439.571.478,00

Pengurangan

Saldo Awal Piutang : Rp0,00

Saldo Akhir Pendapatan diterima dimuka : Rp0,00

Saldo Koreksi Piutang : Rp0,00

Lebih Salur Transfer Dana Perimbangan : Rp0,00

BOS kepada sekolah milik Kab/Kota : Rp0,00

Pengurangan Pendapatan : Rp1.049.446.357,70

Total Pengurangan : Rp1.049.446.357,70

Total Pendapatan-LO : Rp24.000.370.999,30

5.3.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO Rp22.610.245.879,00

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO terealisasi sebesar Rp22.610.245.879,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp24.328.468.740,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp1.718.222.861,00 atau 7,06% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH(Rp)	MUTASI KURANG(Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Pendapatan Pajak Daerah-LO	-	-	-	-	-	-	-
2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO	2.612.469.000,00	-	-	2.612.469.000,00	3.173.996.400,00	(561.527.400,00)	(17,69)
3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	-	-	-	-	-	-	-
4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	19.997.776.879,00	-	-	19.997.776.879,00	21.154.472.340,00	(1.156.695.461,00)	(5,47)
Jumlah	22.610.245.879,00	-	-	22.610.245.879,00	24.328.468.740,00	(1.718.222.861,00)	(7,06)

Total Pendapatan-LRA : Rp22.610.245.879,00

Penambahan

Saldo Akhir Piutang : Rp0,00

Saldo Awal Pendapatan diterima di muka	: Rp0,00
Koreksi karena perbedaan metode perhitungan	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	: Rp0,00
Total Penambahan	: Rp0,00
Pengurangan	
Saldo Awal Piutang	: Rp0,00
Koreksi Kurang Piutang	: Rp0,00
Saldo Akhir Pendapatan diterima di muka	: Rp0,00
Total Pengurangan	: Rp0,00
Total Pendapatan-LO	: Rp22.610.245.879,00

5.3.1.1.2.1 Retribusi Daerah-LO **Rp2.612.469.000,00**

Pendapatan Retribusi Daerah-LO terealisasi sebesar Rp2.612.469.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.173.996.400,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp561.527.400,00 atau 17,69% dengan rincian sebagai berikut:

	LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO	-	-	-	-	-	-	-
2 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO	2.612.469.000,00	-	-	2.612.469.000,00	3.173.996.400,00	(561.527.400,00)	(17,69)
3 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	2.612.469.000,00	-	-	2.612.469.000,00	3.173.996.400,00	(561.527.400,00)	(17,69)

Total Pendapatan-LRA **: Rp2.612.469.000,00**

Penambahan

□ Saldo Akhir Piutang	: Rp0,00
Total Penambahan	: Rp0,00

Pengurangan

□ Saldo Awal Piutang	: Rp0,00
□ Saldo Akhir Pendapatan diterima dimuka	: Rp0,00
Total Pengurangan	: Rp0,00

Total Pendapatan-LO **: Rp2.612.469.000,00**

5.3.1.1.2.2 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO **Rp2.612.469.000,00**

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha terealisasi sebesar Rp2.612.469.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.173.996.400,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp561.527.400,00 atau 17,69% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024(Rp)	2023(Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	2.612.469.000,00	-	-	3.173.996.400,00	3.173.996.400,00	(561.527.400,00)	(17,69)
2 Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan-LO	-	-	-	-	-	-	-
3 Pendapatan Retribusi Terminal-LO	-	-	-	-	-	-	-

	LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024(Rp)	2023(Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
4 Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vi lla-LO	-	-	-	-	-	-	-
5 Pendapatan Retribusi Kepelabuhan-LO	-	-	-	-	-	-	-
6 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	-	-	-	-	-	-	-
7 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	2.612.469.000,00	-	-	3.173.996.400,00	3.173.996.400,00	(561.527.400,00)	(17,69)

5.3.1.1.2.2.1 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO Rp2.612.469.000,00

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp2.612.469.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.173.996.400,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp561.527.400,00 atau 17,69% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan- LO	2.533.019.000,00	-	-	2.533.019.000,00	-	2.533.019.000,00	-
2 Retribusi Penyewaan Tanah-LO	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
3 Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	-	-	-	-	-	-	-
4 Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	-	-	-	-	-	-	-
5 Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	71.950.000,00	-	-	71.950.000,00	3.173.996.400,00	(3.102.046.400,00)	(97,73)
6 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor- LO	-	-	-	-	-	-	-
7 Retribusi Pemakaian Alat-LO	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	2.612.469.000,00	-	-	3.173.996.400,00	3.173.996.400,00	(561.527.400,00)	(17,69)

5.3.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Rp19.997.776.879,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp19.997.776.879,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp21.154.472.340,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp1.156.695.461,00 atau 5,47% dengan rincian sebagai berikut:

	LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penuruna n (Rp)	Tren %
1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	-	-	-	-	-	-	-
2 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	-	-	-	-	-	-
3 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	-	-	-	-	-	-
4 Hasil Kerja Sama Daerah-LO	-	-	-	-	-	-	-
5 Jasa Giro - LO	-	-	-	-	-	-	-
6 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	-	-	-	-	-	-	-
7 Pendapatan Bunga - LO	-	-	-	-	-	-	-
8 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO	-	-	-	-	-	-	-
9 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO	19.997.776.879,00	-	-	19.997.776.879,00	21.154.472.340,00	(1.156.695.461,00)	(5,47)

	LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penuruna n (Rp)	Tren %
10 Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO	-	-	-	-	-	-	-
11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	-	-	-	-	-	-	-
12 Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO	-	-	-	-	-	-	-
13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO	-	-	-	-	-	-	-
14 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	-	-	-	-	-	-	-
15 Pendapatan dari Pengembalian - LO	-	-	-	-	-	-	-
16 Pendapatan BLUD - LO	-	-	-	-	-	-	-
17 Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	-	-	-	-	-	-
18 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	-	-	-	-	-	-	-
19 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO	-	-	-	-	-	-	-
20 Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO	-	-	-	-	-	-	-
21 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	-	-	-	-	-	-	-
22 Pendapatan Zakat-LO	-	-	-	-	-	-	-
23 Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO	-	-	-	-	-	-	-
24 Pendapatan Konsesi Jasa	-	-	-	-	-	-	-
25 Pungutan bagi Wisatawan Asing-LO	-	-	-	-	-	-	-
26 Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah-LO	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	19.997.776.879,00	-	-	19.997.776.879,00	21.154.472.340,00	(1.156.695.461,00)	(5,47)

Total Pendapatan-LRA

: Rp19.997.776.879,00

Penambahan

Saldo Akhir Piutang : Rp0,00

Saldo Awal Pendapatan diterima dimuka : Rp0,00

Total Penambahan

: Rp0,00

Pengurangan

Saldo Awal Piutang : Rp0,00

Koreksi Piutang : Rp0,00

Saldo Akhir Pendapatan diterima dimuka : Rp0,00

Total Pengurangan

: Rp0,00

Total Pendapatan-LO

: Rp19.997.776.879,00

5.3.1.5.4.9 Pendapatan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO Rp19.997.776.879,00

Pendapatan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp19.997.776.879,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp21.154.472.340,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp1.156.695.461,00 atau 5,47% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024(Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	19.997.776.879,00	-	-	19.997.776.879,00	21.154.472.340,00	(1.156.695.461,00)	(5,47)
Jumlah	19.997.776.879,00	-	-	19.997.776.879,00	21.154.472.340,00	(1.156.695.461,00)	(5,47)

5.3.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO Rp1.390.125.120,30

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO terealisasi sebesar Rp1.390.125.120,30 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.390.125.120,30 dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Pendapatan Hibah-LO	-	2.439.571.478,00	1.049.446.357,70	1.390.125.120,30	-	1.390.125.120,30	-
2 Dana Darurat-LO	-	-	-	-	-	-	-
3 Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- LO	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	2.439.571.478,00	1.049.446.357,70	1.390.125.120,30	-	1.390.125.120,30	-

5.3.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Rp1.390.125.120,30

Pendapatan Hibah-LO terealisasi sebesar Rp1.390.125.120,30 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.390.125.120,30 dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	-	2.439.571.478,00	1.049.446.357,70	1.390.125.120,30	-	1.390.125.120,30	-
2 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	-	-	-	-	-	-	-
3 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	-	-	-	-	-	-	-
4 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	-	-	-	-	-	-	-
5 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	2.439.571.478,00	1.049.446.357,70	1.390.125.120,30	-	1.390.125.120,30	-

5.3.2. BEBAN DAERAH

Rp64.485.121.822,44

Beban Daerah terealisasi sebesar Rp64.485.121.822,44 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp72.142.249.432,46 mengalami **penurunan** sebesar Rp7.657.127.610,02 atau 10,61% dengan rincian sebagai berikut:

	LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH(Rp)	MUTASI KURANG(Rp)	2024(Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurun an (Rp)	Tren %
Beban	62.040.712.408,00	2.879.053.710,14	434.644.295,70	64.485.121.822,44	72.142.249.432,46	(7.657.127.610,02)	(10,61)
1 Operasional	-	-	-	-	-	-	-
Beban	-	-	-	-	-	-	-
2 Transfer	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	62.040.712.408,00	2.879.053.710,14	434.644.295,70	64.485.121.822,44	72.142.249.432,46	(7.657.127.610,02)	(10,61)

Total Belanja Daerah : Rp64.485.121.822,44

Penambahan

- Saldo Akhir Utang : Rp0,00
- Reklasifikasi BTT : Rp0,00
- Reklasifikasi dari Belanja Lain : Rp0,00
- Pembayaran Utang 2023 : Rp0,00

Total Penambahan : Rp0,00

Pengurangan

- Saldo Awal Utang : Rp0,00

Total Pengurangan : Rp0,00

Total Beban Daerah : Rp64.485.121.822,44

5.3.2.1 BEBAN OPERASIONAL Rp64.485.121.822,44

Beban Operasional terealisasi sebesar Rp64.485.121.822,44 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp72.142.249.432,46 mengalami **penurunan** sebesar Rp7.657.127.610,02 atau 10,61% dengan rincian sebagai berikut:

	LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH(Rp)	MUTASI KURANG(Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Pegawai	25.936.685.521,00	-	-	25.936.685.521,00	26.902.464.924,00	(44.920.405,00)	(0,17)
2 Beban Barang dan Jasa	36.104.026.887,00	176.737.529,02	434.644.295,70	35.846.120.120,32	42.561.352.819,54	5.788.051.900,70	15,74
3 Beban Bunga	-	-	-	-	-	-	-
4 Beban Subsidi	-	-	-	-	-	-	-
5 Beban Hibah	-	-	-	-	-	-	-
6 Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-
7 Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	-	-	-	-
8 Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	-	-	-	-	-
9 Beban Lain-Lain	-	2.702.316.181,12	-	-	-	-	-
Jumlah	62.040.712.408,00	2.879.053.710,14	434.644.295,70	64.485.121.822,44	72.142.249.432,46	(7.657.127.610,02)	(10,61)

Total Belanja Operasional : Rp64.485.121.822,44

Penambahan

- Saldo Akhir Utang : Rp0,00
- Reklasifikasi BTT : Rp0,00
- Reklasifikasi dari Belanja Lain : Rp0,00
- Pembayaran Utang 2023 : Rp0,00

Total Penambahan : Rp0,00

Pengurangan

- Saldo Awal Utang : Rp0,00

Total Pengurangan : Rp0,00

Total Beban Operasional : Rp64.485.121.822,44

5.3.2.1.1.1. Beban Pegawai

Rp25.936.685.521,00

Beban Pegawai terealisasi sebesar Rp25.936.685.521,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp26.902.464.924,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp965.779.403,00 atau 3,59% dengan rincian sebagai berikut:

	LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN	11.939.500.263,00	-	-	11.939.500.263,00	12.561.034.695,00	(621.534.432,00)	(4,95)
2 Beban Tambahan Penghasilan ASN	13.566.705.258,00	-	-	13.566.705.258,00	13.896.507.729,00	(329.802.471,00)	(2,37)
3 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN	430.480.000,00	-	-	430.480.000,00	444.922.500,00	(14.442.500,00)	(3,25)
4 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	-	-	-	-	-
5 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-	-	-	-	-	-	-
6 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-	-	-	-	-
7 Beban Gaji dan Tunjangan MRP	-	-	-	-	-	-	-
8 Beban Pegawai BOS	-	-	-	-	-	-	-
9 Beban Pegawai BOSP	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	25.936.685.521,00	-	-	25.936.685.521,00	26.902.464.924,00	(965.779.403,00)	(3,59)

Total Belanja Pegawai

: Rp25.936.685.521,00

Penambahan

- Saldo Akhir Utang : Rp0,00
- Reklasifikasi BTT : Rp0,00
- Reklasifikasi dari Belanja Lain : Rp0,00
- Pembayaran Utang 2023 : Rp0,00

Total Penambahan : Rp0,00

Pengurangan

- Saldo Awal Utang : Rp0,00

Total Pengurangan : Rp0,00

Total Beban Pegawai-LO

: Rp25.936.685.521,00

5.3.2.1.1.1. Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Rp11.939.500.263,00

Beban Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp11.939.500.263,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12.542.839.901,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp639.020.129,00 atau 5,09% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURAN G(Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Gaji Pokok ASN	8.560.087.948,00	-	-	8.560.087.948,00	8.877.530.370,00	(317.442.422,00)	(3,58)
2 Beban Tunjangan Keluarga ASN	755.188.294,00	-	-	755.188.294,00	796.122.404,00	(40.934.110,00)	(5,14)
3 Beban Tunjangan Jabatan ASN	206.780.000,00	-	-	206.780.000,00	215.220.000,00	(8.440.000,00)	(3,92)
4 Beban Tunjangan Fungsional ASN	983.264.000,00	-	-	983.264.000,00	1.167.584.000,00	(184.320.000,00)	(15,79)
5 Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	187.680.000,00	-	-	187.680.000,00	210.920.000,00	(23.240.000,00)	(11,02)

	LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURAN G(Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
6 Beban Tunjangan Beras ASN	356.885.760,00	-	-	356.885.760,00	401.206.800,00	(44.321.040,00)	(11,05)
7 Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	125.542.413,00	-	-	125.542.413,00	115.748.411,00	9.794.002,00	8,46
8 Beban Pembulatan Gaji ASN	99.787,00	-	-	99.787,00	108.239,00	(8.452,00)	(7,81)
9 Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	694.028.902,00	-	-	694.028.902,00	703.815.289,00	(9.786.387,00)	(1,39)
10 Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	17.485.697,00	-	-	17.485.697,00	18.194.794,00	(18.194.794,00)	(100,00)
11 Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	52.457.462,00	-	-	52.457.462,00	54.584.388,00	(2.126.926,00)	(3,90)
12 Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	-	-	-	-	-	-	-
13 Beban Jaminan Hari Tua ASN	-	-	-	-	-	-	-
14 Beban Tunjangan Khusus*)	-	-	-	-	-	-	-
15 Beban Zakat ASN	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	11.939.500.263,00	-	-	11.939.500.263,00	12.561.034.695,00	(639.020.129,00)	(5,09)

5.3.2.1.1.2. Beban Tambahan Penghasilan ASN

Rp13.566.705.258,00

Beban Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp13.566.705.258,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp13.896.507.729,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp329.802.471,00 atau 2,37% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	13.566.705.258,00	-	-	13.566.705.258,00	13.896.507.729,00	(329.802.471,00)	(2,37)
2 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	-	-	-	-	-	-	-
3 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	-	-	-	-	-	-	-
4 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	-	-	-	-	-	-	-
5 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	13.566.705.258,00	-	-	13.566.705.258,00	13.896.507.729,00	(329.802.471,00)	(2,37)

5.3.2.1.1.3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp430.480.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi sebesar Rp430.480.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp444.922.500,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp14.442.500,00 atau 3,25% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-	-

Surplus Perolehan Persediaan : Rp0,00
Total Penambahan : Rp0,00

Pengurangan

Utang Persediaan Awal : Rp0,00
 Persediaan Akhir : Rp0,00
Total Pengurangan : Rp0,00

Total Beban Barang dan Jasa : Rp35.846.120.120,32

5.3.2.1.2.1. Beban Barang Rp6.001.602.656,00

Beban Barang terealisasi sebesar Rp6.001.602.656,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.863.836.251,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp2.862.233.595,00 atau 32,29% dengan rincian sebagai berikut:

	LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024(Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Barang Pakai Habis	6.231.722.510,00	165.877.520,00	395.997.374,00	6.001.602.656,00	8.863.836.251,00	(2.862.233.595,00)	(32,29)
2 Beban Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	-	-	-	-
3 Beban Barang Bekas Dipakai	-	-	-	-	-	-	-
4 Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	6.231.722.510,00	165.877.520,00	395.997.374,00	6.001.602.656,00	8.863.836.251,00	(2.862.233.595,00)	(32,29)

Total Belanja Barang : Rp6.231.722.510,00

Penambahan

Persediaan Awal : Rp165.877.520,00
 Utang Persediaan Akhir : Rp0,00
 Koreksi Persediaan : Rp0,00
 Hibah Persediaan : Rp0,00
 Reklas dari Belanja Lain : Rp0,00
 Surplus Perolehan Persediaan : Rp0,00

Total Penambahan : Rp165.877.520,00

Pengurangan

Utang Persediaan Awal : Rp0,00
 Persediaan Akhir : Rp395.997.374,00

Total Pengurangan : Rp395.997.374,00

Total Beban Barang : Rp6.001.602.656,00

5.3.2.1.2.2. Beban Jasa Rp16.791.741.781,32

Beban Jasa terealisasi sebesar Rp16.791.741.781,32 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp21.526.604.102,54 mengalami **kenaikan** sebesar Rp4.734.862.321,22 atau 22,00% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024(Rp)	2023(Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Jasa Kantor	16.008.019.718,00	-	-	16.008.019.718,00	20.959.139.330,00	(4.951.119.612,00)	(23,62)
2 Beban Jasa Asuransi	299.218.726,00	10.860.009,02	12.589.671,70	297.489.063,32	275.518.772,54	21.970.290,78	7,97
3 Beban Sewa Tanah	-	-	-	-	-	-	-
4 Beban Sewa Peralatan dan Mesin	303.550.000,00	-	-	303.550.000,00	142.400.000,00	161.150.000,00	113,17
5 Beban Sewa Gedung dan Bangunan	92.986.000,00	-	-	92.986.000,00	90.536.000,00	2.450.000,00	2,71
6 Beban Sewa Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-
7 Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
8 Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-
9 Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-
10 Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-
11 Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-	-	-	-	-	-	-
12 Beban Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-	-	-	-
13 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK	9.697.000,00	-	-	89.697.000,00	59.010.000,00	30.687.000,00	52,00
14 Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	-	-	-	-	-	-	-
15 Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	16.793.471.444,00	10.860.009,02	12.589.671,70	16.791.741.781,32	21.526.604.102,54	(4.734.862.321,22)	(22,00)

Total Belanja Jasa : Rp16.793.471.444,00

Penambahan

- Belanja Dibayar Di Muka Awal : Rp10.860.009,02
- Utang Jasa Akhir : Rp0,00
- Hibah Jasa : Rp0,00

Total Penambahan : Rp10.860.009,02

Pengurangan

- Belanja Dibayar Di Muka Akhir : Rp12.589.671,70
- Utang Jasa Awal : Rp0,00
- Koreksi Beban Jasa : Rp0,00
- Reklas ke Belanja Lain : Rp0,00

Total Pengurangan : Rp12.589.671,70

Total Beban Jasa : Rp16.791.741.781,32

5.3.2.1.2.3. Beban Pemeliharaan

Rp2.228.908.394,00

Beban Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp2.228.908.394,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.814.125.683,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp1.585.217.289,00 atau 41,56% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024(Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Pemeliharaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-
2 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	947.313.521,00	-	-	947.313.521,00	1.014.673.037,00	(67.359.516,00)	(6,64)
3 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.130.132.963,00	-	-	1.130.132.963,00	2.577.097.041,00	(1.446.964.078,00)	(56,15)
4 Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	127.961.910,00	-	-	127.961.910,00	197.355.605,00	(69.393.695,00)	(35,16)
5 Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	23.500.000,00	-	-	23.500.000,00	25.000.000,00	(1.500.000,00)	(6,00)
6 Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	26.057.250,00	-	26.057.250,00			-	-
Jumlah	2.254.965.644,00	-	26.057.250,00	2.228.908.394,00	3.814.125.683,00	(1.585.217.289,00)	(41,56)

5.3.2.1.2.4. Beban Perjalanan Dinas

Rp10.819.367.289,00

Beban Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp10.819.367.289,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.356.786.783,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.462.580.506,00 atau 29,47% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024(Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.819.367.289,00	-	-	10.819.367.289,00	8.356.786.783,00	2.462.580.506,00	29,47
2 Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	10.819.367.289,00	-	-	10.819.367.289,00	8.356.786.783,00	2.462.580.506,00	29,47

Total Belanja Perjalanan Dinas

: Rp10.819.367.289,00

Penambahan

- Utang Perjalanan Dinas Akhir : Rp0,00
- Reklas dari Belanja Lain : Rp0,00

Total Penambahan : Rp0,00

Pengurangan

- Utang Perjalanan Dinas Awal : Rp0,00

Total Pengurangan : Rp0,00

Total Beban Perjalanan Dinas

: Rp10.819.367.289,00

5.3.2.1.2.5. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Rp4.500.000,00

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi sebesar Rp4.500.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp4.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
2 Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-

5.3.2.2 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI Rp2.702.316.181,12

Beban Penyusutan dan Amortisasi terealisasi sebesar Rp2.702.316.181,12 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.678.431.688,92 mengalami **kenaikan** sebesar Rp23.884.492,20 atau 0,89% dengan rincian sebagai berikut:

	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.539.901.467,70	1.477.448.951,34	62.452.516,36	4,23
2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.128.713.870,50	1.083.335.495,36	45.378.375,14	4,19
3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	27.186.530,42	50.611.408,89	(23.424.878,47)	(46,28)
4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
5 Beban Penyusutan Aset Lainnya- Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-
6 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	6.514.312,50	67.035.833,33	(60.521.520,83)	(90,28)
7 Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	-	-	-	-
8 Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	-	-	-	-
9 Beban Penyusutan Properti Investasi	-	-	-	-
Jumlah	2.702.316.181,12	2.678.431.688,92	23.884.492,20	0,89

5.3.2.2.1. Beban Penyusutan dan Amortisasi Peralatan dan Mesin Rp1.539.901.467,70

Beban Penyusutan dan Amortisasi Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp1.539.901.467,70 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.477.448.951,34 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 62.452.516,36 atau 4,23% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Alat Besar	137.120.873,24	137.120.873,24	(12.552.541,65)	(9,15)
2 Beban Penyusutan Alat Angkutan	75.640.625,00	75.640.625,00	45.845.416,67	60,61
3 Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.832.550,00	1.832.550,00	-	-
4 Beban Penyusutan Alat Pertanian	-	-	-	-
5 Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	803.199.841,43	803.199.841,43	(30.264.805,33)	(3,77)
6 Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	111.840.136,68	111.840.136,68	(5.443.231,79)	(4,87)
7 Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	12.030.200,00	12.030.200,00	-	-
8 Beban Penyusutan Alat Laboratorium	2.498.375,00	2.498.375,00	827.160,90	33,11
9 Beban Penyusutan Alat Persenjataan	-	-	11.480.778,38	-
10 Beban Penyusutan Komputer	328.872.599,99	328.872.599,99	52.559.739,18	15,98
11 Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	-	-	-	-
12 Beban Penyusutan Alat Pengeboran	-	-	-	-
13 Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	-	-	-	-
14 Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-
15 Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-
16 Beban Penyusutan Alat Peraga	-	-	-	-
17 Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-
18 Beban Penyusutan Rambu-Rambu	4.413.750,00	4.413.750,00	-	-
19 Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	-	-	-	-
Jumlah	1.539.901.467,70	1.477.448.951,34	62.452.516,36	4,23

5.3.2.2.2. Beban Penyusutan dan Amortisasi Gedung dan Bangunan Rp1.128.713.870,50

Beban Penyusutan dan Amortisasi Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp1.128.713.870,50 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.083.335.495,36 mengalami **kenaikan** sebesar Rp45.378.375,14 atau 4,19% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Bangunan Gedung	1.091.975.659,50	1.046.597.284,36	45.378.375,14	4,34
2 Beban Penyusutan Monumen	-	-	-	-
3 Beban Penyusutan Bangunan Menara	-	-	-	-
4 Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	36.738.211,00	36.738.211,00	-	-
Jumlah	1.128.713.870,50	1.083.335.495,36	45.378.375,14	4,19

5.3.2.2.3. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp27.186.530,42

Beban Penyusutan dan Amortisasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan terealisasi sebesar Rp27.186.530,42 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp50.611.408,89 mengalami **penurunan** sebesar Rp23.424.878,47 atau 46,28% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	24.137.350,00	(24.137.350,00)	(100,00)
2 Beban Penyusutan Bangunan Air	-	2.137.414,58	(2.137.414,58)	(100,00)
3 Beban Penyusutan Instalasi	22.165.855,42	19.315.969,31	2.849.886,11	14,75
4 Beban Penyusutan Jaringan	5.020.675,00	5.020.675,00	-	-
Jumlah	27.186.530,42	50.611.408,89	(23.424.878,47)	(46,28)

5.3.2.2.4. Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tak Berwujud Rp6.514.312,50

Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tak Berwujud terealisasi sebesar Rp6.514.312,50 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp67.035.833,33 mengalami **penurunan** sebesar Rp60.521.520,83 atau 90,28% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Franchise	-	-	-	-
2 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	-	-	-	-
3 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten	-	-	-	-
4 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	6.514.312,50	67.035.833,33	(60.521.520,83)	(90,28)
5 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Kajian	-	-	-	-
Jumlah	6.514.312,50	67.035.833,33	(60.521.520,83)	(90,28)

5.3.4. SURPLUS DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Rp,00

Surplus Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terealisasi sebesar Rp,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9.262.129,86 mengalami **penurunan** sebesar Rp9.262.129,86 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Surplus Non Operasional	-	-	-	-
2 Defisit Non Operasional	-	9.262.129,86	9.262.129,86	(100,00)
Jumlah	-	9.262.129,86	9.262.129,86	(100,00)

5.3.4.2. DEFISIT NON OPERASIONAL Rp,00

Defisit Non Operasional terealisasi sebesar Rp,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9.262.129,86 mengalami **penurunan** sebesar Rp9.262.129,86 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	-
2 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-	-
3 Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya	-	9.262.129,86	9.262.129,86	(100,00)
Jumlah	-	9.262.129,86	9.262.129,86	(100,00)

5.3.4.2.2. Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya – LO Rp,00

Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya – LO terealisasi sebesar Rp,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9.262.129,86 mengalami **penurunan** sebesar Rp9.262.129,86 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya-LO	-	9.262.129,86	9.262.129,86	(100,00)
2 Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO	-	-	-	-
3 Defisit Non Operasional-Penurunan Nilai Investasi	-	-	-	-
Jumlah	-	9.262.129,86	9.262.129,86	(100,00)

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Ekuitas Awal	155.524.413.375,197	153.658.346.312,47	1.866.067.062,72	1,21
2	Surplus/Defisit-LO	(40.484.750.823,14)	(47.823.042.822,32)	7.338.291.999,18	(15,34)
3	RK-PPKD	40.571.380.329,00	47.255.792.669,00	0,00	0,00
4	Koreksi Kesalahan/Penyesuaian	-	2.433.317.216,04	(2.433.317.216,04)	(100,00)
	Ekuitas Akhir	155.611.042.881,05	155.524.413.375,19	6.771.041.845,86	(114,13)

5.4.1 Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas awal tahun 2024 sebesar Rp155.524.413.375,19 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2023.

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Ekuitas Awal	155.524.413.375,19	153.658.346.312,47	1.866.067.062,72	1.21
	Ekuitas Awal	155.524.413.375,19	153.658.346.312,47	1.866.067.062,72	1.21

5.4.2 Surplus/Defisit – LO

Surplus/defisit – LO sebesar Rp 40.484.750.823,14 merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Tahun 2024.

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Surplus/Defisit LO	(40.484.750.823,14)	(47.823.042.822,32)	7.338.291.999,18	(15,34)
	Ekuitas Akhir	(40.484.750.823,14)	(47.823.042.822,32)	7.338.291.999,18	(15,34)

5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreks/Penyesuaian Kas	-	-	-	-
2	Koreks/Penyesuaian Piutang	-	-	-	-
3	Koreks/Penyesuaian Penyisihan Piutang	-	-	-	-
4	Koreks/Penyesuaian Persediaan	-	-	-	-
5	Koreks/Penyesuaian Investasi Non Permanen	-	-	-	-
6	Koreks/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen	-	-	-	-
7	Koreks/Penyesuaian Investasi Permanen	-	-	-	-

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
8	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	-	2.484.730.098,00	(2.484.730.098,00)	(100,00)
9	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	-	(51.412.881,96)	51.412.881,96	(100,00)
10	Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	-	-	-	-
11	Koreksi/Penyesuaian Amortisasi	-	-	-	-
12	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-
13	Koreksi/Penyesuaian Utang Belanja Pegawai	-	-	-	-
14	Koreksi/Penyesuaian Utang Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-
15	Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain	-	-	-	-
Jumlah			2.433.317.216,04	(2.433.317.216,04)	(100,00)

5.4.3.1 Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap

Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
2	Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	-	2.484.730.098,00	(2.484.730.098,00)	(100,00)
3	Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap	-	-	-	-
4	Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi dari Aset Lainnya	-	-	-	-
5	Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Tetap	-	-	-	-
6	Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap ke Aset Ekstrakontable	-	-	-	-
7	Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap	-	-	-	-
8	Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya	-	-	-	-
9	Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
10	Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	-	-	-	-
11	Koreksi/Penyesuaian Kurang Penilaian Aset Tetap	-	-	-	-
Jumlah		-	2.484.730.098,00	(2.484.730.098,00)	(100,00)

5.4.3.2 Koreksi/Penyesuaian Penyusutan

Koreksi/Penyesuaian Penyusutan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan	-	(51.412.881,96)	51.412.881,96	(100,00)
2	Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan	-	-	-	-
Jumlah		-	(51.412.881,96)	51.412.881,96	(100,00)

5.4.4 Ekuitas Akhir

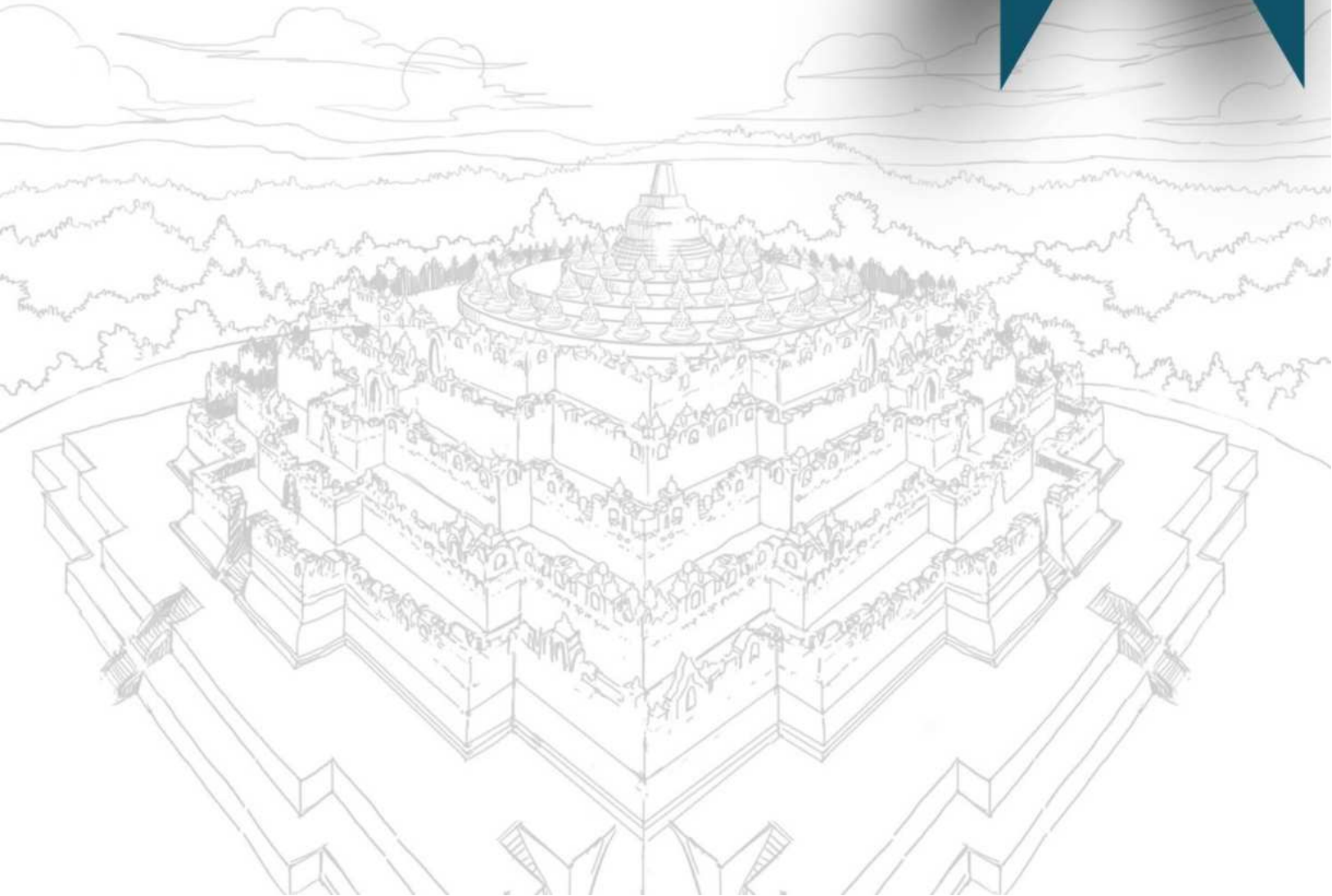
Ekuitas akhir sebesar Rp155.611.042.881,05 dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Ekuitas Akhir	155.611.042.881,05	155.524.413.375,19	6.771.041.845,86	(114,13)
Jumlah		155.611.042.881,05	155.524.413.375,19	6.771.041.845,86	(114,13)



BAB 6

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN



BAB VI

Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

6.1. Gambaran Umum

Secara historis BPSDMD lahir pada tahun 1972 sebagai Pelatip (Pelatihan Pegawai) di bawah koordinasi Biro Kepegawaian Setda Propinsi Jawa Tengah. Pada tahun 1974 berubah menjadi Pusdiklat Propinsi Dati I Jawa Tengah yang bertempat di kamar 14 kantor Setda Propinsi Dati I Jawa Tengah Jl. Menteri Supeno No. 1 Semarang, kemudian pada tahun 1982 berpindah ke ke Jl. Imam Bonjol No. 42 Semarang, pada tahun 1985 berpindah lagi ke Jl. Jajah Mada No. 112 Semarang, dan pada tahun 1988 berpindah ke tempat yang sampai saat ini masih ditempati yaitu di Jl. Setiabudi No. 201 A Srandol Semarang.

Sebagai konsekuensi pemberlakuan Otonomi Daerah dengan ditetapkannya dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam salah satu pasalnya mengisyaratkan adanya kewenangan pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah, sebutan Instansi disesuaikan dan berubah sesuai nomenklatur menjadi Diklat Propinsi Jawa Tengah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah telah dilaksanakan penataan organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menempatkan fungsi pendidikan dan pelatihan pegawai yang semula dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah, dialihkan kepada lembaga tersendiri yang yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Pada tahun 2001, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pemb Lintas Kab/Kota Propinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Badan Kepegawaiaan Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Masal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah dibentuklah Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Jawa Tengah yang bertempat di gedung ex. APDN, Jl. Setiabudi 201 A Semarang.

Sehubungan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka terjadi perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan SOTK.

Pada tahun 2017 dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah memunculkan

perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Termasuk diantaranya Badan Pendidikan dan Pelatihan (nomenklatur sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008) resmi mengalami transformasi menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.

Perubahan nomenklatur bukan sekedar pergantian “kulit”, namun membawa konsekuensi perubahan tugas dan fungsi yang cukup signifikan. Berdasar Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah adalah organisasi perangkat daerah yang bertugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. BPSDMD bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tugas tersebut menyiratkan sebuah tanggung jawab yang semakin luas, bukan lagi sekedar penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana tugas pokok Badan Pendidikan dan Pelatihan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah namun melaksanakan tugas pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Jawa Tengah.

6.2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (BPSDMD)

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021. Struktur organisasi ini merupakan hasil penataan kembali SOTK sebelumnya (Perda Nomor 7 Tahun 2008).

Sedangkan dalam menjalankan tugas pokok organisasi daerah BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Untuk melaksanakan tugas di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan Sumber Daya ASN;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan Sumber Daya Manusia ASN;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan Sumber Daya Manusia ASN;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN;

5. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya
- Sedangkan

Sejak berdirinya hingga sekarang BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Drs. MT Sudharta | Periode 8 Agustus 1972 s/d 12 Desember 1980 |
| 2. Drs. Sri Subagyo | Periode 13 Desember 1980 s/d 31 Juli 1982 |
| 3. Muhadi, SH | Periode 1 Agustus 1982 s/d 25 Januari 1990 |
| 4. Drs. Oetomo Toeloes | Periode 26 Januari 1990 s/d 13 Desember 1991 |
| 5. Rudjito, SH | Periode 14 Desember 1991 s/d 17 Mei 1994 |
| 6. Drs. Sugono | Periode 18 Mei 1994 s/d 01 September 1998 |
| 7. Drs. Poetranto | Periode 2 September 1998 s/d 8 Agustus 1999 |
| 8. Diah Anggraeni, SH, MM | Periode 9 Agustus 1999 s/d 3 November 2003 |
| 9. dr. Isi Mularsih, MARS | Periode 4 November 2003 – 2 Maret 2007 |
| 10. Sumaryati, SH, M.Si | Periode 3 Maret 2007 – 30 Juni 2009 |
| 11. Urip Sihabudin, SH, MH | Periode 1 Juli 2009 s/d 1 Juli 2010 |
| 12. Drs. Kris Nugroho, M.Si, MM | Periode 1 Juli 2010 s/d 31 Desember 2012 |
| 13. M. Masrofi, S.Sos, M.Si | Periode 2 Januari 2013 s/d 30 Januari 2015 |
| 14. Herru Setiadhie, SH, M.Si | Periode 2 Februari 2015 s/d 30 Desember 2016 |
| 15. SP Andriyani S, SH | Periode 3 Januari 2017 s/d 2 Januari 2018 |
| 16. Riena Retnaningrum, SH | Periode 8 Januari 2018 s/d 25 Januari 2019 |
| 17. Drs. M. Arief Irwanto, M.Si | Periode 25 Januari 2019 s/d 18 April 2023 |
| 18. Dr. Sadimin, S.Pd, M.Eng | Periode 1 September 2023 s/d Sekarang |

6.3. Fungsi Strategis BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah (RPJMD) Tahun 2018- 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019. RPJMD tersebut merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 dengan Visi : “Jawa Tengah Yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari” dan ditetapkan 6 (enam) Misi yang mencakup tentang kualitas sumber daya manusia dan masyarakat, perekonomian daerah, politik dan tata kelola pemerintahan, sumber daya alam, sarana prasarana wilayah dan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah NKRI. Visi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2024 adalah: ”MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI” Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan *guyup* untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat Reformasi Birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan
4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Selain Visi dan Misi tersebut di atas juga terdapat 10 program prioritas Pj Gubernur Jawa Tengah, yaitu :

1. Menyukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 secara Luber dan Jurdil.
2. Menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Pengendalian inflasi dan ketahanan pangan.
4. Penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran dan stunting.
5. Penanganan dampak perubahan iklim (kekeringan, polusi, dan karhutla).
6. Peningkatan kualitas sistem Pendidikan vokasi.
7. Pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing UMKM di sektor ekonomi kreatif.
8. Pengembangan sistem ekonomi sirkular dan transisi energi.
9. Pengembangan layanan publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
10. Meningkatkan pengawasan internal Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sesuai tugas dan fungsinya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mendukung perwujudan Misi ke-2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah Tahun 2018 – 2024, yaitu: “Mempercepat Reformasi Birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota” yang selaras dengan misi ke – 3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Tengah 2005 – 2025, yaitu : Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta pengembangan jejaring. Tugas pokok dan fungsi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah antara lain :

1. Membantu Gubernur dalam melaksanakan program prioritas, melaksanakan fungsi penunjang bidang pengembangan SDM ASN.
2. Sebagai lembaga terakreditasi sehingga mempunyai kapasitas untuk identifikasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan standar mutu pelatihan.
3. Sebagai pembina pengembangan kompetensi Kabupaten/Kota dan Provinsi, memiliki kewajiban menyusun norma standar prosedur dan mengintegrasikan pengembangan kompetensi di Kabupatrn/Kota dan OPD Provinsi Jawa Tengah.

4. *Leading Jateng Corporate University*, memimpin implementasi strategi dan metode pengembangan kompetensi SDM Aparatur di Jawa Tengah secara terintegrasi dan berkesinambungan dengan semua *stakeholder* agar selaras dengan kebutuhan organisasi untuk melayani masyarakat.
5. Fasilitasi Kementerian/Lembaga atau Provinsi lain, berkolaborasi dengan semua mitra pengembangan kompetensi di Indonesia untuk pembangunan sumber daya manusia dan penjaminan mutu pelatihan.
6. Pemenuhan kewajiban pengembangan kompetensi ASN Provinsi, dilaksanakan dengan mengintegrasikan program identifikasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan kompetensi sesuai dengan amanat regulasi dan tuntutan pelayanan masyarakat terkini.

Adapun dalam rangka implementasi visi dan misi Gubernur Jawa Tengah, BPSDMD menetapkan tujuan menjadi lembaga pengembangan kompetensi ASN untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia melalui SDM yang kompeten dan profesional dalam memberikan pelayanan *excellent* kepada Masyarakat dan menjadi *problem solving* bagi permasalahan pembangunan di Jawa Tengah.

Adapun untuk mewujudkan hal tersebut, BPSDMD memiliki kebijakan adaptif antara lain :

1. Mewujudkan Pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan SDM Organisasi
2. Melaksanakan Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan penjaminan mutu pelaksanaan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang terintegrasi melalui *Jateng Corporate University* menuju *Jateng Pinter Bareng*
3. Penguatan Sistem Informasi Manajemen Pelatihan dan Sarana Prasarana pelatihan berbasis digital untuk mewujudkan *Techno Training Center*
4. Fasilitasi kepada Stakeholder terkait untuk mewujudkan reformasi birokrasi berkelas dunia

Pemerintahan yang bersih dan baik telah menjadi isu nasional, begitu juga di Jawa Tengah. Salah satu upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih menjadi syarat utama yang harus dipenuhi. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak lepas dari prinsip pengelolaan yang baik terhadap kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*), dan yang paling utama adalah sumber daya manusia aparatur. Oleh karena itu, program reformasi birokrasi harus melibatkan atau mendasarkan pada ketiga komponen utama tersebut disamping faktor-faktor pendukung lainnya.

Sumber daya aparatur mempunyai peran utama sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan; menjalankan fungsi manajemen pelayanan publik; pengelola pemerintahan; manager / *corporate leader*; dan administrator (pengelola aset dan keuangan negara/daerah). Sehingga tuntutan reformasi birokrasi atau tata kelola pemerintahan yang baik secara langsung akan membawa konsekuensi pada masalah kinerja aparatur.

Untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja aparatur dilakukan berbagai upaya peningkatan kompetensi, diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan. Harapannya tentu agar meningkat pengetahuan, keterampilan serta sikap dan perilaku aparatur, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai jabatan secara kompeten dan berintegritas.

Dalam melaksanakan fungsi pendidikan dan pelatihan aparatur BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 – 2024 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2018 – 2024 beserta target keluaran (output) dan hasil (outcome) yang akan dicapai.

Ada tiga komponen utama yang berpengaruh dalam upaya pengembangan SDM Aparatur, yaitu:

1. Standarisasi (kompetensi, lisensi, dan perangkat pembelajaran);
2. Sertifikasi;
3. Pengembangan Kompetensi (pelatihan, seminar, kursus, dll).

Implementasi ketiga komponen pengembangan SMD Aparatur tersebut sudah mulai dirintis sejak tahun 2015 dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sinergitas Pilar Pengembangan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mengatur keterpaduan antar lembaga dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan, penyusunan peta dan jenis jabatan, penetapan standar kompetensi jabatan, penempatan pegawai ASN dalam jabatan, penetapan kebutuhan kompetensi pegawai ASN, dan evaluasi pengembangan kompetensi, penetapan kebutuhan diklat, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan pendidikan dan pelatihan.

Berbagai regulasi tersebut berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM Aparatur. Termasuk pula yang cukup mendasar adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, juga turut mempengaruhi pola pengembangan kompetensi tersebut. Dalam UU tersebut urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah berpengaruh terhadap struktur organisasi dan tata kerja instansi daerah, dimana nantinya satu instansi akan menangani satu urusan. Adanya perubahan urusan dan organisasi, berpengaruh pula terhadap jabatan dalam organisasi tersebut. Sehingga keselarasan urusan dan wewenang akan memudahkan dalam menyusun standar kompetensi jabatan PNS sebagai dasar penyusunan pola pengembangan kompetensi SDM Aparatur demi mewujudkan ASN yang profesional.

Dengan berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus minimal 20 jam pelajaran dalam waktu satu tahun.

Sejalan dengan implementasi kebijakan pengembangan SDM Aparatur serta melihat kondisi dan kebutuhan ASN saat ini dan di masa mendatang, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah juga telah

mulai merintis suatu konsep pengembangan SDM Aparatur yang terintegrasi menuju Jateng *Corporate University* (J-CU). Konsep ini merupakan sebuah model pengembangan SDM Aparatur yang komprehensif melalui beragam jenis pengembangan kompetensi dengan penanganan terhadap berbagai perangkat pendukungnya, seperti regulasi, metode, sarana prasarana serta pemanfaatan beragam sumber daya. Artinya, pelaksanaan tugas fungsi BPSDMD tak lagi hanya sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan saja, melainkan lebih mengarah pada pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN dalam arti luas, sekaligus menjadi lembaga penjaminan mutu kompetensi ASN demi tercapainya tujuan yaitu terwujudnya ASN yang kompeten, profesional dan berintegritas.

Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah secara jelas digambarkan jenjang-jenjang struktural yang terdiri dari Kepala Badan sebagai unsur pimpinan sampai kepada jenjang yang berada di bawahnya sebagai unsur pelaksana dan kelompok jabatan fungsional. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya pembagian tugas yang dilaksanakan secara menyeluruh.

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu;
4. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis;
5. Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional;
6. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut adalah uraian tugas dan tata kerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah per unit kerja, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan, dan membawahi :

Sekretariat

- a. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
- b. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
- c. Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial

- e. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Sekretaris mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan, untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan kegiatan di lingkungan Badan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi;
- f. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan yang membawahi :

- a. Sub Bagian Program bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan meliputi:
 - 1) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbag Program;
 - 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
 - 3) Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan badan;
 - 4) Menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan badan;
 - 5) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
 - 6) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan badan;
 - 7) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Sub Bagian Keuangan bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan dan aset meliputi:

- 1) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbag Keuangan;
 - 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - 3) Menyiapkan bahan pengorganisasian kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - 4) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan badan;
 - 5) Menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dan pembukuan;
 - 6) Menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
 - 7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
 - 8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;
 - 9) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi:
- 1) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - 3) Menyiapkan bahan pengorganisasian kebijakan teknis dibidang Umum dan Kepegawaian;
 - 4) Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan badan;
 - 5) Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan badan;
 - 6) Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan badan;
 - 7) Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan badan;
 - 8) Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan badan;
 - 9) Menyiapkan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan badan;
 - 10)Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan badan;
 - 11)Penyiapan bahan pelaksanaan *service excellent*;
 - 12)Penyiapan bahan pelaksanaan *command center*;
 - 13)Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu

Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang sertifikasi kompetensi, pengembangan perangkat pembelajaran dan tenaga pengembang kompetensi, dan pengendalian mutu dan kerjasama.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang sertifikasi kompetensi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan perangkat pembelajaran dan tenaga pengembang kompetensi;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengendalian mutu dan kerjasama;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu terdiri atas :

- a. Sub Koordinator Bidang Sertifikasi Kompetensi;
- b. Sub Koordinator Bidang Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi;
- c. Sub Koordinator Bidang Pengendalian Mutu Dan Kerjasama.

4. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis

Pengembangan Kompetensi Teknis mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan kompetensi teknis umum, pengembangan kompetensi teknis inti, dan pengembangan kompetensi teknis pilihan.

Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan kompetensi teknis umum;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan kompetensi teknis inti
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan kompetensi teknis pilihan; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, terdiri atas :

- a. Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Umum;
- b. Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Inti;
- c. Subkoordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan.

5. Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional

Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pelatihan pembentukan jabatan fungsional, pelatihan penjurangan jabatan fungsional, dan pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pelatihan pembentukan jabatan fungsional;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pelatihan penjurangan jabatan fungsional;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, terdiri atas :

- a. Sub Koordinator Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional;
- b. Sub Koordinator Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional;
- c. Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional.

6. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial

Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan kompetensi pimpinan perangkat daerah, pengembangan kompetensi kepemimpinan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrator, dan pengembangan kompetensi kepemimpinan jabatan pengawas dan pelatihan prajabatan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis ,pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan kompetensi pimpinan perangkat daerah
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan kompetensi kepemimpinan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrator;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan kompetensi kepemimpinan jabatan pengawas dan pelatihan prajabatan;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, terdiri atas :

- a. Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah;
- b. Subkoordinator Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator;
- c. Subkoordinator Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pengawas dan Pelatihan Prajabatan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

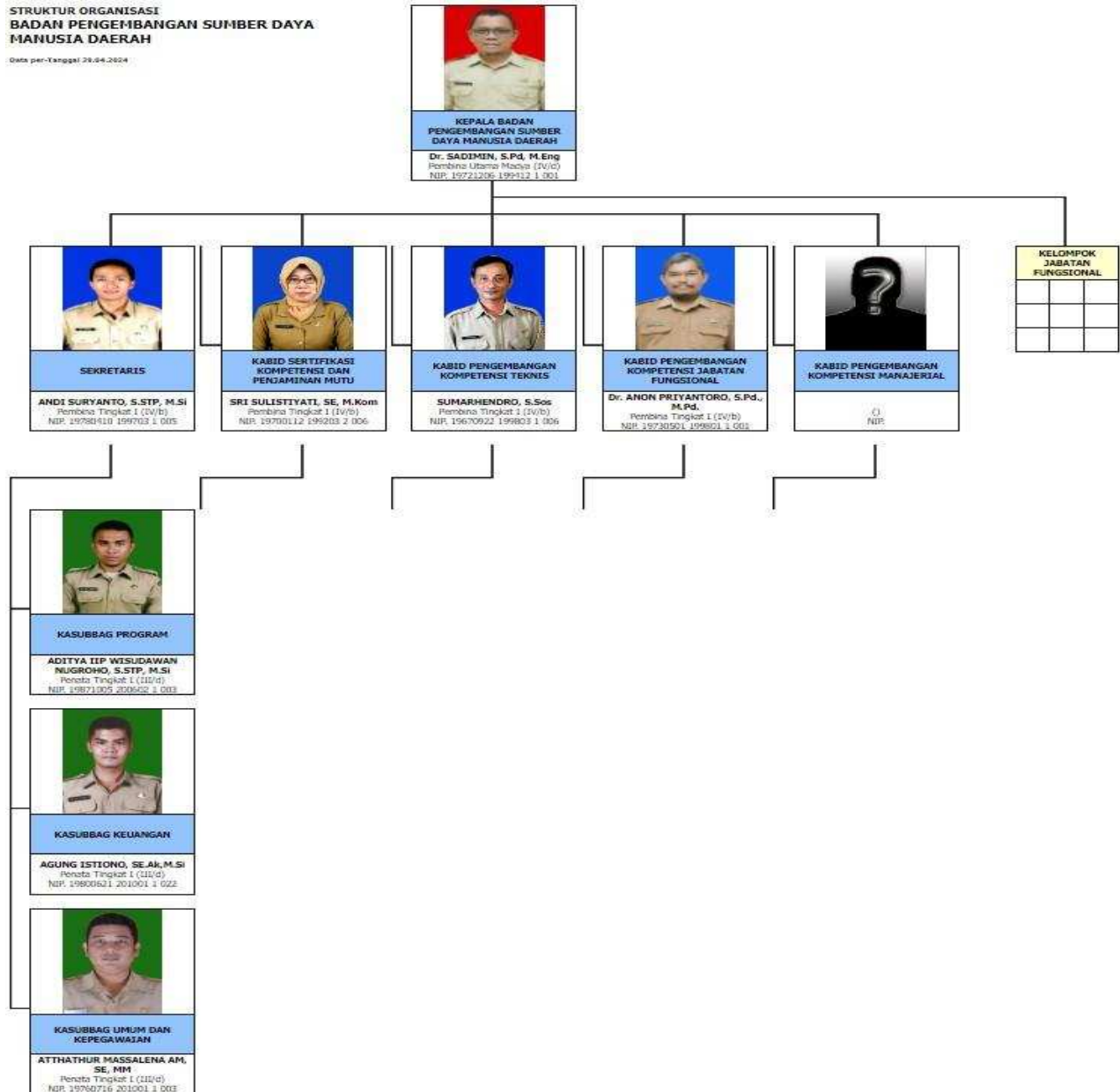
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan, Kepala Bidang, atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Jabatan Fungsional BPSDMD Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

- a. Widyaiswara Ahli Pertama, Widyaiswara Ahli Muda, Widyaiswara Ahli Madya, dan Widyaiswara Ahli Utama;
- b. Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda;
- c. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda;
- d. Pustakawan Ahli Muda;
- e. Pranata Komputer Ahli Pertama; dan
- f. Arsiparis Ahli Pertama.

Para Jabatan Fungsional tersebut dalam berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :



Gambar 6. 1 Struktur Organisasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

6.4. Sumber Daya Manusia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah

Jumlah sumber daya manusia di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 272 orang. Secara rinci telah dijelaskan dalam Sistem Informasi Grafis Kepegawaian (SiFika) yang disajikan pada halaman website BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan ringkasan sebagai berikut:

Data Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jabatan

Nama Jabatan	Jumlah
Struktural	8
Fungsional Widyaiswara	39

Nama Jabatan	Jumlah
Fungsional Analis Analisis Pengembangan Kompetensi	9
Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran	1
Fungsional Pustakawan	1
Fungsional Pranata Komputer	1
Fungsional Arsiparis	1
Fungsional Umum	69
Tenaga Non-ASN	33
Tenaga <i>Outsourcing</i>	110
Jumlah	272

Sumber : Data Kepegawaian BPSDMD Provinsi Jawa Tengah per Januari 2025

Data Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah
18 – 30	39
31 – 40	74
41 – 50	77
>50	82

Sumber : Data Kepegawaian BPSDMD Provinsi Jawa Tengah per Januari 2025

Data Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jabatan	Tingkat Pendidikan							Jenis Kelamin		
	SD	SMP	SMA/K	D3	D4	S1	S2	S3	L	P
ASN	2	1	14	8	3	35	60	6	81	48
Non-ASN	0	0	10	3	1	19	0	0	19	14
<i>Outsourcing</i>	7	8	83	3	1	8	0	0	103	7
Jumlah	9	9	107	14	5	62	60	6	203	69

Sumber : Data Kepegawaian BPSDMD Provinsi Jawa Tengah per Januari 2024

Dari segi fasilitas, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dilengkapi dengan sumber daya sarana dan prasarana yang sangat memadai guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi lembaga sebagai penunjang urusan pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN. Data sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki BPSDMD Provinsi Jawa Tengah juga telah disajikan pada halaman website, dengan rincian pada tabel berikut ini:

1. Asrama Eksekutif Merapi

Fasilitas :

- 1 Ruang Kelas Besar
- Ruang Kelas Kecil
- Ruang Transit Pengajar
- Ruang Sekretariat

- Ruang Makan
 - Poliklinik
 - Mushola
 - 50 Kamar Kapasitas 100 Orang (AC, Televisi, R.Tamu, Kamar Mandi Dalam, WiFi)
2. Asrama Eksekutif Muria
- Fasilitas :
- 1 Ruang Kelas Besar
 - 1 Ruang Kelas Kecil
 - Ruang Transit Pengajar
 - Ruang Makan
 - Mushola
 - Muria 1 : 22 Kamar Kapasitas 44 Orang
 - Muria 2 : 15 Kamar Kapasitas 30 Orang (AC, Air Panas, Televisi, Kamar Mandi Dalam, WiFi)
3. Asrama Sindoro
- Fasilitas :
- Sindoro I : 53 Kamar Kapasitas 106 Orang (AC, Kamar Mandi Dalam, WiFi)
 - Sindoro II : 54 Kamar Kapasitas 108 Orang (AC, Tempat Tidur Susun, WiFi, Kamar Mandi Luar)
 - Sindoro III: 51 Kamar Kapasitas 102 Orang (AC, Kamar Mandi Dalam, WiFi, Air Panas, Springbed)
4. Asrama Sumbing
- Fasilitas :
- Sumbing I : 16 Kamar Kapasitas 32 Orang (AC, Kamar Mandi Dalam, WiFi)
 - Sumbing II : 24 Kamar Kapasitas 48 Orang (AC, Kamar Mandi Dalam, WiFi)
 - Sumbing III : 32 Kamar Kapasitas 64 Orang (AC, Kamar Mandi Dalam, WiFi)
 - Sumbing IV : 24 Kamar Kapasitas 48 Orang (AC, Kamar Mandi Dalam, WiFi, Televisi, Springbed)
5. Gedung Pendidikan Sindoro
- Fasilitas :
- 4 Kelas Kecil (AC, Sound System standart, Kursi 40 buah & Meja, LCD Proyektor, WiFi)
 - 4 Kelas Besar (AC, Sound System standart, Kursi 60 buah, LCD Proyektor, WiFi, Meja Round Table)
 - Ruang Transit Pengajar
 - Ruang Sekretariat
 - Ruang Laktasi

6. Gedung Pendidikan Sumbing

Fasilitas :

- 9 Ruang Kelas Kapasitas 360 Orang (AC, Sound System standart, Kursi 40 buah & Meja, LCD Proyektor, WiFi)
- 1 Aula Kapasitas 150 Orang (AC, Ruang Transit, Sound System standart, Kursi 150 bh, Toilet, WiFi)
- Ruang Transit Pengajar
- Ruang Sekretariat
- Ruang Laktasi

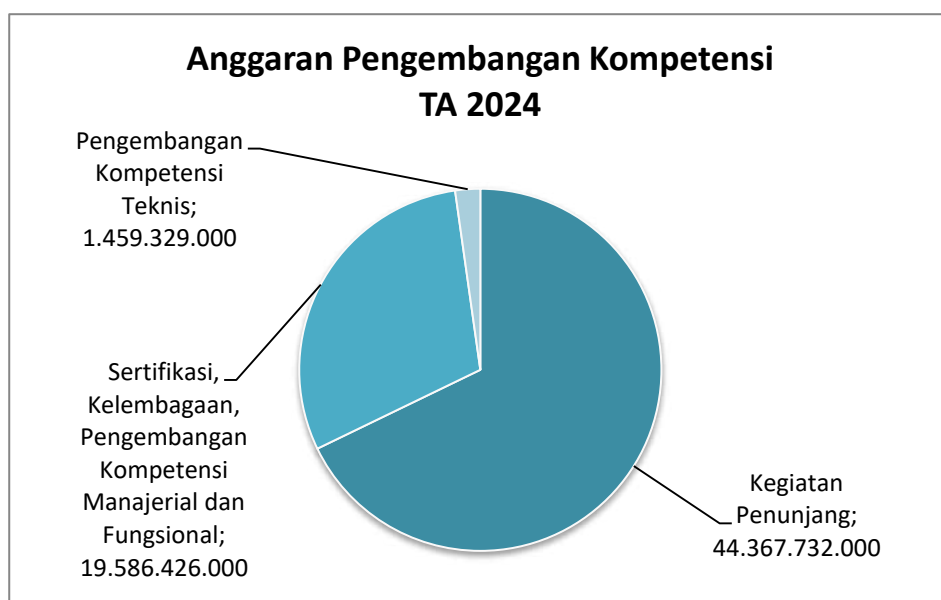
7. Gedung Pendidikan Merbabu

Fasilitas :

- Ruang Kelas Kapasitas 240 Orang (AC, Sound System standart, Kursi 40 buah & Meja, LCD Proyektor, WiFi)
- Ruang Transit Pengajar
- Mess WI
- Lapangan Parkir Luas

6.5. Pelatihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Sebagai implementasi pola kebiasaan baru serta sebagai bentuk inovasi pengembangan kompetensi, maka BPSDMD Provinsi Jawa Tengah melakukan berbagai pelatihan yang kekinian dan futuristik sesuai kebutuhan. Kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah di tahun 2024, didukung dengan total alokasi anggaran sebesar Rp65.413.487.00,00. Khusus alokasi anggaran Pengembangan Kompetensi sebagaimana berikut ini :



Sumber: DPPA - Belanja SKPD Perubahan

Gambar 6. 2 Anggaran Pengembangan Kompetensi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah TA 2024

Dalam menyelenggarakan pelatihan, BPSDMD menerapkan 3 (tiga) metode penyelenggaraan yaitu, APBD/ Biaya Instansi Pengirim (BIP), Penjaminan Mutu, dan Swakelola. Pada tahun 2024, BPSDMD menyelenggarakan pelatihan sebagai berikut :

1. Pengembangan Kompetensi Teknis

- a. Seminar/Workshop Tematik Kompetensi Teknis Pilihan
- b. MOOC Tematik - English for ASN
- c. Pelatihan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (BIP)
- d. Pelatihan Teknis Pengelolaan Info Publik / Kehumasan (BIP)
- e. Pelatihan Teknis Desain Grafis & Multimedia (BIP)
- f. MOOC Administrasi Dasar
- g. MOOC Tematik Pendidikan Anti Korupsi
- h. Seminar/Workshop Tematik Kompetensi Teknis Umum
- i. Pelatihan Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BIP)
- j. Pelatihan Teknis SAKIP (BIP)
- k. Pelatihan Teknis Optimalisasi Kinerja ASN (BIP)
- l. Pelatihan Teknis Manajemen ASN (BIP)
- m. Pelatihan Teknis Manajemen Resiko dalam SPIP Terintegrasi (BIP)
- n. Pelatihan Teknis Pengelolaan Pemerintahan Desa (BIP)
- o. MOOC Tematik ASN BerAKHLAK
- p. Seminar/Workshop Tematik Kompetensi Teknis Inti
- q. Pelatihan Teknis Pengembangan Desa Wisata (BIP)
- r. Pelatihan Teknis Mitigasi Bencana (BIP)
- s. Pelatihan Teknis Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (BIP)
- t. Pelatihan Teknis Perencanaan dan Penganggaran (BIP)
- u. Pelatihan Teknis Bidang Pertanian / Perkebunan (BIP)
- v. Pelatihan Teknis Manajemen Kearsipan (BIP)
- w. Pelatihan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Level 1 (BIP)
- x. Pelatihan Teknis Perijinan Berusaha Bidang Penanaman Modal
- y. Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa

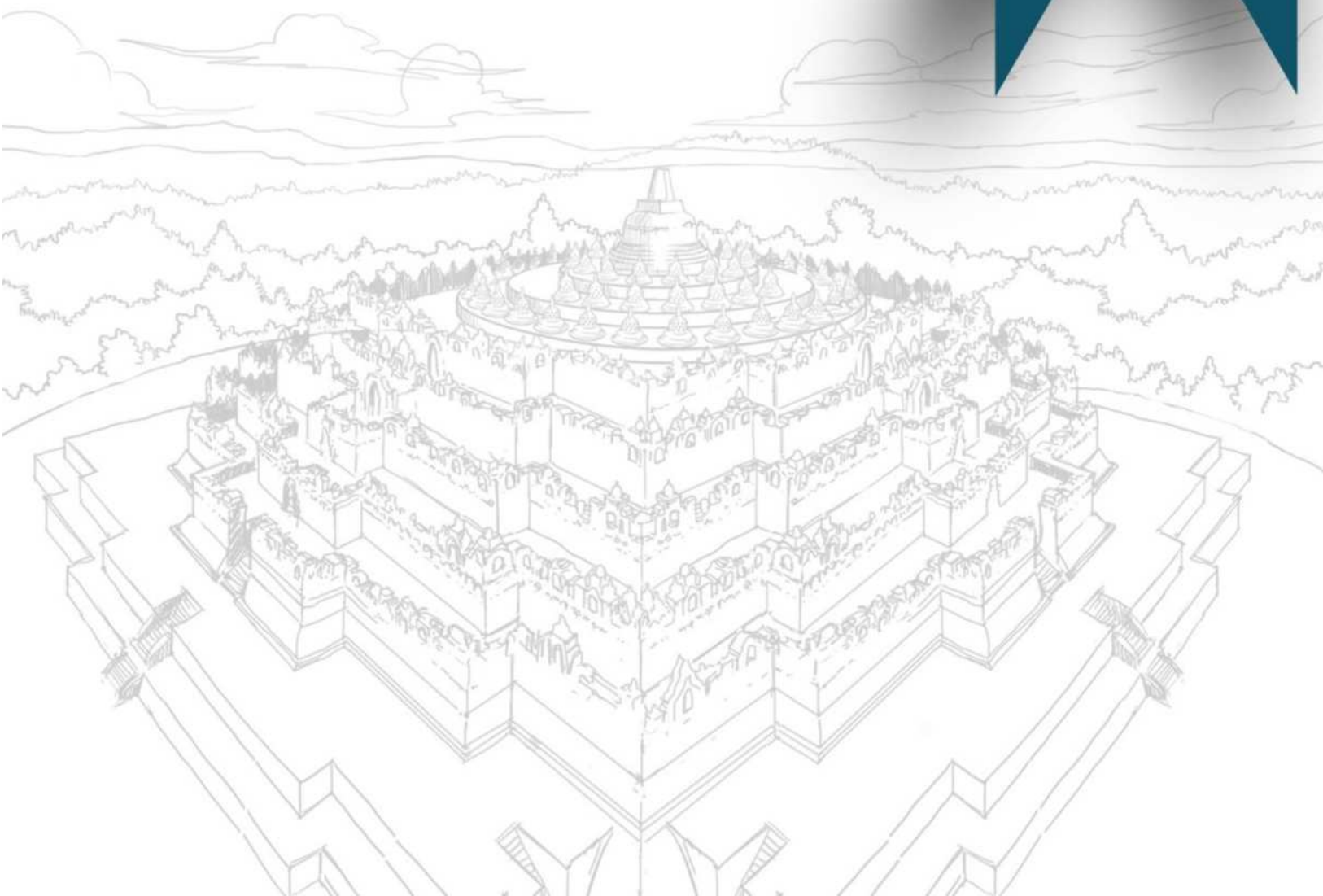
2. Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional

- a. Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (BIP)
- b. Pelatihan Bagi P3K (Orientasi PPPK) / BIP
- c. Pelatihan Penjurusan JF Rumpun Manajemen / BIP
- d. Pengembangan Substantif Bagi JF Rumpun Pendidikan (workshop/seminar/bimtek/pelatihan)
- e. Pelatihan Penjurusan JF Rumpun Kesehatan (jenjang pertama / muda / madya) / BIP

- f. Pengembangan Kompetensi Teknis Bagi JF Rumpun Pendidikan
(workshop/seminar/bimtek/pelatihan)
 - g. Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Bagi JF Rumpun Kesehatan / BIP
 - h. Pengembangan Kompetensi Teknis Bagi JF Rumpun Sosial
(workshop/seminar/bimtek/pelatihan)
 - i. Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Bagi JF Rumpun Manajemen / BIP
 - j. Pelatihan Bagi P3K (Orientasi PPPK)
3. Pengembangan Kompetensi Manajerial
- a. Pelatihan Dasar CPNS - Pelatihan Dasar CPNS Gol II/III (BIP) Tahun 2024
 - b. Pengawas - Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas (APBD) Th. 2024
 - c. Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas (BIP) Th. 2024
 - d. Pelatihan Struktural Jabatan Administrator (APBD) Tahun 2024
 - e. Pelatihan Struktural Jabatan Administrator (BIP) Tahun 2024
 - f. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II Tahun 2024
 - g. Program Eksekutif Daerah Tahun 2024
 - h. Local Government Leadership Trainer (LGLT) Tahun 2024
 - i. Orientasi Bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024
4. Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
- a. Workshop Rencana Pengembangan Kompetensi
 - b. Seminar Nasional Widyaiswara
 - c. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (APBD & BIP) Tahun 2024
 - d. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan (APBD) Tahun 2024
 - e. Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa (APBD & BIP) Tahun 2024
 - f. FGD Penyusunan Kurikulum
 - g. FGD Penyusunan Modul

BAB 7

PENUTUP



BAB VII

Penutup

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp22.610.245.879,00 atau mencapai 102,40% dari alokasi anggaran sebesar Rp22.080.000.000,00.

Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp63.181.626.208,00 atau mencapai 96,59% dari alokasi anggaran sebesar Rp65.413.487.000,00.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp155.611.042.881,05 yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp408.587.045,70; Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp154.898.308.097,85; dan Aset Lainnya (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp304.147.737,50.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp155.611.042.881,05.

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/(defisit) dari kegiatan operasional, surplus/(defisit) dari kegiatan non-operasional, dan surplus/(defisit) LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan Daerah-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp24.000.370.999,30 sedangkan Beban-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp64.485.121.822,44. Surplus/defisit Laporan Operasional sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar minus Rp. (40.484.750.823,14).

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp.155.524.413.375,19 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp40.484.750.823,14 dan ditambah RK PPKD sebesar Rp40.571.380.329,00 sehingga Ekuitas BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp155.611.042.881,05.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

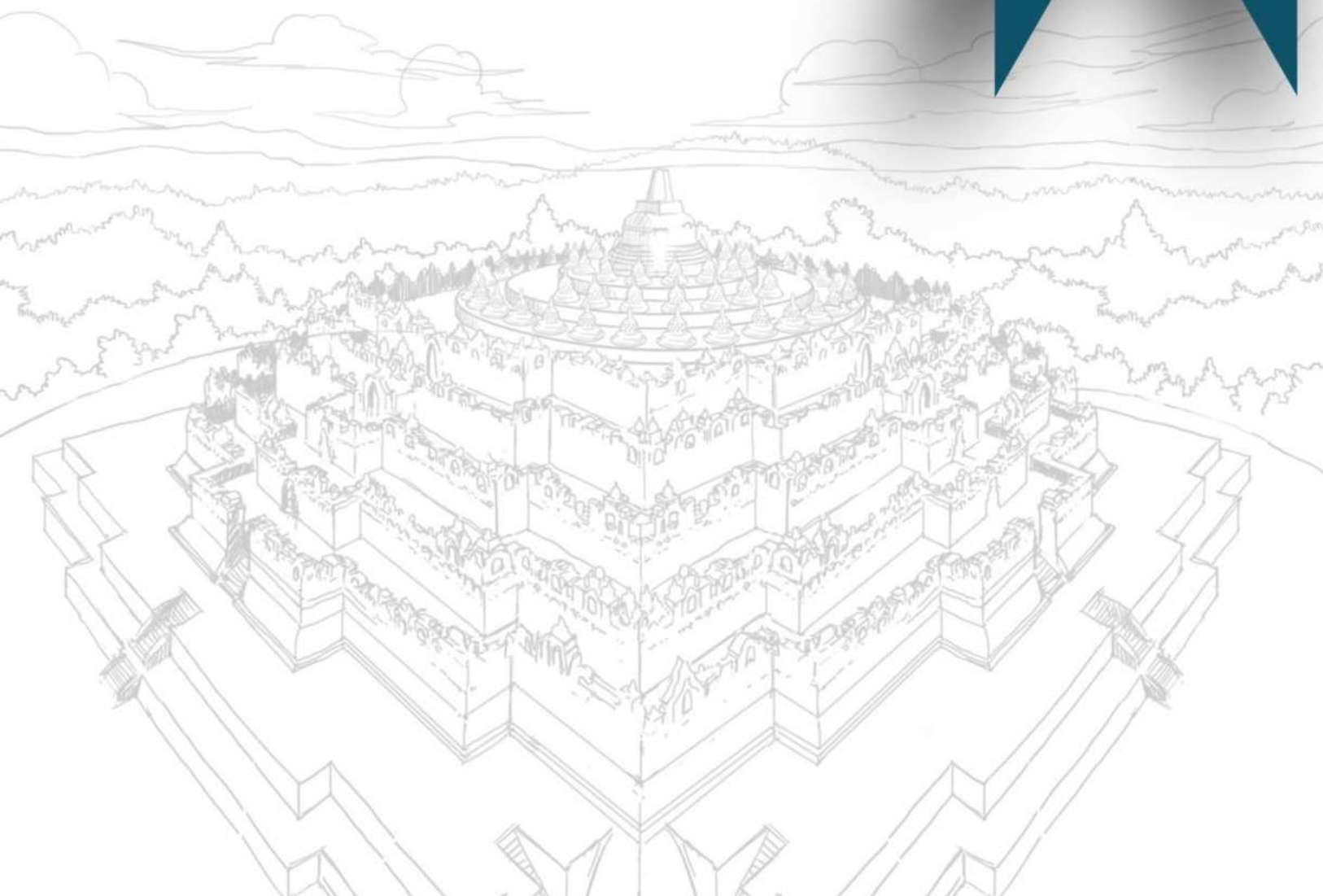
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2024.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2024. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0008288 Tanggal 31 Oktober 2024 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, pengambilan keputusan lainnya serta memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.

Apabila dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan maupun kesalahan, kami mohon koreksi demi terwujudnya penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**
BPSDMD
Dr. SADIMIN, S.Pd., M.Eng.
Pembina Utama Madya
NIP. 19721206 199412 1 001

LAMPIRAN TAMBAHAN





LAPORAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Periode s/d DESEMBER 2024

Pengguna Barang : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Kode Lokasi : 11.01.33.74.050401.00000.00000

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Nilai Aset	Selisih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
52	BELANJA MODAL	1.177.600.000,00	1.140.913.800,00	-	-	
1.3	ASET TETAP	-	-	1.140.913.800,00	-	
520201030005	BELANJA MODAL POMPA	38.000.000,00	37.000.000,00	-	-	
1.3.2.01.03.05	POMPA	-	-	37.000.000,00	-	
520202010002	BELANJA MODAL KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	580.000.000,00	553.400.000,00	-	-	
1.3.2.02.01.02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	-	-	553.400.000,00	-	
520205020004	BELANJA MODAL ALAT PENDINGIN	106.600.000,00	105.400.000,00	-	-	
1.3.2.05.02.04	ALAT PENDINGIN	-	-	105.400.000,00	-	
520206010002	BELANJA MODAL PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	438.000.000,00	430.215.000,00	-	-	
1.3.2.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA	-	-	254.380.000,00	-	REKLASIFIKASI
1.3.2.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	-	-	63.210.000,00	-	REKLASIFIKASI
1.3.2.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	-	-	83.660.000,00	-	REKLASIFIKASI
1.3.2.10.02.01	PERALATAN MAINFRAME	-	-	6.970.000,00	-	REKLASIFIKASI
1.3.2.10.02.04	PERALATAN JARINGAN	-	-	21.995.000,00	-	REKLASIFIKASI
520501010001	BELANJA MODAL BUKU UMUM	15.000.000,00	14.898.800,00	-	-	
1.3.5.01.01.01	BUKU UMUM	-	-	14.898.800,00	-	



MUTASI ASET EKSTRAKOMPITABEL
 PROVINSI JAWA TENGAH
 Tahun 2024
 Periode s/d Bulan DESEMBER 2024

Kode Lokasi : 050401
 Bidang : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
 Sub Bidang : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
 Satuan Kerja :

No.	Uraian	SALDO AWAL		TAMBAH																		SALDO AKHIR								
		TAHUN 2024		REKLASIFIKASI						REKLASIFIKASI						KURANG						PERIODE 202412								
		Jml	Harga	Jml	MNKK	Mutasi Masuk	Belanja Barang Jasa	Hibah	Jml	IKM	IKM	IKM	IKM	IKM	IKM	IKM	IKM	IKM	IKM	IKM	IKM	IKM	IKM	IKM	IKM	IKM	IKM	Jml	Harga	
1	2																													
1.1.3.2.01	ALAT BESAR																													
2.1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN																													
3.1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR																													
4.1.3.2.04	ALAT PERTANIAN																													
5.1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	6.189,00	1.548.737.062,00																											
6.1.3.2.06	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	81,00	23.377.436,00																											
7.1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	4,00	1.550.000,00																											
8.1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM																													
9.1.3.2.09	ALAT PERSENIATAN																													
10.1.3.2.10	ALAT KOMPUTER	74,00	27.328.425,00																											
11.1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI																													
12.1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN																													
13.1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGELOMPOKAN DAN PEMURNIAN																													
14.1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLOKASI																													
15.1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA																													
16.1.3.2.16	ALAT PERAGA																													
17.1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI																													
18.1.3.2.18	RAMBU BAMBUI																													
19.1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	2,00	720.000,00																											
20.1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	5,00	85.000.000,00																											
21.1.3.3.02	MOLUJEN																													
22.1.3.3.03	BANGUNAN MENARA																													
23.1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI																													
24.1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN																													
25.1.3.4.02	BANGUNAN AIR																													
26.1.3.4.03	INSTALASI																													
27.1.3.4.04	JARINGAN																													
28.1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN																													
29.1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA																													
30.1.3.5.03	HEWAN																													
31.1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN																													
32.1.3.5.05	TANAMAN																													
33.1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA																													
34.1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI																													
		6.315,00	1.666.712.933,00																								6.315,00	1.666.712.933,00		



Mengetahui,
 Pengurus Barang
 RIDWAN NIUGRAHA PASA, S.STP
 NIP. 19920319 201406 1 002



AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2024
 PERIODE S/D BULAN DESEMBER

Kode Lokasi : 050401
 Bidang :
 Sub Bidang :
 Satuan Kerja : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Objek	Keterangan	Perolehan		Akumusi Awal	Hibah	Mutasi Masuk	TAMBAH				KURANG				Akumulasi Akhir	NILAI BUKU			
		Jml	Harga				Mutasi Keluar	Reklas.		KOREKSI	KOREKSI	Ke Aset Lainnya	Ke Aset Ekstrakomptabel	KOREKSI			Beban	Akumulasi Akhir	NILAI BUKU
								Dari Aset Tetap	Dari Aset Lainnya										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.3.7.01.01	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BESAR	22	2.662.706.946,00	2.329.457.145,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.568.331,59	2.454.025.477,15	228.681.508,85	
1.3.7.01.02	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT ANGIKUTAN	42	3.936.829.838,00	2.660.447.983,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.486.041,87	2.742.334.004,87	1.194.495.833,33	
1.3.7.01.03	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	3	15.328.500,00	9.191.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.832.850,00	11.023.860,00	4.304.850,00	
1.3.7.01.04	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PERTANIAN	2	15.800.000,00	15.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.800.000,00	-	
1.3.7.01.05	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	5.939	22.891.010.665,00	19.048.243.807,64	563.091.638,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.935.036,10	20.384.270.481,74	2.506.740.163,26	
1.3.7.01.06	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	563	4.209.355.291,00	3.730.034.571,33	38.858.437,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.396.904,89	3.875.288.913,42	334.065.377,58	
1.3.7.01.07	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	67	249.576.000,00	233.085.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.030.200,00	235.115.250,00	14.460.750,00	
1.3.7.01.08	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT LABORATORIUM	18	606.705.000,00	517.304.100,00	19.851.962,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.325.535,90	540.481.496,40	66.223.551,60	
1.3.7.01.09	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PERSENIJATAAN	106	551.077.358,00	275.538.679,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.480.778,38	287.019.457,38	294.057.900,62	
1.3.7.01.10	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT EKSPLORASI	888	6.341.358.062,00	4.956.772.370,85	152.105.741,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381.432.339,17	5.489.310.451,02	852.047.630,80	
1.3.7.01.12	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.13	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PEMURNIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.14	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BANTU EKSPLOKASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.15	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.16	AKUMULASI PENYUSUTAN PERAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.17	AKUMULASI PENYUSUTAN PROSESPRODUKSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.18	AKUMULASI PENYUSUTAN RAMBU - RAMBU	8	35.310.000,00	22.068.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.413.750,00	26.482.500,00	8.827.500,00	
1.3.7.01.19	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN OLAH RAGA	45	273.959.720,00	273.959.720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273.959.720,00	273.959.720,00	-	
1.3.7.02.01	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN GEDUNG	46	57.531.473.483,00	33.543.039.969,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.091.975.659,50	34.635.015.028,70	22.896.458.454,30	
1.3.7.02.02	AKUMULASI PENYUSUTAN MONUMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.02.03	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN MENARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.02.04	AKUMULASI PENYUSUTAN TUGU TITIK KONTROL/PASTI	4	1.711.470.150,00	646.669.472,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.738.211,00	682.407.683,00	1.029.062.467,00	
1.3.7.03.01	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN DAN JEMBATAN	2	2.302.885.500,00	2.302.885.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.302.885.500,00	-	
1.3.7.03.02	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN AIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.03.03	AKUMULASI PENYUSUTAN AKUMULASI PENYUSUTAN INSTALASI	8	865.544.550,00	287.396.511,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.166.809,42	309.561.666,67	545.982.883,33	
1.3.7.03.04	AKUMULASI PENYUSUTAN JARINGAN	2	195.832.000,00	35.998.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.020.675,00	41.018.725,00	154.913.275,00	
1.3.7.04.01	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	7.765	104.406.323.173,00	70.805.302.780,83	1.049.446.367,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.695.801.868,62	74.506.001.007,15	30.100.332.166,85	

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
 Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah



Semarang
 PENGURUS BARANG

RIDWAN NUGRAHA, PASA, S. STP.
 NIP. 199203192014061002



AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024
PERIODE S/D BULAN DESEMBER

Kode Lokasi : 050401
 Bidang :
 Sub-Bidang :
 Satuan Kerja : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

No.	Uraian	Jml.	Nilai Akhir	Akumulasi Awal	Tambah			Kurang				Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	
					Hibah	Mutasi Masuk	Rekasi dari Aset Tetap	Rekasi dari Aset Lainnya	Koreksi	Ekstrakontabel	Mutasi Keluar				Reklas ke Aset Tetap
1	1 5 01 01 01 00 AKUMULASI AMORTISASI GOODWILL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1 5 01 01 01 00 AKUMULASI AMORTISASI LISENSI DAN FRENCHISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1 5 01 01 01 00 AKUMULASI AMORTISASI HAK CIPTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1 5 01 01 01 00 AKUMULASI AMORTISASI HAK PATEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1 5 01 01 01 00 AKUMULASI AMORTISASI SOFTWARE	11	640 561 687,00	614 504 437 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	621 018 749 50	19 542 937 50
6	1 5 01 01 01 00 AKUMULASI AMORTISASI KAJIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1 5 01 01 01 00 AKUMULASI AMORTISASI YANG MEMPUNYAI NILAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1 5 01 01 01 00 AKUMULASI AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	11	640 561 687 00	614 504 437 00	-	-	-	-	-	-	-	-	621 018 749 50	19 542 937 50	

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
 MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



Drs. Bambang D. M. Eng.
 NIP. 1972-06-199412 1 001

Semarang,
 PENGURUS BARANG

RIDWAN ROGRAHA PASA, S.STP.
 NIP. 199203192014061002



AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2024
 PERIODE S/D BULAN DESEMBER

Kode Lokasi : 050401
 Bidang :
 Sub Bidang :
 Satuan Kerja : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

No.	Uraian	Jml.	Nilai Akhir	Akumulasi Awal	Tambah			Kurang						Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	
					Reklas dari Aset tetap	Reklas dari Aset ATB	Koreksi Tambah	Reklas ke Aset Tetap	Reklas ke Aset ATB	Reklas ke Pemanfaatan	Penjualan	Ganti Rugi	Hibah dll				Koreksi
1	1.5.6.01.01.02.001 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET RUSAK BERAT/USANG	7	143.950.000,00	3.882.132.305,00	44.600.000,00	-	-	-	-	-	-	3.762.782.305,00	-	-	-	143.950.000,00	-
2	1.5.6.01.01.02.002 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.5.6.01.01.02.003 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN LAINNYA	1	565.440.000,00	280.835.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.835.200,00	-
	Jumlah	8	709.390.000,00	4.162.967.505,00	44.600.000,00	-	-	-	-	-	-	3.762.782.305,00	-	-	-	424.785.200,00	-

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
 MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



PENGURUS BARANG
 RIDWAN KURNIAHA PASA, S. STP.
 NIP. 196203192014061002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jl. Setiabudi No.201A, Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50263

BERITA ACARA INVENTARISASI FISIK PERSEDIAAN
(STOCK OPNAME)

Nomor : 0504010000000000.BSO240001

Pada hari ini, Selasa tanggal 31 bulan Desember tahun 2024 bertempat di Ruang Subbag Umum dan Kepegawaian BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : RIDWAN NUGRAHA PASA, S.STP.
NIP. : 199203192014061002
Pangkat/Gol : Penata Muda/IIIA
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

II. Nama : HERSINANDA DWIRAKA, SS.
NIP. : -
Pangkat/Gol : NON ASN
Jabatan : PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL

Telah melakukan pemeriksaan fisik berupa persediaan pada BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH, sebagai berikut dengan :

No.	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)	Keterangan
1	0100000000025	REFILL TINTA WARNA [BUAH]	2,00	68.000,00	
2	0100000000026	MOLASSES [LITER]	3,00	4.000,00	
3	0100000000061	CETAK STOPMAP BERLOGO [LEMBAR]	5,00	8.000,00	
4	0100000000061	CETAK STOPMAP BERLOGO [LEMBAR]	23,00	8.000,00	
5	0100000000061	CETAK STOPMAP BERLOGO [LEMBAR]	22,00	8.000,00	
6	0100000000007	BOLLPOINT [BIJI]	26,00	6.000,00	
7	0100000000007	BOLLPOINT [BIJI]	75,00	6.000,00	
8	0100000000007	BOLLPOINT [BIJI]	20,00	6.000,00	
9	0100000000009	KERTAS HVS F4 70 GR [RIM]	11,00	57.000,00	
10	0100000000031	BUKU KWITANSI PANJANG [BUAH]	14,00	17.000,00	
11	0100000000055	BATU BATERAI AAA [PAK]	200,00	15.000,00	
12	0100000000065	BUKU FOLIO 100 [BUAH]	12,00	25.000,00	
13	0100000000065	BUKU FOLIO 100 [BUAH]	13,00	25.000,00	
14	0100000000071	STAPLES KECIL [DUS]	10,00	21.000,00	
15	0100000000073	ISI STAPLES KECIL [DUS]	3,00	27.000,00	
16	0100000000073	ISI STAPLES KECIL [DUS]	3,00	27.000,00	
17	0100000000073	ISI STAPLES KECIL [DUS]	3,00	27.000,00	
18	01000000000778	SALBUTAMOL [TABLET]	2,00	1.000,00	
19	01000000000786	ACYCLOVIR [TUBE]	5,00	6.000,00	
20	01000000000794	CIPROFLOXACIN 500 MG [TABLET]	7,00	1.000,00	
21	01000000000817	STOPMAP KERTAS [BUAH]	200,00	2.000,00	
22	01000000000822	SNELHECTER PLASTIK [BUAH]	10,00	7.000,00	
23	01000000000822	SNELHECTER PLASTIK [BUAH]	23,00	10.000,00	
24	01000000000822	SNELHECTER PLASTIK [BUAH]	23,00	10.000,00	
25	0100000000086	TINTA STEMPEL [BOTOL]	4,00	20.000,00	
26	0100000000086	TINTA STEMPEL [BOTOL]	3,00	20.000,00	
27	0100000000093	PENGARIS BESI 40 CM [BUAH]	5,00	25.000,00	
28	0100000000095	ATOM CLIP NO 3 [DUS]	2,00	6.993,00	
29	0100000000095	ATOM CLIP NO 3 [DUS]	50,00	7.000,00	
30	0100000000095	ATOM CLIP NO 3 [DUS]	50,00	7.000,00	
31	0100000001181	KEMOCENG/SULAK KECIL [BUAH]	8,00	32.000,00	
32	010000000119	SEROK SAMPAH [BUAH]	25,00	30.000,00	
33	0100000001232	SAPU LIDI [BUAH]	125,00	11.000,00	
34	0100000001238	GELIGA 10 GR [GRAM]	2,00	6.000,00	
35	010000000174	BUKU FOLIO ISI 100 LEMBAR [BUAH]	2,00	25.000,00	

36	010000002095	PENSIL 2B [BUAH]	10,00	7.000,00
37	01000000213	BOLLINER [BUAH]	30,00	25.000,00
38	010000002172	BATU BATERAI AA [BUAH]	100,00	13.000,00
39	010000002179	STICK NOTES [PAK]	3,00	25.000,00
40	010000002179	STICK NOTES [PAK]	3,00	9.000,00
41	01000000224	SPIDOL WHITE BOARD [BUAH]	6,00	130.000,00
42	01000000224	SPIDOL WHITE BOARD [BUAH]	2,00	130.000,00
43	01000000224	SPIDOL WHITE BOARD [BUAH]	2,00	130.000,00
44	01000000240	REFILL TINTA PRINTER HP 85A [BUAH]	1,00	40.000,00
45	010000002575	HISTIGO [TABLET]	3,00	1.000,00
46	010000002578	SANMOL/PARACETAMOL [TABLET]	8,00	500,00
47	010000002578	SANMOL/PARACETAMOL [TABLET]	7,00	500,00
48	010000002599	CANDESARTAN 8 MG [TABLET]	5,00	8.000,00
49	010000002599	CANDESARTAN 8 MG [TABLET]	13,00	8.000,00
50	010000002607	ALLOPURINOL 300 MG [TABLET]	7,00	1.000,00
51	010000002609	FG TROCHES [TABLET]	3,00	2.000,00
52	010000002618	BINDER CLIPS 19 MM [DUS]	6,00	25.000,00
53	010000002649	RANITIDINE [TABLET]	2,00	1.000,00
54	01000000450	KARTU PERSEDIAAN BARANG [LEMBAR]	12,00	30.000,00
55	01000000450	KARTU PERSEDIAAN BARANG [LEMBAR]	13,00	30.000,00
56	01000000552	STAPLER NO.369 [PAK]	1,00	60.000,00
57	01000000633	ISOLASI DOUBLE TAPE 1 INCH [ROLL]	3,00	15.000,00
58	01000000732	Pool Baterai General Besar [SET]	12,00	20.000,00
59	01000000833	CANGKUL [BUAH]	2,00	100.000,00
60	01000000934	Ambroxol tablet 30 mg [TABLET]	3,00	500,00
61	01000001001	Levoflaksasin tablet 500 mg [TABLET]	5,00	400,00
62	01000001001	Levoflaksasin tablet 500 mg [TABLET]	3,00	400,00
63	01000001002	Levofloksasin tablet 500 mg [TABLET]	2,00	400,00
64	01000001040	Vit B1 [TABLET]	2,00	5.000,00
65	01000001172	BATU BATERAI BESAR ABC [SET]	12,00	20.000,00
66	010000012844	Tempat Sampah Injak Tanggung [BUAH]	5,00	95.000,00
67	01000001293	ISI STEPLES KECIL NO. 10 [PAK]	9,00	15.000,00
68	01000001293	ISI STEPLES KECIL NO. 10 [PAK]	14,00	15.000,00
69	01000001293	ISI STEPLES KECIL NO. 10 [PAK]	9,00	15.000,00
70	010000013001	HANSAPLAST [DUS]	2,00	30.000,00
71	010000013001	HANSAPLAST [DUS]	2,00	37.000,00
72	010000013001	HANSAPLAST [DUS]	2,00	37.000,00
73	010000013001	HANSAPLAST [DUS]	1,00	37.000,00
74	010000013090	amplop surat kop dinas besar [LEMBAR]	15,00	2.500,00
75	010000013090	amplop surat kop dinas besar [LEMBAR]	2,00	50.000,00
76	010000013090	amplop surat kop dinas besar [LEMBAR]	3,00	50.000,00
77	010000013093	imunal plus [TABLET]	3,00	10.000,00
78	010000013093	imunal plus [TABLET]	7,00	10.000,00
79	010000013095	ichtyol zalf [TUBE]	5,00	6.000,00
80	010000013101	kalium diclofenac 50 mg [TABLET]	4,00	2.000,00
81	010000013107	lanzoprazole 30 mg tab [TABLET]	6,00	2.000,00
82	010000013114	nalgestan tab [TABLET]	2,00	2.000,00
83	010000013117	neuropyron V [TABLET]	6,00	2.000,00
84	010000013117	neuropyron V [TABLET]	9,00	2.000,00
85	010000013117	neuropyron V [TABLET]	8,00	2.000,00
86	010000013118	combantrin [TABLET]	4,00	2.500,00
87	010000013119	new diatab [TABLET]	1,00	1.000,00
88	010000013119	new diatab [TABLET]	8,00	1.000,00
89	010000013122	OBH combi plus 60 ml [BOTOL]	2,00	20.000,00
90	010000013127	pirofel gel 20 gr [TUBE]	2,00	34.000,00
91	010000013127	pirofel gel 20 gr [TUBE]	3,00	34.000,00
92	010000013128	enbatic sachet [TABLET]	1,00	5.000,00
93	010000013129	renovit [STRIPS]	8,00	12.000,00
94	010000013132	ester C [TABLET]	8,00	2.000,00
95	010000013136	salicyl talk [BOTOL]	4,00	8.000,00
96	010000013137	scopamin [TABLET]	1,00	2.000,00
97	010000013137	scopamin [TABLET]	7,00	2.000,00
98	010000013142	stick nesco multi cek gula [BOK]	3,00	150.000,00
99	010000013143	superhoid supp [BOK]	3,00	30.000,00
100	010000013143	superhoid supp [BOK]	3,00	30.000,00
101	010000013143	superhoid supp [BOK]	2,00	30.000,00
102	010000013143	superhoid supp [BOK]	2,00	30.000,00

103	0100000013144	stopcold [TABLET]	2,00	834,00
104	0100000013154	voltadex gel 20 gr [TUBE]	1,00	39.000,00
105	0100000013154	voltadex gel 20 gr [TUBE]	1,00	39.000,00
106	0100000013154	voltadex gel 20 gr [TUBE]	1,00	39.000,00
107	0100000013155	vitromega [TABLET]	7,00	2.000,00
108	010000001334	LAKBAN HITAM 1" [ROLL]	2,00	8.000,00
109	0100000013409	KRAN AIR 3/4" [BUAH]	12,00	50.000,00
110	010000001434	BINDER CLIPS 155/32 MM [DUS]	9,00	30.000,00
111	010000001434	BINDER CLIPS 155/32 MM [DUS]	2,00	27.250,00
112	010000001434	BINDER CLIPS 155/32 MM [DUS]	4,00	30.000,00
113	010000001435	BINDER CLIPS 260/51 MM [DUS]	6,00	45.000,00
114	010000001460	TISSUE GULUNG [ROLL]	50,00	9.000,00
115	010000001589	LAKBAN HITAM 2" [ROLL]	2,00	11.000,00
116	0100000016436	BUKU AMNESIS ISI 100 1/2 [BUKU]	2,00	20.000,00
117	0100000016436	BUKU AMNESIS ISI 100 1/2 [BUKU]	3,00	20.000,00
118	0100000016437	AMPLOP KOP KABINET [LEMBAR]	600,00	3.000,00
119	0100000016442	MEMO UKURAN 1/4 FOLIO [BUKU]	35,00	15.000,00
120	0100000016443	MEMO UKURAN 1/2 FOLIO [BUKU]	10,00	20.000,00
121	0100000016443	MEMO UKURAN 1/2 FOLIO [BUKU]	20,00	20.000,00
122	0100000016508	KARTU PEMELIHARAAN [LEMBAR]	25,00	10.000,00
123	0100000016508	KARTU PEMELIHARAAN [LEMBAR]	25,00	10.000,00
124	0100000016517	SLABER BESAR [BUAH]	62,00	80.000,00
125	0100000016518	SLABER KECIL [BUAH]	37,00	60.000,00
126	0100000016519	ANTASID SYRUP [BOTOL]	1,00	7.000,00
127	0100000016528	ENERVON C PLUS STRIP [TABLET]	2,00	2.000,00
128	0100000016531	NEUROTROPIK 5000 [BUAH]	5,00	5.000,00
129	0100000016531	NEUROTROPIK 5000 [BUAH]	5,00	4.995,00
130	0100000016531	NEUROTROPIK 5000 [BUAH]	8,00	5.000,00
131	0100000016531	NEUROTROPIK 5000 [BUAH]	7,00	5.000,00
132	0100000016531	NEUROTROPIK 5000 [BUAH]	8,00	5.000,00
133	0100000016534	THROMBOPOP GEL 10 GR [TUBE]	1,00	80.000,00
134	0100000016554	CYPROFLOXACINE 500 MG [TABLET]	8,00	1.000,00
135	0100000016554	CYPROFLOXACINE 500 MG [TABLET]	8,00	1.000,00
136	0100000016559	KETOKONAZOL ZALF [TABLET]	1,00	12.000,00
137	0100000016559	KETOKONAZOL ZALF [TABLET]	8,00	12.000,00
138	0100000016561	LINCOMYCIN 500 MG [TABLET]	5,00	2.000,00
139	0100000016561	LINCOMYCIN 500 MG [TABLET]	8,00	2.000,00
140	010000001681	SAPU IJUK [BUAH]	20,00	37.000,00
141	010000001686	TISSUE BASAH [BUAH]	25,00	27.000,00
142	010000001688	TISSUE KOTAK [BUAH]	100,00	30.000,00
143	0100000016990	LAMPU LED PHILIPS 18 W [BUAH]	25,00	150.000,00
144	0100000017041	KLEM 10MM [PAK]	2,00	9.000,00
145	0100000017041	KLEM 10MM [PAK]	5,00	9.000,00
146	010000001735	ODNER FOLIO KARTON LOGAM [BUAH]	4,00	30.000,00
147	010000001735	ODNER FOLIO KARTON LOGAM [BUAH]	37,00	30.000,00
148	010000001735	ODNER FOLIO KARTON LOGAM [BUAH]	18,00	40.000,00
149	010000001735	ODNER FOLIO KARTON LOGAM [BUAH]	18,00	40.000,00
150	010000001750	LAP PEL GADING [BUAH]	12,00	30.000,00
151	010000001753	GAYUNG PLASTIK [BUAH]	20,00	16.000,00
152	010000001768	EMBER PLASTIK [BUAH]	7,00	70.000,00
153	0100000021113	Omeprazole [TABLET]	5,00	150,00
154	010000002119	SIKAT WC [BUAH]	5,00	30.000,00
155	010000002119	SIKAT WC [BUAH]	19,00	30.000,00
156	010000002136	ODNER FOLIO AKTA [BUAH]	7,00	30.000,00
157	010000002136	ODNER FOLIO AKTA [BUAH]	8,00	30.000,00
158	0100000022844	zinc dispersible 20 mg [TABLET]	5,00	1.000,00
159	0100000023424	Decadryl 60 ml [BOTOL]	1,00	20.834,00
160	010000002384	TINTA STAMPEL [BUAH]	3,00	20.000,00
161	0100000024269	Tempat sampah Tertutup [BUAH]	5,00	30.000,00
162	010000002431	Thiamphenicol 500 mg [TABLET]	7,00	2.000,00
163	010000002431	Thiamphenicol 500 mg [TABLET]	8,00	2.000,00
164	0100000024504	Bethametason Salep 5grm (@ 24 tube) [tube]	5,00	5.000,00
165	0100000024529	Cendo Citrol [BOTOL]	3,00	40.000,00
166	0100000024604	Ketokonazol krim [pcs]	7,00	12.000,00
167	0100000024706	Thiamfenikol [box]	7,00	2.000,00
168	010000002475	Gliquidone 30 mg [TABLET]	8,00	2.000,00
169	010000002476	Glyceryl guaiacolat 100 mg [TABLET]	8,00	4.000,00

170	0100000024824	Ketoconazole [tablet]	7,00	12.000,00
171	0100000024892	Vit B6 [tablet]	2,00	5.000,00
172	0100000024892	Vit B6 [tablet]	2,00	5.000,00
173	0100000024934	TAPLAK MEJA [BUAH]	2,00	95.000,00
174	0100000025684	Vitamin B6 25 mg [BOK]	2,00	5.000,00
175	010000002576	GUNTING [BUAH]	4,00	18.000,00
176	0100000026108	tempat sampah k [Buah]	5,00	131.000,00
177	0100000026108	tempat sampah k [Buah]	5,00	30.000,00
178	0100000026466	DUST MOP SET [BUAH]	25,00	80.000,00
179	0100000026511	TISU HAND TOWEL [PAK]	50,00	30.000,00
180	010000002658	SIKAT WC TANGKAI PLASTIK [BUAH]	12,00	35.000,00
181	0100000026974	SERBET MAKAN [BUAH]	37,00	20.000,00
182	0100000026993	SIKAT KAMAR MANDI TANGKAI [BUAH]	12,00	20.000,00
183	0100000026994	EMBER BESAR [BUAH]	9,00	100.000,00
184	0100000026994	EMBER BESAR [BUAH]	9,00	100.000,00
185	0100000027635	Erlamicetin [BOTOL]	2,00	10.500,00
186	0100000027635	Erlamicetin [BOTOL]	2,00	10.500,00
187	010000003050	LAMPU PHILIP 18 WATT [BUAH]	14,00	150.000,00
188	010000003256	PENGHAPUS PENSIL KECIL [BUAH]	5,00	5.000,00
189	010000003696	ALUIPURINOL [BUAH]	7,00	1.000,00
190	0100000039745	Hypafic [pcs]	1,00	120.000,00
191	010000004072	SNALHECTER FOLIO [BUAH]	26,00	5.000,00
192	010000004321	CAPSTOK/ CANTHELAN [BUAH]	12,00	32.000,00
193	0100000043253	Vit B1 tablet [box]	2,00	5.000,00
194	010000005203	STOPMAP FOLIO [PAK]	500,00	2.000,00
195	010000005456	PENGGARIS MIKA [BUAH]	11,00	7.000,00
196	010000005693	SPON CUCI [BUNGKUS]	75,00	16.000,00
197	010000005822	SENER BIASA [BUAH]	4,00	150.000,00
198	010000006055	HYDROCORTISONE [TUBE]	3,00	10.000,00
199	0100000064044	Fitting lampu plus kap aluminium E-40 [BUAH]	2,00	70.000,00
200	0100000064044	Fitting lampu plus kap aluminium E-40 [BUAH]	10,00	70.000,00
201	0100000064046	Klem U No 9 [PAK]	1,00	8.000,00
202	0100000064046	Klem U No 9 [PAK]	3,00	8.000,00
203	0100000064052	Trafo Lampu BSNE 150 Watt [BUAH]	3,00	275.000,00
204	010000006446	CLIP ATOM NO. 3 DEBOZZ [DUS]	2,00	4.500,00
205	0100000064644	Sikat Kawat [PCS]	50,00	8.000,00
206	0100000064849	sprit disosibebe 3 cc [botol]	5,00	4.000,00
207	0100000064865	Cairan infus NaCl 500 ml [fatboth]	1,00	25.000,00
208	0100000065081	Vitamin B1 100 mg [TABLET]	1,00	5.000,00
209	0100000069176	SALEP BETAMETASONE [TUBE]	5,00	5.000,00
210	0100000070724	VOUCHER BBM 50.000 [BUAH]	230,00	50.000,00
211	0100000070724	VOUCHER BBM 50.000 [BUAH]	240,00	50.000,00
212	0100000070724	VOUCHER BBM 50.000 [BUAH]	230,00	50.000,00
213	0100000070724	VOUCHER BBM 50.000 [BUAH]	46,00	50.000,00
214	0100000070724	VOUCHER BBM 50.000 [BUAH]	307,00	50.000,00
215	0100000070724	VOUCHER BBM 50.000 [BUAH]	307,00	50.000,00
216	0100000070724	VOUCHER BBM 50.000 [BUAH]	240,00	50.000,00
217	0100000070724	VOUCHER BBM 50.000 [BUAH]	307,00	50.000,00
218	0100000070724	VOUCHER BBM 50.000 [BUAH]	307,00	50.000,00
219	0100000070724	VOUCHER BBM 50.000 [BUAH]	307,00	50.000,00
220	0100000070724	VOUCHER BBM 50.000 [BUAH]	200,00	50.000,00
221	0100000070724	VOUCHER BBM 50.000 [BUAH]	307,00	50.000,00
222	0100000070724	VOUCHER BBM 50.000 [BUAH]	307,00	50.000,00
223	0100000070724	VOUCHER BBM 50.000 [BUAH]	307,00	50.000,00
224	0100000070724	VOUCHER BBM 50.000 [BUAH]	307,00	50.000,00
225	0100000070724	VOUCHER BBM 50.000 [BUAH]	307,00	50.000,00
226	0100000070724	VOUCHER BBM 50.000 [BUAH]	200,00	50.000,00
227	0100000070724	VOUCHER BBM 50.000 [BUAH]	307,00	50.000,00
228	0100000070724	VOUCHER BBM 50.000 [BUAH]	307,00	50.000,00
229	0100000070725	VOUCHER BBM 25.000 [BUAH]	117,00	25.000,00
230	0100000070725	VOUCHER BBM 25.000 [BUAH]	120,00	25.000,00
231	0100000070725	VOUCHER BBM 25.000 [BUAH]	117,00	25.000,00
232	0100000070725	VOUCHER BBM 25.000 [BUAH]	17,00	25.000,00
233	0100000070725	VOUCHER BBM 25.000 [BUAH]	140,00	25.000,00
234	0100000070725	VOUCHER BBM 25.000 [BUAH]	140,00	25.000,00
235	0100000070725	VOUCHER BBM 25.000 [BUAH]	160,00	25.000,00
236	0100000070725	VOUCHER BBM 25.000 [BUAH]	140,00	25.000,00
237	0100000070725	VOUCHER BBM 25.000 [BUAH]	140,00	25.000,00
238	0100000070725	VOUCHER BBM 25.000 [BUAH]	140,00	25.000,00
239	0100000070725	VOUCHER BBM 25.000 [BUAH]	160,00	25.000,00
240	0100000070725	VOUCHER BBM 25.000 [BUAH]	140,00	25.000,00
241	0100000070725	VOUCHER BBM 25.000 [BUAH]	140,00	25.000,00
242	0100000070725	VOUCHER BBM 25.000 [BUAH]	140,00	25.000,00
243	0100000070725	VOUCHER BBM 25.000 [BUAH]	140,00	25.000,00
244	0100000070725	VOUCHER BBM 25.000 [BUAH]	140,00	25.000,00

245	0100000070725	VOUCHER BBM 25.000 [BUAH]	320,00	25.000,00
246	0100000070725	VOUCHER BBM 25.000 [BUAH]	140,00	25.000,00
247	0100000070725	VOUCHER BBM 25.000 [BUAH]	140,00	25.000,00
248	010000007137	STICK KOLESTROL [DUS]	1,00	240.000,00
249	010000007235	AMLODIPINE 5 [BOTOL]	7,00	900,00
250	010000007241	GOM [KAPLET]	3,00	5.000,00
251	010000007241	GOM [KAPLET]	8,00	5.000,00
252	010000007326	AMPLOP SURAT KOP DINAS SEDANG [LEMBAR]	15,00	40.000,00
253	010000007334	CANGKUL BESAR (BAJA) [BUAH]	2,00	200.000,00
254	010000007339	ENGKRAK BESAR (BAMBU) [BUAH]	8,00	18.000,00
255	010000007342	GANCO [UNIT]	1,00	50.000,00
256	010000007354	KERANJANG BAMBU BESAR [BUAH]	5,00	60.000,00
257	010000007364	LAP MEJA / KACA (ORENGE) [BUAH]	25,00	12.000,00
258	010000007369	PEL LOBBY KAPAS BIRU 60 CM COMPLETE [UNIT]	25,00	98.000,00
259	010000007388	SAPU LANGIT - LANGIT [BUAH]	2,00	43.000,00
260	010000007419	SENER LALU LINTAS [BUAH]	13,00	210.000,00
261	010000007452	TISSUE HAND TOWEL [PAK]	25,00	30.000,00
262	010000007454	WIPER PEMBERSIH KACA (POLI KENCANA) [BUAH]	15,00	20.000,00
263	010000007508	OLI MESIN [GALON]	1,00	500.000,00
264	010000007811	BINDER CLIP 25 MM [DUS]	4,00	27.972,00
265	010000008274	WIPER LANTAI [BUAH]	15,00	41.000,00
266	010000008486	DEMACOLIN TAB [TABLET]	3,00	1.000,00
267	010000008494	DEXAMETHASONE 0,5 MG [TABLET]	4,00	1.000,00
268	010000008495	MICONAZOLE CREAM [TUBE]	3,00	8.991,00
269	2032796901028	PENGHAPUS PAPAN WHITEBOARD [BUAH]	14,00	10.000,00
270	BM000056082	Serbet Makan Kain [buah]	23,00	20.000,00
271	SALONPAS	[BOTOL]	3,00	100.000,00

Petugas yang Terlibat

HERSINANDA DWIRAKA, S.S.

NIP. -

Pengurus Barang Pembantu/Pengurus Barang

RIDWAN NUGRAHA PASA, S.STP.

NIP. 199203192014061002

Mengetahui
Pengguna Barang

Dr. SADIMIN, S.Pd., M.Eng.

NIP. 197212061994121001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman [http:// bpsdmd.jatengprov.go.id](http://bpsdmd.jatengprov.go.id)
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

BERITA ACARA
REKONSILIASI/DESK BARANG MILIK DAERAH TAHUN
TAHUN ANGGARAN 2024
ANTARA PENGURUS BARANG DAN PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor : 000.2/00373

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sembilan** bulan **Januari** tahun **Dua ribu dua puluh lima** bertempat di Ruang Subbag Keuangan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang, kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama : RIDWAN NUGRAHAPASA, S.STP
NIP. : 1992031920140610002
Pangkat/Gol : Penata Muda / IIIa
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengguna, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama : CHINTIA PRAHESTI YUGATPUTRI, A.Md.
NIP. : 199804282020122002
Pangkat/Gol : Pengatur Tingkat I / IId
Jabatan : Pelaksana Akuntansi
Dalam hal ini bertindak sebagai Penyusun Laporan Keuangan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah melaksanakan rekonsiliasi data BMD dengan membandingkan data laporan BMD per TRIWULAN IV. Dengan hasil sebagaimana dalam Lampiran.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan dalam rangka mendukung Laporan BMD.

PIHAK KEDUA

CHINTIA PRAHESTI YUGATPUTRI, A.Md.
NIP. 199804282020122002

PIHAK PERTAMA

RIDWAN NUGRAHAPASA, S.STP
NIP. 1992031920140610002

Mengetahui,
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng
NIP. 197212061994121001

Lampiran

Nomor : 000.2/00373

Tanggal : 9 Januari 2025

BERITA ACARA REKONSILIASI

1. Saldo Awal

No.	Uraian	Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)		Sesuai (✓)	Tidak Sesuai (✓)	Keterangan
		Volume	Nilai (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	ASET LANCAR					
	Persediaan	7.156,00	165.877.520,00	✓		
B.	ASET TETAP					
	1. Tanah	1,00	124.074.000.000,00	✓		
	2. Peralatan dan Mesin	7.220,00	38.288.031.012,00	✓		
	3. Gedung dan Bangunan	50,00	59.242.943.633,00	✓		
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	12,00	3.354.362.050,00	✓		
	5. Aset Tetap Lainnya	3.303,00	709.087.132,00	✓		
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	✓		
	7. Akumulasi Penyusutan	0,00	70.605.352.780,83	✓		
C.	ASET LAINNYA					
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	✓		
	2. Aset Tidak Berwujud	11,00	614.504.437,00	✓		
	3. Aset Lain-lain	8.693,00	4.447.572.305,00	✓		
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	614.504.437,00	✓		
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	4.162.967.505,00	✓		

Catatan Hasil Rekonsiliasi

1. Saldo awal sesuai dengan LKPD Tahun 2023

2. Saldo Akhir

No.	Uraian	Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)		Sesuai (✓)	Tidak Sesuai (✓)	Keterangan
		Volume	Nilai (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	ASET LANCAR					
	Persediaan	11.803,00	395.997.374,00	✓		
B.	ASET TETAP					
	1. Tanah	1,00	124.074.000.000,00	✓		
	2. Peralatan dan Mesin	7.703,00	41.809.017.490,00	✓		
	3. Gedung dan Bangunan	50,00	59.242.943.633,00	✓		
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	12,00	3.354.362.050,00	✓		
	5. Aset Tetap Lainnya	3.432,00	723.985.932,00	✓		
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	✓		
	7. Akumulasi Penyusutan	0,00	74.306.001.007,15	✓		
C.	ASET LAINNYA					
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	✓		
	2. Aset Tidak Berwujud	11,00	640.561.687,00	✓		
	3. Aset Lain-lain	8,00	709.390.000,00	✓		
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	614.504.437,00	✓		
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	424.785.200,00	✓		

Catatan Hasil Rekonsiliasi

- Terdapat penambahan yang berasal dari Belanja Modal senilai Rp 1.140.913.800,- pada Peralatan dan Mesin dengan rincian :
 - Alat besar sejumlah 1 unit senilai Rp 37.000.000,-
 - Alat angkutan sejumlah 1 unit senilai Rp 553.400.000,-
 - Alat kantor dan rumah tangga sejumlah 62 unit senilai Rp 422.990.000,-
 - Alat studio komunikasi dan pemancar sejumlah 11 unit senilai Rp 83.660.000,-
 - Alat komputer sejumlah 4 unit senilai Rp 28.965.000,-
 - Bahan Perpustakaan sejumlah 129 buah senilai Rp 14.898.800,-
- Terdapat penambahan yang berasal dari Hibah senilai Rp 2.439.571.478,- pada Peralatan dan Mesin dengan rincian :
 - Alat kantor dan rumah tangga sejumlah 216 unit senilai Rp 1.407.729.095,-
 - Alat studio komunikasi dan pemancar sejumlah 11 unit senilai Rp 97.146.093,-
 - Alat laboratorium sejumlah 15 unit senilai Rp 79.407.450,-
 - Alat persenjataan sejumlah 106 unit senilai Rp 551.077.358,-
 - Alat komputer sejumlah 58 unit senilai Rp 304.211.482,-
- Terdapat penambahan yang berasal dari Kapitalisasi Aset Tak Berwujud senilai Rp 26.057.250,-
- Terdapat pelepasan yang berasal dari Reklasifikasi ke Aset Lainnya sejumlah 2 unit senilai Rp 44.600.000,- pada Alat Angkutan berupa contain sampah kondisi rusak berat.
- Penghapusan aset lain-lain sejumlah 8.687 unit senilai Rp 3.782.782.305,- dari Penjualan Barang Inventaris Rusak Berat

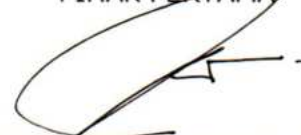
PIHAK KEDUA



CHINTIA PRAHESTI YUGATPUTRI, A.Md.

NIP. 199804282020122002

PIHAK PERTAMA



RIDWAN NUGRAHAPASA, S.STP

NIP. 1992031920140610002

Mengetahui,

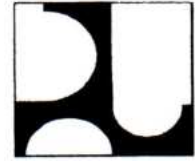
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. SADIMU, S.Pd, M.Eng

NIP. 197212061994121001

BERITA ACARA HIBAH



**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA (BMN)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 57 /BA/SJ/2022
Nomor : 030/0019295

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-12-2022), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **MOHAMMAD ZAINAL FATAH**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195/TPA Tahun 2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : **GANJAR PRANOWO**
Jabatan : Gubernur Jawa Tengah
Alamat : Jl. Pahlawan No.9, Mugassari, Semarang, Jawa Tengah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P TAHUN 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018-2023, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan.....

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Surat Menteri Keuangan nomor S-344/MK.6/2022 tanggal 18 Juli 2022, hal: Persetujuan Hibah Barang Milik Negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
8. Surat Menteri Keuangan nomor S-513/MK.6/2022 tanggal 9 Oktober 2022, hal: Persetujuan Hibah Barang Milik Negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor PS0403-Mn/1828 tanggal 16 September 2022, hal: Persetujuan Hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat, Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat, dan Aset Tetap Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada Satker Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah dan Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Magelang, dan Pemerintah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
10. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor PS0403-Mn/2098 tanggal 18 Oktober 2022, hal: Persetujuan Hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa Aset Tetap Lainnya pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Bengawan Solo Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
11. Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor ³²...../PKS/SJ/2022 dan 030/0019294 tanggal 7 Desember 2022.

PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan serah terima Barang Milik Negara (BMN) dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Penyerahan Barang Milik Negara ini dilakukan dalam rangka hibah Barang Milik Negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah untuk Jalan Nasional, Jalan Nasional Arteri, Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Renovasi, Aset Tetap Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat, dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat dengan total nilai perolehan sebesar **Rp210.771.140.684,00** (*dua ratus sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah*) dengan perincian sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Pasal 3...

Pasal 3

Dengan dilakukannya Serah Terima Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka seluruh Hak dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara tersebut beralih dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PIHAK KESATU menghapus dari Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP)/Buku Persediaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan PIHAK KEDUA melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5

- (1) Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan pelaksanaan dari Pasal 4 Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 32/PKS/SJ/2022 dan 030/0019294 tanggal 7 Desember 2022.
- (2) Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



GANJAR PRANOWO

PIHAK KESATU



MOHAMMAD ZAINAL FATAH

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA (BMN) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 YANG DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

No.	KODE BARANG	NOMOR BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	LOKASI	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH (LUAS/UNIT)	NILAI PEROLEHAN (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2.01.03.07.001	417	Tanah untuk Jalan Nasional	Tanah Jalan Diponegoro (Pati)	Tanah Jalan Diponegoro (Pati) Kabupaten Pati	2011	23.075 M ²	23.651.875.000,00
2	5.01.01.01.001	119	Jalan Nasional Arteri	Jalan Diponegoro (Pati)	Jalan Diponegoro (Pati), Kabupaten Pati	2012	17.072 M ²	14.996.380.374,00
3	5.01.01.01.001	120	Jalan Nasional Arteri	Jalan Sopyonyono (Pati)	Jalan Sopyonyono (Pati), Kabupaten Pati	2012	1.520 M ²	18.825.784.170,00
4	6.07.04.01.001	3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Renovasi	Jalan Tembus Karanganyar - Cemorosewu	Jalan Tembus Karanganyar Cemorosewu, Provinsi Jawa Tengah	2013	87.250 M ²	70.968.856.432,00
5	6.07.04.01.001	10	Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Renovasi	Jalan Lingkar Pati Utara	Jalan Lingkar Pati Utara, Provinsi Jawa Tengah	2013	1.552 M ²	15.181.282.827,00
6	1.01.05.01.006	66	Aset Tetap Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pusat Isolasi Covid-19 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Kawasan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Srandol, Kec. Banyumanik, Kota Semarang	2021	1	2.439.571.478,00

No.	KODE BARANG	NOMOR BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	LOKASI	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH (LUAS/UNIT)	NILAI PEROLEHAN (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	1.01.05.01.005	9	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	Pembangunan SPAM Keburejo Tahap II	SPAM Keburejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah	2019-2020	1	56.876.500.403,00
8	6.07.04.01.001	101	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Renovasi	Rehabilitasi Jaringan irigasi D.I. Cengklik, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah	Kecamatan Ngemplak dan Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali	2018	1	7.830.890.000,00
JUMLAH								210.771.140.684,00

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



MOHAMMAD ZAINAL FATAH

SK PENGHAPUSAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

NOMOR 028.3/59 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH YANG DIKELOLA DINAS KESEHATAN PROVINSI
JAWA TENGAH, DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH, DINAS
KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH, DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH, DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH, DINAS PEKERJAAN UMUM BINA
MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH, DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH, DINAS SOSIAL PROVINSI
JAWA TENGAH, BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, BADAN PENGELOLA PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
DR. RM. SOEJARWADI PROVINSI JAWA TENGAH, RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DR. ADHYATMA MPH PROVINSI JAWA TENGAH, RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH DR. REHATTA PROVINSI JAWA TENGAH, RUMAH SAKIT
JIWA DAERAH DR. AMINO GONDHUTOMO PROVINSI JAWA TENGAH,
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum KEDUA
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 030/56
Tahun 2023 tentang Persetujuan Penjualan Barang
Inventaris Dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Tengah, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah,
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dinas
Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah,
Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi
Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan
Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial
Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan
Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah,
Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soejarwadi Provinsi
Jawa Tengah, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adhyatma
MPH Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Jiwa
Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah,
Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah, perlu
menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku
Pengelola Barang Milik Daerah tentang Penghapusan
Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perhubungan Provinsi

Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soejarwadi Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adhyatma MPH Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah, Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/56 Tahun 2023 tentang Persetujuan Penjualan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soejarwadi Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adhyatma MPH Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah, Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Melaksanakan Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soejarwadi Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adhyatma MPH Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah, Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah, yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

- KEDUA : Menugaskan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menghapus dari Daftar Barang Inventaris sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan melaporkan hasil kegiatan dimaksud kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

SELAKU
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,



SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disahkan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
15. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
17. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soejarwadi Provinsi Jawa Tengah;
18. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma MPH Provinsi Jawa Tengah;
19. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah;
20. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah
21. Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah;
22. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 028.3/59 TAHUN 2024
TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH, DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH, DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH, DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH, DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH, BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, RUMAH SAKIT WIJA DAERAH DR. RM. SOEJARWADI PROVINSI JAWA TENGAH, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ADHYATMA MPH PROVINSI JAWA TENGAH, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. REHATTA PROVINSI JAWA TENGAH, RUMAH SAKIT WIJA DAERAH DR. AMINO GONDHUTOMO PROVINSI JAWA TENGAH, BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA TENGAH

DATA BARANG INVENTARIS DAN BARANG LAINNYA YANG DIHAPUS

NO	UNIT PENGELOLA	KODE BARANG	JENIS BARANG	MERK/TYPE	TAHUN	JML	HARGA PEROLEHAN (Rp)	KONDISI	HASIL PENILAIAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA TENGAH										
1		11.01.33.00.050601.000000.000000.1 980-1.3.2.05.02.06.014	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MICROPHONE	TOA	1980	1	1.650.000		73.272	MOHAMMAD KUSWANTORO JL. Bintoro 2 No. 23, RT.04/Rw.07 Lamper Gayam Sari SMRG 10.150.000,-
2		11.01.33.00.050601.000000.000000.2 003-1.3.2.05.01.05.005	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.WHITTE BOARD	-	2003	1	900.000		93.917	
3		11.01.33.00.050601.000000.000000.2 003-1.3.2.05.02.01.025	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KASUR/SPRING BED	-	2003	1	785.000		90.000	
4		11.01.33.00.050601.000000.000000.2 003-1.3.2.05.02.01.054	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS	-	2003	1	1.510.714		5.345	
5		11.01.33.00.050601.000000.000000.2 003-1.3.2.05.02.01.054	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS	-	2003	1	1.510.714		5.345	
6		11.01.33.00.050601.000000.000000.2 003-1.3.2.05.02.01.054	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS	-	2003	1	1.510.714		5.345	
7		11.01.33.00.050601.000000.000000.2 003-1.3.2.05.02.01.054	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS	-	2003	1	1.510.714		5.345	
8		11.01.33.00.050601.000000.000000.2 003-1.3.2.05.02.01.054	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS	-	2003	1	1.510.714		5.345	
9		11.01.33.00.050601.000000.000000.2 003-1.3.2.05.02.01.054	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS	-	2003	1	1.510.714		5.345	
10		11.01.33.00.050601.000000.000000.2 006-1.3.2.05.02.01.073	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .LEMARI PAKAIAN	LEMARI PAKAIAN 3 PINTU	2006	1	2.250.000		134.400	

115	11.01.33.74.010204.00000.00000.2 007-1.3.2.05.02.01.035.000140	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.BANGKU TUNGGU	Chitose/Caesar P	2007	1	288.665	Rusak Berat	20.000
116	11.01.33.74.010204.00000.00000.2 007-1.3.2.05.02.01.035.000141	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.BANGKU TUNGGU	Chitose/Caesar P	2007	1	288.665	Rusak Berat	20.000
117	11.01.33.22.010204.00000.00000.2 016-1.3.2.05.02.06.999.000029	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LAIN-LAIN	Grundfos/SP 5A-21	2016	1	19.800.000	Rusak Berat	50.000
118	11.01.33.74.010204.00000.00000.2 008-1.3.2.01.03.05.003.000001	ALAT BESAR.STATIONARY WATER PUMP	-	2008	1	18.866.621	Rusak Berat	50.000
119	11.01.33.74.010204.00000.00000.2 010-1.3.2.01.03.05.003.000001	ALAT BESAR.STATIONARY WATER PUMP	Grundfos	2010	1	2.501.777	Rusak Berat	50.000
120	11.01.33.74.010204.00000.00000.2 011-1.3.2.05.02.06.999.000008	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LAIN-LAIN	Grundfos / JP 3	2011	1	2.513.414	Rusak Berat	50.000
121	11.01.33.74.010204.00000.00000.2 011-1.3.2.05.02.06.999.000010	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LAIN-LAIN	Grundfos / JP Basic 3	2011	1	2.450.000	Rusak Berat	50.000
122	11.01.33.74.010204.00000.00000.2 014-1.3.2.05.02.06.999.000037	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LAIN-LAIN	Grundfos	2014	1	49.810.000	Rusak Berat	50.000
123	11.01.33.74.010204.00000.00000.2 014-1.3.2.05.02.06.999.000039	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LAIN-LAIN	Grundfos	2014	1	27.568.000	Rusak Berat	50.000
124	11.01.33.74.010204.00000.00000.2 014-1.3.2.05.02.06.999.000053	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LAIN-LAIN	Grundfos	2014	1	3.200.000	Rusak Berat	50.000
125	11.01.33.74.010204.00000.00000.2 011-1.3.2.05.01.05.999.000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.LAIN-LAIN	-	2011	1	36.245.000	Rusak Berat	2.240.000
TOTAL						125	4.999.356.479	7.188.000

14	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH							
1	11.01.11.30.040601.00000.00000.1 976-1.3.2.05.01.04.008.000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA. PETI UANG/CASH BOX/ COIN BOX		1976	1	35.000		1.000
2	11.01.11.30.040601.00000.00000.1 978-1.3.2.05.02.01.999.000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LAIN-LAIN		1978	1	45.000		1.000
3	11.01.11.30.040601.00000.00000.1 979-1.3.2.05.01.04.001.000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LEMARI BESI/METAL	Alba	1979	1	280.000		1.000
4	11.01.11.30.040601.00000.00000.1 979-1.3.2.05.01.04.001.000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LEMARI BESI/METAL	Alba	1979	1	280.000		1.000
5	11.01.11.30.040601.00000.00000.1 979-1.3.2.05.01.04.001.000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LEMARI BESI/METAL	Alba	1979	1	280.000		1.000
6	11.01.11.30.040601.00000.00000.1 979-1.3.2.05.01.04.001.000004	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LEMARI BESI/METAL	Alba	1979	1	280.000		1.000
7	11.01.11.30.040601.00000.00000.1 979-1.3.2.05.01.04.001.000005	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LEMARI BESI/METAL	Alba	1979	1	280.000		1.000
8	11.01.11.30.040601.00000.00000.1 979-1.3.2.05.01.04.001.000006	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LEMARI BESI/METAL	Alba	1979	1	280.000		1.000
9	11.01.11.30.040601.00000.00000.1 979-1.3.2.05.01.04.001.000007	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LEMARI BESI/METAL	Alba	1979	1	280.000		1.000
10	11.01.11.30.040601.00000.00000.1 979-1.3.2.05.01.04.001.000008	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LEMARI BESI/METAL	Alba	1979	1	280.000		1.000
11	11.01.11.30.040601.00000.00000.1 979-1.3.2.05.01.04.001.000009	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LEMARI BESI/METAL	Alba	1979	1	280.000		1.000
12	11.01.11.30.040601.00000.00000.1 979-1.3.2.05.01.04.001.000010	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LEMARI BESI/METAL	Alba	1979	1	280.000		1.000

NUR' AINI
Jl. Wonomulyo Mukti Barat II-79,
Tlogomulyo Pedurungan SMG
Rp. 58.000.000

8684	11.01.11.30.040601.00000.00000.2 009-1.3.2.05.03.07.010.000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LEMARI DAN ARSIP PEJABAT .BUFFET KACA	Chitos	2009	1	375.650		25.000	
8685	11.01.11.30.040601.00000.00000.2 009-1.3.2.05.03.07.010.000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LEMARI DAN ARSIP PEJABAT .BUFFET KACA	Chitos	2009	1	375.650		25.000	
8686	11.01.11.30.040601.00000.00000.2 009-1.3.2.06.01.01.999.000004	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.LAIN-LAIN	Sony	2009	1	11.275.000		4.000	
8687	11.01.11.30.040601.00000.00000.2 009-1.3.2.06.01.01.999.000005	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.LAIN-LAIN	Sony	2009	1	11.275.000		4.000	
TOTAL						8.687	3.782.782.305	57.571.300	
15	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH								
1	11.01.11.15.030401.00000.00000.2 011-1.3.2.04.01.05.999.000001	ALAT PENGOLAHAN ALAT LABORATORIUM PERTANIAN		2011	1	3.400.000	RUSAK BERAT	16.800	MARIYONO Jl. Dworowati 6, Rt.01/Rw.09 Krobogan, Semarang Rp. 30.375.000,-
2	11.01.11.30.030401.00000.00000.2 011-1.3.5.02.02.04.999.000009	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN.ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN LAINNYA		2011	1	62.500	RUSAK BERAT	5.600	
3	11.01.11.30.030401.00000.00000.2 011-1.3.5.02.02.04.999.000010	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN.ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN LAINNYA		2011	1	62.500	RUSAK BERAT	5.600	
4	11.01.11.30.030401.00000.00000.2 012-1.3.5.02.02.04.999.000006	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN.ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN LAINNYA		2012	1	300.000	RUSAK BERAT	1.000	
5	11.01.11.30.030401.00000.00000.2 012-1.3.5.02.02.04.999.000007	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN.ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN LAINNYA		2012	1	300.000	RUSAK BERAT	1.000	
6	11.01.11.30.030401.00000.00000.2 012-1.3.5.02.02.04.999.000010	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN.ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN LAINNYA		2012	1	1.200.000	RUSAK BERAT	1.000	
7	11.01.11.30.030401.00000.00000.2 012-1.3.5.02.02.04.999.000011	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN.ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN LAINNYA		2012	1	1.200.000	RUSAK BERAT	1.000	
8	11.01.11.30.030401.00000.00000.2 012-1.3.5.02.02.04.999.000012	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN.ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN LAINNYA		2012	1	1.200.000	RUSAK BERAT	1.000	
9	11.01.11.30.030401.00000.00000.2 012-1.3.5.02.02.04.999.000013	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN.ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN LAINNYA		2012	1	1.200.000	RUSAK BERAT	1.000	
10	11.01.11.30.030401.00000.00000.2 012-1.3.5.02.02.04.999.000014	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN.ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN LAINNYA		2012	1	300.000	RUSAK BERAT	1.000	
11	11.01.11.30.030401.00000.00000.2 012-1.3.5.02.02.04.999.000015	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN.ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN LAINNYA		2012	1	300.000	RUSAK BERAT	1.000	
12	11.01.11.30.030401.00000.00000.2 012-1.3.5.02.02.04.999.000016	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN.ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN LAINNYA		2012	1	300.000	RUSAK BERAT	1.000	
13	11.01.11.30.030401.00000.00000.2 012-1.3.5.02.02.04.999.000017	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN.ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN LAINNYA		2012	1	300.000	RUSAK BERAT	1.000	

S2	11.01.33.74.010601.000000.000000.2 012-1.3.2.06.01.01.096	Camera	2012	2	3.000.000	Buruk (Rusak)	4.400
S3	11.01.33.74.010601.000000.000000.2 012-1.3.2.06.01.02.061	Jensa camera	2012	1	7.000.000	Buruk (Rusak)	9.600
S4	11.01.33.74.010601.000000.000000.2 012-1.3.2.06.01.02.118	Lampu Blitz	2012	2	5.500.000	Buruk (Rusak)	2.000
S5	11.01.33.74.010601.000000.000000.2 012-1.3.2.06.01.02.118	Lampu sorot	2012	1	3.100.000	Buruk (Rusak)	1.000
S6	11.01.33.74.010601.000000.000000.2 012-1.3.2.06.01.02.118	Lampu sorot	2012	2	6.000.000	Buruk (Rusak)	2.000
S7	11.01.33.74.010601.000000.000000.2 013-1.3.2.06.02.01.003	Pesawat Telepon	2013	9	8.370.000	Buruk (Rusak)	19.800
TOTAL				187	888.377.832		6.509.800
JUMLAH TOTAL				22.102	40.558.564.666	-	345.417.377

SEKRETARAT DAERAH PROVINSI
 JAWA TENGAH
 SEKURU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
SETDA
 SURABAYA
 JAWA TENGAH



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya No. 29 Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50614. Telepon 8311174
Faksimile 024-8311172 Laman <http://www.bkpad.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bkpad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor : 38/BA-REKON/SKPD/I/2025

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : **SRI SULASTRI, SE., M.M.**
NIP : 19700519 199503 2 002
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKAD Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si**
NIP : 19780410 199703 1 005
Jabatan : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah melakukan Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2024, dengan hasil sebagai berikut .

NO	URAIAN	REALISASI KASDA (Rp)	REALISASI SKPD (Rp)	SELISIH (Rp)	KET.
	Penerimaan				
1	Pendapatan	2.261.0245.879	22.610.245.879		
2	Pengembalian Sisa TU	5.911.256.709	5.911.256.709		
3	Contrapost LS & Pegawai	24.462.452	24.462.452		
	Total	28.545.965.040	28.545.965.040		
	Pengeluaran (SP2D)				
1	UP	700.000.000	700.000.000		
2	GU	6.446.344.379	6.446.344.379		
3	TU	22.033.610.570	22.033.610.570		
4	LS Pegawai	25.514.267.973	25.514.267.973		
5	LS Barang & Jasa	14.423.122.447	14.423.122.447		
	Total	69.117.345.369	69.117.345.369		

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Jawa Tengah

ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si
NIP. 19780410 199703 1 005

Dibuat di Pati, 23 Januari 2025
Pihak Pertama
Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH

SRI SULASTRI, SE., M.M.
NIP. 19700519 199503 2 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024 -8311172
Faksimile 024 - 8311172 laman [http:// www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id)
surat elektronik bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI
Nomor : 40/BA-RKN/JAN-SKPD/I/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : **DEASY RINA WIJAYANTI , SE, M.Si.**
NIP : **19851204 200902 2 012**
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Jawa Tengah,
yang selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DANANG ARI PRABOWO, SH**
NIP : **19691014 199203 1 003**
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BAPENDA Provinsi Jawa Tengah
yang selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : **ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si**
NIP : **19780410 199703 1 005**
Jabatan : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah
yang selanjutnya disebut Pihak Ketiga

Para pihak telah melakukan rekonsiliasi data realisasi APBD, rekonsiliasi dengan SIPENARI, realisasi P3DN serta Ceklist Kebutuhan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Puluh Empat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil sebagaimana terlampir.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 3 (Tiga) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Pati, 23 Januari 2025



DANANG ARI PRABOWO, SH
NIP. 19691014 199203 1 003



Pihak Pertama
DEASY RINA WIJAYANTI , SE, M.Si.
NIP. 19851204 200902 2 012



Pihak Ketiga
ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si
NIP. 19780410 199703 1 005

REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA APBD

Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi Bid. AKT BPKAD	Realisasi SKPD	Selisih	Keterangan
Pendapatan	22.610.245.879	22.610.245.879	-	
Pendapatan Asli Daerah	22.610.245.879	22.610.245.879	-	
Pajak Daerah	-		-	
Retribusi Daerah	2.612.469.000	2.612.469.000	-	
Lain-lain PAD yang Sah	19.997.776.879	19.997.776.879	-	
Pendapatan Transfer	-		-	
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-		-	
Belanja	63.181.626.208	63.181.626.208	-	
Belanja Pegawai	25.936.685.521	25.936.685.521	-	
Belanja Barang dan Jasa	36.104.026.887	36.104.026.887	-	
Belanja Subsidi	-		-	
Belanja Hibah	-		-	
Belanja Bantuan Sosial	-		-	
Belanja Modal	1.140.913.800	1.140.913.800	-	
Belanja Tidak Terduga	-		-	
Belanja Transfer	-		-	

Rincian Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD periode 1 Januari s/d 31 Desember 2024 terlampir.

Pihak Ketiga



ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si
NIP. 19780410 199703 1 005

Pihak Pertama



DEASY RINA WIJAYANTI, SE, M.Si.
NIP. 19851204 200902 2 012

REKONSILIASI E-PENATAUSAHAAN DENGAN SIPENARI

Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi Bid. AKT BPKAD	SIPENARI	Selisih	Keterangan
Pendapatan	22.610.245.879	22.610.245.879	-	
Pendapatan Asli Daerah	22.610.245.879	22.610.245.879	-	
Pajak Daerah	-		-	
Retribusi Daerah	2.612.469.000	2.612.469.000	-	
Lain-lain PAD yang Sah	19.997.776.879	19.997.776.879	-	
Pendapatan Transfer	-		-	
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-		-	

Rincian Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD periode 1 Januari s/d 31 Desember 2024 terlampir.



DANANG ARI PRABOWO, SH
NIP. 19691014 199203 1 003

Pihak Kedua



DEASY RINA WIJAYANTI, SE, M.Si.
NIP. 19851204 200902 2 012

Pihak Pertama



ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si
NIP. 19780410 199703 1 005

Pihak Ketiga

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : **ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si**
NIP : **19780410 199703 1 005**
Jabatan : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah

menyatakan bahwa realisasi belanja Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Operasi		36.104.026.887
1. Belanja Barang dan jasa	:	36.104.026.887
2. Belanja hibah barang/jasa	:	-
3. Belanja bantuan sosial barang/jasa	:	-
Belanja Modal		1.103.913.800
4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	:	1.089.015.000
5. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	:	-
6. Belanja Modal jalan, jaringan & irigasi	:	-
7. Belanja Modal Aset tetap lainnya	:	14.898.800
Jumlah Total Realisasi		37.207.940.687

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di Pati, 23 Januari 2025

Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Jawa Tengah



ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si

NIP. 19780410 199703 1 005



Ceklist Kebutuhan Penyusunan Laporan Keuangan

No	Uraian	Lengkap	Tidak	NILAI	Keterangan
1	SPJ Fungsional Pendapatan per 31 Desember 2024	v		22.610.245.879,00	
2	SPJ Fungsional Belanja per 31 Desember 2024	v		63.181.626.208,00	
3	Alasan Realisasi Pendapatan dan Belanja kurang dari 95% serta Pendapatan kurang dari 95% dan lebih dari 100% per 31 Desember 2024	v			
4	Laporan realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam negeri per 31 Desember 2024	v		37.207.940.687,00	
5	Laporan realisasi belanja barang dan Jasa yang menjadi persediaan per 31 Desember 2024	v		3.550.304.006,00	
6	Laporan realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan stunting Per 31 Desember 2024			NIHIL	
7	Laporan realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Per 31 Desember 2024			NIHIL	
8	Laporan realisasi belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui e-purchasing Per 31 Desember 2024	v		17.302.943.148,00	
9	Rekap Piutang Per 31 Desember 2024	-	-	-	Tidak ada piutang
10	Laporan Rincian Piutang dan Pembayaran di Tahun 2025	-	-	-	Tidak ada piutang
11	Rekap Utang dan Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2024 (Utang Non Jasa Pelayanan)	-	-	-	Tidak ada utang
12	Rekap Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2024	v		12.589.671,70	
13	Rekap Kas per 31 Desember 2024 dan Bukti Penyetoran STS di Tahun 2025	-	-	-	Tidak ada kas per 31 Desember 2024
14	Daftar Belanja yang dikapitalisasi ke Aset Tetap	v		26.057.250,00	
15	Kertas Kerja Aset Tetap, Aset Lainnya (cetak sim asset)	v			
16	Kertas Kerja Persediaan (cetak sim asset)	v		395.997.374,00	
17	Draft Kertas Kerja Penyusunan Laporan Keuangan	v			
18	Cetak Realisasi Pendapatan Sipenari	v		22.610.245.879,00	

BLUD					
1	SP3B BLUD per 31 Desember 2024	-	-	-	-
2	Rekap Klaim Tagihan BLUD 2024 yang Diverifikasi di Tahun 2025	-	-	-	-
3	Rekap Utang Jasa Pelayanan per 31 Desember 2024	-	-	-	-
4	Daftar Persediaan Obat Kadaluarsa	-	-	-	-

NB: semua kekurangan dan perbedaan akan diselesaikan paling lambat 31 Januari 2025

Pihak Ketiga



ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si
NIP. 19780410 199703 1 005

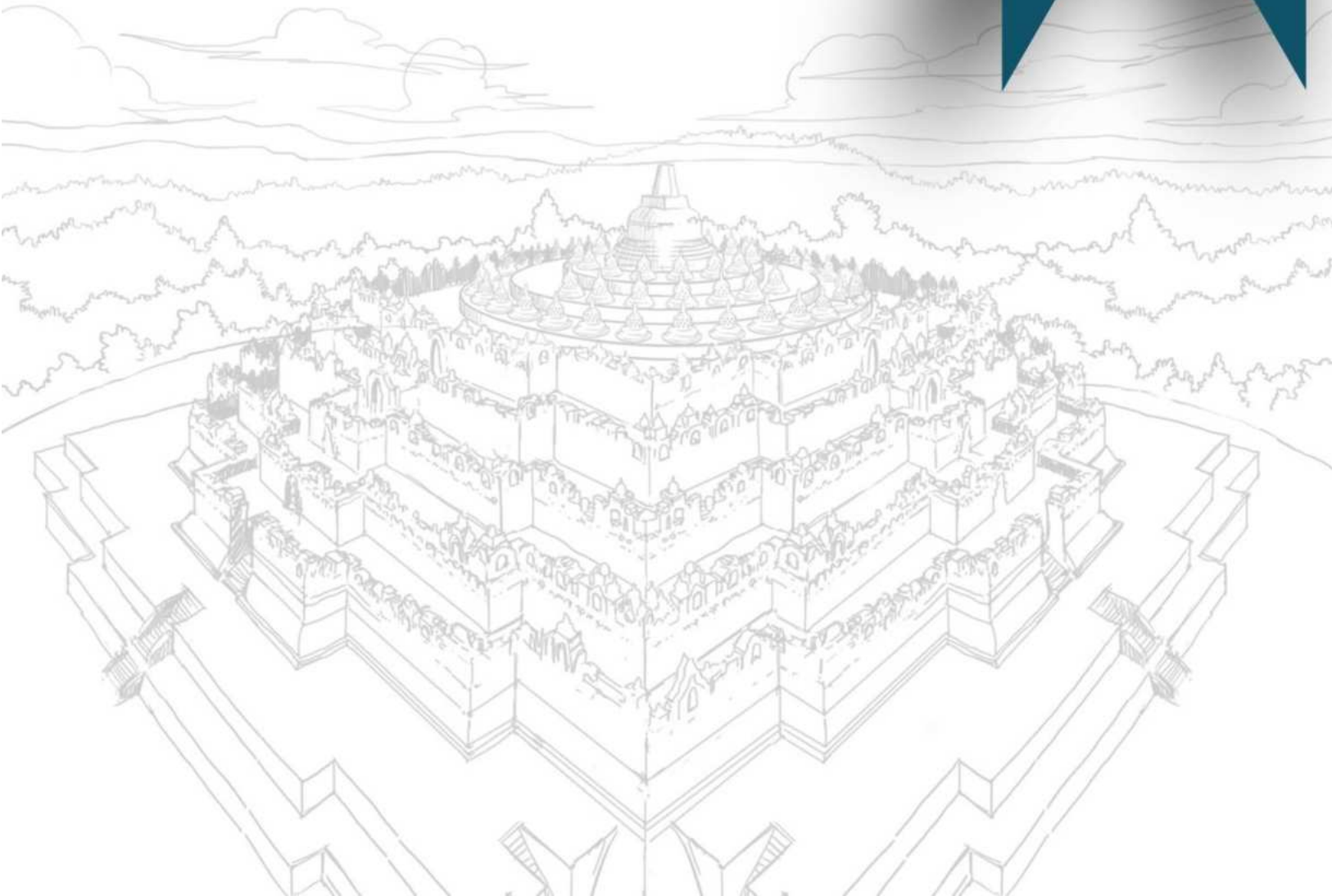
Pihak Pertama



DEASY RINA WIJAYANTI, SE, M.Si.
NIP. 19851204 200902 2 012

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD

BPSDMD 2024





BPSDMD Provinsi Jawa Tengah is located in Semarang City area which has 21 Ha area with a sloping land contour. The large area enough guarantees a balance between building and land area so that coolness of the environment was maintained. The area also allows for increased productivity.

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah has a function to help The Governor to implement The Functions Of Government Affairs Support in the field of Development of ASN Human Resources which is the authority of the region and co-administration task assigned by The Regional Head.